

**SKRIPSI**

**PROSES KERJASAMA PENGAMANAN WILAYAH LAUT SULU  
MELALUI *TRILATERAL COOPERATION AGREEMENT* (TCA)**

**PADA TAHUN 2016 – 2017**

Oleh :

Muyassarotul Hasanah ( 135120407121027 )

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh

Gelar Sarjana Ilmu Politik



**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

**MALANG**

**2020**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**PROSES KERJASAMA PENGAMANAN WILAYAH LAUT SULU MELALUI  
TRILATERAL COOPERATION AGREEMENT ( TCA ) PADA TAHUN 2016 – 2017**

Disusun Oleh:

Muyassaratul Hasanah

NIM. 135120407121027

Telah disetujui oleh dosen pembimbing:

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,

**Ni Komang Desy Arya Pinatih, S.IP., M.SI**

NIP 2011028412302001

**Dian Mutmainah, S.IP., MA**

NIP 197803192005012002

Mengetahui,

Ketua Prodi Hubungan Internasional

**Aswin Ariyanto Aziz, S.IP., M.DevSt.**

NIP. 19780220201021001

**LEMBAR PENGESAHAN**  
**PROSES KERJASAMA PENGAMANAN WILAYAH LAUT SULU MELALUI**  
**TRILATERAL COOPERATION AGREEMENT ( TCA ) PADA TAHUN 2016 – 2017**

Disusun Oleh:

Muyassaratul Hasanah  
NIM. 135120407121027

Telah diuji dan dinyatakan **LULUS** dalam ujian Sarjana  
pada tanggal 17 Oktober 2019

Tim Penguji:

Ketua Majelis Penguji,

Sekretaris Majelis Penguji,

**Anggun Trisnanto, S.IP., M.IDEA**  
NIP. 198001192008121001

**Achmad Fathoni Kurniawan, S.IP., MA**  
NIP. 2009068201231001

Anggota Majelis Penguji 1,

Anggota Majelis Penguji 2

**Ni Komang Desy Setiawati Arya Pinatih, S.IP., M.SI**  
NIP. 2011028412302001

**Dian Mutmainah, S.IP., MA**  
NIP. 197803192005012002

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

**Prof. Dr. Unti Ludigdo, SE, M.Si., Ak**  
NIP. 196908141994021001

**LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muyassaratul Hasanah

NIM : 135120407121027

Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional

Peminatan : International Security and Peace

Fakultas : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas : Universitas Brawijaya

Judul : PROSES KERJASAMA PENGAMANAN WILAYAH LAUT SULU  
MELALUI TRILATERAL COOPERATION AGREEMENT ( TCA ) PADA  
TAHUN 2016 – 2017

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya buat ini adalah karya saya pribadi. Setelah melakukan berbagai pengecekan melalui perpustakaan, internet, dan media-media lainnya, saya tidak menemukan skripsi yang seluruhnya serupa dengan skripsi “PROSES KERJASAMA PENGAMANAN WILAYAH LAUT SULU MELALUI TRILATERAL COOPERATION AGREEMENT ( TCA ) PADA TAHUN 2016 – 2017” yang saya buat. Sumber-sumber yang dijadikan sebagai acuan dalam skripsi ini juga telah dikutip sesuai dengan standar penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Malang, 4 oktober 2019

Muyassaratul Hasanah

## KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT, karena dengan rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan perkuliahan dengan skripsi yang

berjudul “PROSES KERJASAMA PENGAMANAN WILAYAH LAUT SULU MELALUI TRILATERAL COOPERATION AGREEMENT ( TCA )

PADA TAHUN 2016 – 2017”. Selain sebagai persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Ilmu Politik di Program Studi Ilmu Hubungan

Internasional Universitas Brawijaya, skripsi ini disusun oleh penulis

berdasarkan ketertarikan penulis terhadap topik pengamanan maritim,

khususnya negara Malaysia, Filipina dan Indonesia. Penulis mengucapkan

terima kasih kepada berbagai pihak yang telah mendukung dalam proses

penyusunan skripsi sehingga penulis bersemangat dan berjuang dalam

menyelesaikannya. Untuk itu, ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada :

1. Allah SWT yang telah memberikan keberkahan, kemudahan, kekuatan dan

kelancaran kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan serta kedua

orang tua penulis, yang menjadi motivasi terbesar bagi penulis, terimakasih

atas doa, dukungan moriil dan materil yang diberikan tiada henti untuk

penulis sehingga dapat terselesaikan skripsi ini, maaf jika studi ini tidak selesai tepat waktu seperti harapan bapak dan ibu.

2. Ibu Ni Komang Desy Setiawati Arya Pinatih, S.IP., M.SI. selaku dosen pembimbing pertama yang telah memberikan dedikasi sepenuh hati untuk membimbing penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Semangat dan ketegasan Bu Desy selalu menginspirasi. Maafkan saya untuk segala kesalahan dan kelalaian saya selama penulisan penelitian.

3. Ibu Dian Mutmainah, S.IP., MA. selaku dosen pembimbing kedua yang sangat bertanggung jawab dalam mengarahkan penulis dan tidak pernah absen memberikan bimbingan terbaiknya demi kesempurnaan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Terima kasih untuk ilmu dan banyak pelajaran yang diberikan selama masa bimbingan.

4. Uda Wezzy Redo Asmara, S.T. Sutan Rang Kayo nan Gapuak and his family. My precious thing in my life, the one who holding me when I'm down and lifting me up whenever it's needed. You're always there without complaining. Thank you so much you still besides ♥

5. Maria Kartika, Aprilia Sulistyaningrum, Ratih Ayu Pramita, Desy Aisyah, Poetri Viandri, Khainur Rifki, and all my friends who gave me memorable thing in the last 1 year my college life. Best wishes for you guys.

6. St Nur Choiria & Sister, Toyyibah, Desta Saesarwati, Mbak Meli, Mbak

Yuyun and all kos-mate in the 7<sup>th</sup> Karangmloko, thank you for all sorrow and happiness that we shared!

7. Agnes Yulia Citra beserta segenap Kollen dan Beauty First Crew serta Ibu

Syarifah dan Staff PKBL PT. Perkebunan Nusantara X, Bapak M Riza

Hanafi, S.IP., M.IA. selaku dosen pembimbing akademik dan pengarah Tim

penelitian HI UB di Situbondo Dan Segenap pihak yang berkontribusi pada

pembentukan karier professional penulis.

8. Mas Irfan, Mbak Dita, Mas Saiful dan pihak yang tidak akan diabaikan dari

segala aktivitas perkuliahan dan prodi. Pihak yang sangat membantu penulis

dalam banyak urusan akademik dan administratif.

9. Pihak- pihak lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu,

terimakasih banyak untuk segala support dan uluran tangan yang diberikan

hingga saat ini.

Malang, 1 Januari 2020

Muyassaratul Hasanah

**PROSES KERJASAMA PENGAMANAN WILAYAH LAUT SULU MELALUI  
TRILATERAL COOPERATION AGREEMENT ( TCA ) PADA TAHUN 2016 –  
2017**

**ABSTRAK**

**Oleh : Muyassaratul Hasanah**

Laut Sulu merupakan wilayah teritori Filipina yang berbatasan langsung dengan Indonesia dan Malaysia dan menjadi salah satu jalur pelayaran alternative selain Selat Malaka. Jalur ini sering dilalui oleh kapal kargo yang memiliki angkatan batu bara dan menjadi salah satu destinasi wisata bawah laut oleh beberapa turis mancanegara. Namun selama tahun 2016 – 2017 beberapa aktivitas di Laut Sulu terpaksa dihentikan karena adanya ancaman maritim dari para perompak atau penjahat yang beroperasi di sekitar Laut Sulu yang menyebabkan kerugian ekonomi khususnya bagi Malaysia dan Indonesia dimana warga negara dari kedua negara tersebut dijadikan sandera oleh pelaku kejahatan maritim yang beroperasi di Laut Sulu.

Penulis akan membahas mengenai proses kerjasama antara Malaysia, Filipina dan Indonesia dimana ketiga negara ini memiliki kepentingan atas Laut Sulu, salah satunya yaitu motif ekonomi dimana Laut Sulu digunakan sebagai jalur pengiriman komoditas. Dalam penelitian ini penulis melakukan analisa mengenai proses pengamanan Laut Sulu menggunakan konsep *Cooperative Security* yang memiliki tiga variabel yaitu ; *Exploiting Changes*, *Overcoming Impediment* dan *Respond to Challenges*.

Kata Kunci : Laut Sulu, keamanan maritim, kerjasama keamanan, kejahatan maritim, pengamanan, ekonomi.



**COOPERATION PROCESS TO SECURE THE REGION OF SULU  
SEA THROUGH TRILATERAL COOPERATION AGREEMENT (TCA ) 2016 - 2017**

**ABSTRACT**

**By: Muyassaratul Hasanah**

The Sulu Sea is one of territory of the Philippines directly bordering with Indonesia and Malaysia and become one of the alternative shipping lanes besides the Malacca Strait. This path is often crossed by cargo ships that loaded with coal also become one of the underwater tourist destinations by several foreign tourists. However, during 2016 - 2017 some activities in the Sulu Sea had be stopped due to the maritime threat of pirates or criminals happened around the Sulu Sea that caused economic losses especially for Malaysia and Indonesia where citizens of both countries were kidnapped by maritime criminals which operates in the Sulu Sea.

The author will discuss the cooperation process between Malaysia, Philippines and Indonesia where these three countries have an interest to Sulu Sea, one of them is economic motives where the Sulu Sea is used as a commodity shipping road. In this study the authors conducted an analysis of the Sulu Sea security process using the Cooperative Security concept which has three variables those are ; Exploiting Changes, Overcoming Impediment and Respond to Challenges.



Keywords: Sulu Sea, maritime security, security cooperation, maritime crime, security, economy.



**DAFTAR ISI**

<b>Lembar Persetujuan .....</b>	<b>ii</b>
<b>Lembar Pengesahan.....</b>	<b>iii</b>
<b>Lembar Pernyataan Orisinalitas .....</b>	<b>iv</b>
<b>Kata Pengantar.....</b>	<b>v</b>
<b>Abstrak.....</b>	<b>viii</b>
<b>Abstract.....</b>	<b>x</b>
<b>Daftar Isi .....</b>	<b>xi</b>
<b>Daftar Singkatan .....</b>	<b>xiv</b>
<b>Daftar Gambar .....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I Pendahuluan .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	8
1.3 Tujuan Penelitian .....	8
1.4 Manfaat Penelitian .....	9
<b>BAB II Tinjauan Pustaka .....</b>	<b>10</b>
2.1 Studi Terdahulu .....	10
2.2 Definisi Konseptual .....	19
2.3 Definisi Operasional .....	31
2.4 Operasionalisasi Konsep .....	38
2.5 Alur Pemikiran .....	41
2.6 Argumen Utama.....	42
<b>BAB III Metode Penelitian .....</b>	<b>44</b>
3.1 Jenis Penelitian .....	44
3.2 Ruang Lingkup Penelitian.....	44
3.3 Level Analisa .....	45
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	45
3.5 Teknik Analisa Data .....	45

3.6 Sistematika Penulisan.....	46
<b>BAB IV Ancaman Kejahatan Laut Sulu Sebagai KONSEN Wilayah Pengamanan Oleh Negara Trilateral Cooperation Agreement ( TCA ) .....</b>	<b>48</b>
4.1 Arti Strategis Laut Sulu untuk Malaysia, Filipina dan Indonesia .....	49
4.1.1 Potensi Bawah Laut dan Kekayaan Alam Laut Sulu .....	50
4.1.2 Potensi Laut Sulu Sebagai Jalur Perdagangan dan Transportasi .....	54
4.2 Ancaman Kejahatan Maritim di Laut Sulu .....	58
4.2.1 Perompakan .....	60
4.2.2 Penyelundupan Senjata Illegal .....	66
4.2.3 Peredaran Narkoba dan Obat Obatan Terlarang .....	70
4.2.4 Terorisme dan Gerakan Separatisme .....	73
4.3 Kategori Kejahatan Maritim / CAT .....	74
<b>BAB V Analisa Proses Pengamanan Wilayah Laut Sulu Melalui Trilateral Cooperation Agreement pada Tahun 2016 – 2017 .....</b>	<b>77</b>
5.1 <i>Exploiting Changes</i> .....	79
5.1.1 <i>Conceptual Challenges</i> .....	81
5.1.2 <i>The Primacy of Economic Domestic</i> .....	87
5.1.3 <i>Domestic Policy and Foreign Policy</i> .....	91
5.2 <i>Overcoming Impediment</i> .....	98
5.2.1 <i>State Fragility and Challenges to Internal Stability</i> .....	99
5.2.2 <i>Conflicting Perceptions</i> .....	103
5.2.3 <i>Strategic Assymmetric</i> .....	106
5.3 <i>Respond to Challenges</i> .....	109
5.3.1 <i>Change in Perspectives</i> .....	109
5.3.2 <i>Change in Operations</i> .....	111

**BAB VI Penutup ..... 114**  
6.1 Kesimpulan ..... 114  
6.2 Saran ..... 116  
**Daftar Pustaka ..... 119**



## DAFTAR SINGKATAN

ADMM : *Asean Defence Minister Meeting*

ARMM : *Autonomous Region in Muslim Mindanao*

BIMP – EAGA : *Brunei – Indonesia – Malaysia – Philippines East ASEAN Growth*

*Area*

GDP : *Gross Domestic Product*

IMO : *International Maritime Organization*

MCC : *Maritime Command Center*

MILF : *Moro Islamic Front Liberation*

MNLF : *Moro National Front Liberation*

MPOB : *Malaysian Palm Oil Board*

MSP : *Malacca Straits Patrols*

NGO : *Non Government Organization*

SALW : *Small Arms and Light Weapon*

SSME : *Sulu Sulawesi Marine Ecoregion*

TCA : *Trilateral Cooperation Agreement*

TSD : *Trilateral Strategic Dialogue*

UNCLOS : *United Nation Convention on The Law of the Sea*

UNODC : *United Nation Office on Drugs and Crime*



DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 1.1.1 ..... 8

GAMBAR 4.1.1 ..... 52

GAMBAR 4.1.2 ..... 56

GAMBAR 4.2.1 ..... 63

GAMBAR 4.2.2 ..... 67



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 LATAR BELAKANG MASALAH

Fungsi utama negara pada era globalisasi semakin kompleks, upaya untuk menjaga pertahanan juga kian beragam. Adapun ancaman yang mengintai negara bukan hanya berasal dari negara lawan atau kejahatan perang konvensional. Saat ini ancaman kejahatan terbagi menjadi dua yaitu ancaman yang bersifat militer dan non militer. Pencegahan atau antisipasi yang dapat dilakukan oleh negara untuk mengatasi ancaman non militer yakni dengan melakukan kerjasama antar negara baik secara bilateral ataupun multilateral.<sup>1</sup>

Di wilayah Asia Tenggara wilayah perairan Selat Malaka seringkali menjadi fokus penjagaan maritim dikarenakan lokasinya menjadi salah satu titik paling penting jalur perdagangan dunia. Sedangkan pada beberapa wilayah lainnya masih terabaikan, salah satunya laut sulu yang wilayahnya beririsan dengan Malaysia, Indonesia dan Filipina yang masih minim mendapatkan penjagaan maritim dari ketiga negara masing masing.<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Kerjasama Antar Negara Tingkatkan Stabilitas Dan Pertahanan Negara.

Sumber : <https://www.uir.ac.id/kerjasama-antar-negara-tingkatkan-stabilitas-dan-pertahanan-negara/>. [ online ] Diakses pada : 23 Februari 2018.

<sup>2</sup> Confronting Threats in the Sulu-Sulawesi Seas: Opportunities and Challenges. Sumber : <https://thediplomat.com/2016/06/confronting-threats-in-the-sulu-sulawesi-seas-opportunities-and-challenges/>. [ online ] Diakses pada : 23 Februari 2018.

*Trilateral Cooperation Agreement* ( TCA ) pada awalnya terbentuk pada Pertemuan Menteri Pertahanan ASEAN ( ADMM ) sebelum dimulainya *Shangri La Dialogue*. Dimana ketiga negara yaitu, Malaysia, Indonesia dan Filipina menyepakati untuk melakukan patroli trilateral.<sup>3</sup> Indonesia, Malaysia dan Filipina merasa perlu untuk melakukan pengamanan terhadap Laut Sulu, hal tersebut dikarenakan Laut Sulu merupakan wilayah yang menjadi lintasan kapal dagang atau kapal kargo. Selain itu banyaknya wisatawan yang melintasi Laut Sulu juga perlu mendapatkan perlindungan dari ancaman kelompok Abu Sayyaf Grup.<sup>4</sup>

Kerjasama TCA ( *Trilateral Cooperation Agreement* ) yang dilakukan oleh negara Malaysia, Filipina dan Indonesia merupakan sebuah upaya untuk mengamankan wilayah Laut Sulu. Kerjasama TCA digagas oleh kementerian pertahanan oleh masing masing negara yaitu Malaysia, Filipina dan Indonesia. TCA ( *Trilateral Cooperation Agreement* ) merupakan langkah penegasan yang dilakukan oleh ketiga negara mengenai pentingnya menjaga wilayah maritim dari ancaman yang sedang terjadi. <sup>5</sup>

<sup>3</sup> The Other Sea That Dominated the 2016 Shangri-La Dialogue. Sumber :

<https://thediplomat.com/2016/06/the-other-sea-that-dominated-asias-security-summit-in-2016/> [online ] Diakses pada : 23 Februari 2018.

<sup>4</sup> Ancaman laut Sulu oleh Abu Sayyaf Grup. Sumber : <https://globalriskinsights.com/2017/10/can-sulu-sea-become-secure-new-initiative/>. [online ] Diakses pada : 24 Februari 2018.

<sup>5</sup> JOINT STATEMENT TRILATERAL MEETING AMONG THE DEFENCE MINISTERS OF THE PHILIPPINES, MALAYSIA AND INDONESIA. Sumber : <http://dnd.gov.ph/PDF%202016/Press%20-%20Trilateral%20Meeting%20among%20the%20Defence%20Ministers%20of%20the%20Philippines,%20Malaysia%20and%20Indonesia.pdf> [online ] Diakses pada : 24 Februari 2018.

Terbentuknya TCA ( *Trilateral Cooperation Agreement* ) merupakan respon keprihatinan atas banyaknya insiden penculikan dan perampokan yang dilakukan oleh kelompok bersenjata di Laut Sulu. Menteri Pertahanan dari Indonesia, Malaysia dan Filipina bersepakat untuk mengimplementasikan pengalaman yang telah dilakukan pada *Malacca Straits Patrols* ( MSP ) sebagai acuan model kerjasama TCA ( *Trilateral Cooperation Agreement* ) dalam mengatasi masalah keamanan maritim bersama yang dilakukan oleh Malaysia, Filipina dan Indonesia.<sup>6</sup>

Salah satu akibat dari adanya ancaman maritim di Laut Sulu yaitu terhambatnya aktivitas ekspor Batu Bara yang dilakukan oleh Indonesia. Hal tersebut merupakan akibat dari aktivitas yang dilakukan oleh kelompok Abu Sayyaf Grup di wilayah Laut Sulu. Sedangkan pada sektor lainnya, perusahaan pelayaran menolak carter kapal kargo untuk keperluan *shipping* yang berada di *port* Polloc. Penolakan ini dikarenakan rute yang dilewati oleh kapal kapal *cargo* dari Maguindanao ke Daerah Otonomi Muslim Mindanao ( ARMM ) merupakan rute yg rawan akan terjadinya pembajakan, penculikan maupun kejahatan maritim yang lainnya.<sup>7</sup>

Dalam TCA ( *Trilateral Cooperation Agreement* ) sendiri pemerintah khususnya Menteri Pertahanan dari Malaysia, Filipina dan Indonesia menyetujui angkatan bersenjata dari masing masing negara untuk melakukan langkah langkah berikut :

<sup>6</sup> Ibid.

<sup>7</sup> Ships now refuse to ply Sulu Sea due to piracy. Sumber : <https://news.mb.com.ph/2017/03/01/ships-now-refuse-to-ply-sulu-sea-due-to-piracy/>. [ online ]

Diakses pada : 24 Februari 2018.

- a. Aktivitas terkoordinir dari militer Malaysia, Filipina dan Indonesia dan terfokus pada keamanan maritim.
- b. Adanya kemungkinan untuk mendirikan pos gabungan militer yang menjadi fokus bersama.
- c. Adanya patroli atau pemantauan maritim dan udara di wilayah maritim yang menjadi fokus bersama.
- d. Pengaturan arah patroli dan koordinasi yang dilakukan oleh masing masing militer dari tiga negara.
- e. Menetapkan koridor transit bagi para pelaut yang menjadi fokus bersama.
- f. Pembagian informasi dan intelijen yang berkaitan dengan wilayah maritim yang menjadi fokus bersama.
- g. Membagi mekanisme data basis trilateral.<sup>8</sup>

Pertemuan berikutnya dilaksanakan di Tarakan pada tanggal 19 juni 2017 sesuai dengan kebutuhan koordinasi dari 3 negara tersebut. Pada tahun tersebut baik

Indonesia, Malaysia maupun Filipina berupaya untuk terus meningkatkan kerjasama keamanan maritim khususnya di wilayah Laut Sulu. Menteri pertahanan dari Malaysia yaitu Dato' Sri Hishamuddin dan Menteri pertahanan Republik Indonesia Ryamizard Ryacudu juga Delvin Lorenzana selaku Menteri Pertahanan dari Filipina.

Ketiga negara membahas upaya untuk menghadapi tantangan keamanan maritim

<sup>8</sup> Loc.cit. PIRACY AND ARMED ROBBERY AGAINST SHIPS IN ASIA.

terlebih wilayah perairan yang berbatasan langsung dengan negara masing masing, yaitu Malaysia, Indonesia dan Filipina.<sup>9</sup>

Setelah TCA, TMP (*Trilateral Maritime Patrol*) yang merupakan tindak lanjut dari kesepakatan sebelumnya untuk menjaga kawasan Laut Sulu yang menjadi *focal point* bersama dari ancaman keamanan maritim yang disebabkan oleh perompak atau pelaku bajak laut. Dimana mereka merupakan ancaman nyata yang sifatnya non tradisional. Adapun contoh lain dari kejahatan non tradisional seperti penculikan, terorisme dan kejahatan lintas negara merupakan kejahatan yang sering terjadi di wilayah perairan salah satunya Laut Sulu.<sup>10</sup>

Langkah berikut yang dilakukan yaitu peresmian MCC (*Maritime Command Center*) untuk menindaklanjuti kerjasama TCA. MCC (*Maritime Command Center*) yang dibangun di Tarakan (Indonesia), Tawao (Malaysia) dan Bongao (Filipina). Adapun fungsi dari dibangunnya MCC di masing masing daerah di setiap negara yakni untuk memudahkan kapal yang sedang berlayar memberikan informasi pada MCC terdekat apabila terjadi ancaman pada saat kapal berlayar maupun kapal bersandar. Sedangkan mereka berada di wilayah Laut Sulu.<sup>11</sup>

<sup>9</sup> Trilateral Maritime Patrol Indomalphi Resmi Dimulai. Sumber :

<https://www.kemhan.go.id/2017/06/19/trilateral-maritime-patrol-indomalphi-resmi-dimulai.html>  
[online] Diakses pada : 24 Februari 2018.

<sup>10</sup> Ibid.

<sup>11</sup> Peresmian MCC (*Maritime Command Center*) Sumber : <https://jakartagreater.com/maritime-command-center-tarakan-amankan-perairan-sulu/>. [online] Diakses pada : 25 Februari 2018.

Mekanisme kerja yang dilakukan oleh MCC di masing masing wilayah yang telah disepakati. Pemantauan yang dilakukan sesuai dengan langkah langkah yang telah disepakati oleh ketiga negara yaitu pemantauan melalui wilayah perairan dan udara. Dan pelalporan di titik MCC terdekat. Hal ini dilakukan untuk mempercepat pengambilan tindakan apabila kapal yang melintas mengalami ancaman<sup>12</sup> MCC yang dilakukan oleh tiga negara Malaysia, Indonesia dan Filipina merupakan tindakan teknis yang pada umumnya dilakukan di wilayah perairan atau maritim. Fungsi dari adanya MCC ( *Maritime Command Center* ) yaitu agar para pejabat atau pembuat kebijakan dapat memutuskan dengan cepat tindakan yang harus dilakukan apabila terjadi ancaman khususnya di Laut Sulu. Informasi yang tepat, alat dan perencanaan serta dukungan operasional menjadi dukungan mendasar pada untuk membuat keputusan yang rumit adanya MCC ( *Maritime Command Center* ) yaitu sebagai *sharing center* bagi militer Indonesia, Malaysia dan Filipina.<sup>13</sup>

Di MCC ( *Maritime Command Center* ) yang berada di Tarakan ( Indonesia ), Tawao ( Malaysia ) maupun Bongao ( Filipina ) secara teknis memiliki beberapa tugas. Pada pusat komando maritim beberapa tugas yang dilakukan yaitu merencanakan, memantau dan menegaskan kembali patroli atau operasi yang dilakukan di pusat komando maritim itu sendiri. Berikutnya pada komando lepas tugasnya yaitu memberikan informasi dukungan yang dibutuhkan MCC pada basis

<sup>12</sup> Ibid.

<sup>13</sup> Mekanisme kerja *Information Command And Control*. Sumber : <https://www.systematicinc.com/products/a/command-and-control-information-systems/maritime-command-and-control/> [online] Diakses pada : 27 Februari 2018.

masing masing.<sup>14</sup> Selain itu, hal lainnya yang dilakukan pusat komando maritim yaitu melacak atau memantau operasi maritim yang sedang dilaksanakan baik dari daratan, perairan maupun udara dan melakukan korelasi lokasi. Tim patroli yang bertugas memantau peta tertentu untuk dimonitoring kemudian melakukan pemeriksaan anomali dilakukan untuk mendeteksi aktivitas ilegal di wilayah perairan yang menjadi *focal point* sehingga tim patroli dapat mengambil tindakan yang diperlukan untuk mengetahui adanya kapal yang dicurigai melintasi titik *focal point*.

<sup>15</sup>

Kerjasama *Trilateral Cooperation Agreement* ( TCA ) selama tahun 2016 – 2017 menunjukkan penurunan ancaman yang signifikan di wilayah Laut Sulu, pada tahun 2016 jumlah kejahatan pada kategori atau CAT atau Kategori 1 dengan spesifikasi paling berbahaya dan beresiko yang berjumlah 6 insiden turun menjadi 2 insiden pada tahun 2017. Turunnya jumlah insiden di Laut Sulu pada tahun 2017 menandakan bahwa kerjasama keamanan yang dilakukan oleh Malaysia, Filipina dan Indonesia berhasil dilaksanakan meskipun jumlah insiden pada CAT atau kategori 3 dimana kategori kejahatan ini memiliki tingkat kejahatan yang lebih rendah risikonya dibanding CAT 1 malah meningkat.

<sup>14</sup> Ibid.

<sup>15</sup> Ibid

**GAMBAR 1.1.1 Tabel Kejahatan Maritim 2013 – 2017 berdasarkan CAT**

	2013	2014	2015	2016	2017
● CAT 1	0	0	0	6	2
● CAT 2	0	1	1	1	1
● CAT 3	1	0	0	0	3
● CAT 4	4	4	6	2	15
▲ Attempted	0	0	1	6	1
<b>Total</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>8</b>	<b>15</b>	<b>22</b>

Sumber : *ReCAAP Annual Report 2017*

## 1.2 Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang dan urgensi yang penulis paparkan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “ Bagaimana proses kerjasama pengamanan wilayah Laut Sulu melalui kerjasama *Trilateral Cooperation Agreement* ( TCA ) pada tahun 2016 – 2017 ? ”

## 1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisa apa saja tindakan yang dilakukan oleh Malaysia, Filipina dan Indonesia pada kerjasama *Trilateral Cooperation Agreement* ( TCA ) untuk mengamankan wilayah Laut Sulu.

2. Untuk mengetahui dan menganalisa sejauh mana tindakan Malaysia, Filipina dan Indonesia pada kerjasama *Trilateral Cooperation Agreement* ( TCA ) dalam mengamankan wilayah Laut Sulu.

#### 1.4 Manfaat Penelitian

1. Memberikan informasi kepada pembaca mengenai apa saja mekanisme yang dilakukan oleh Malaysia, Filipina dan Indonesia pada kerjasama *Trilateral Cooperation Agreement* ( TCA ) dalam upaya pengamanan Laut Sulu.
2. Memberikan informasi kepada pembaca mengenai hal yang mendorong Malaysia, Filipina dan Indonesia pada kerjasama *Trilateral Cooperation Agreement* ( TCA ) dalam upaya pengamanan perairan Sulu
3. Memberikan informasi kepada pembaca mengenai faktor, hambatan dan langkah yang diambil oleh Malaysia, Filipina dan Indonesia pada kerjasama *Trilateral Cooperation Agreement* ( TCA ) dalam menghadapi di wilayah perairan Sulu.

## Bab II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Studi Terdahulu

##### 2.1.1 *Enhancing Trilateral Security Cooperation in the Western Pacific.*

###### Oleh Gary Waters.

Dalam paper yang ditulis oleh Gary waters terfokus pada bagaimana upaya negara negara yang ada wilayah pasifik barat untuk mengamankan wilayah maritim atau perairan masing masing. Adapun negara negara yang berinisiasi antara lain Jepang, Amerika Serikat dan Australia. Upaya yang dilakukan pertama kali yaitu membuat sebuah forum dialog yang disebut dengan *Trilateral Strategic Dialogue* dimana dialog ini membahas hal hal yang menjadi fokus bersama kerjasama trilateral antara Jepang, Amerika Serikat dan Australia.<sup>16</sup>

Setiap negara baik Jepang, Amerika Serikat ataupun Australia memiliki kepentingan dan peran masing masing dalam kerjasama tersebut.

Terdapat tiga pokok tujuan bersama yaitu mengatasi masalah terorisme, pemulihan pasca terjadi bencana dan melakukan sinergi dibidang ekonomi.

Selain itu dalam dialog ini ketiga negara tersebut membahas mitra mitra

---

<sup>16</sup> Waters, Gary. *Enhancing Trilateral Security Cooperation in the Western Pacific*. Sumber : <https://www.jstor.org/stable/pdf/26460215.pdf?refreqid=excelsior%3A1aac441314a8f425b57641a058358259> [ online ]  
Diakses pada : 5 April 2018.

negara lain yang memiliki potensi untuk bekerja sama dengan tiga negara tersebut.<sup>17</sup>

Secara umum, tujuan adanya kerjasama trilateral oleh Jepang, Amerika Serikat dan Australia yaitu agar tiga negara tersebut dapat berkolaborasi untuk mewujudkan pembangunan internasional dan memperkuat peranan organisasi non pemerintah ( NGO ) yang ada di masing masing negara, baik di Jepang, Amerika Serikat dan Jepang. Fungsi lain dari adanya kerjasama trilateral antara Jepang, Amerika Serikat dan Australia yaitu menentukan peranan mitra lainnya dalam kerjasama yang dibuat.

Jepang, Amerika Serikat dan Australia yang merupakan anggota dari TSD ( *Trilateral Strategic Dialogue* ) menganggap kerjasama ini merupakan momentum yang penting untuk menyatukan kepentingan keamanan guna meningkatkan pencapaian ekonomi. Keamanan *cyber* juga merupakan hal yang perlu diperhatikan, hal tersebut dikarenakan keamanan *cyber* merupakan kunci informasi dari setiap negara dan rawan untuk disalahgunakan oleh pihak pihak eksternal yang tidak bertanggung jawab seperti peretas jaringan atau pelaku tindak terorisme.<sup>18</sup>

Berikutnya terdapat beberapa komitmen negara anggota TSD yang harus diikuti oleh seluruh anggota yaitu pelarangan menggunakan senjata anti

<sup>17</sup> Ibid.

<sup>18</sup> Ibid.

satelit dan mengembangkan kesadaran institutional untuk mencegah atau mengurangi intrusi jaringan dunia maya. Selain itu ketiga negara yaitu Jepang, Amerika Serikat dan Australia menetapkan peranan China dalam kerjasama trilateral TSD.<sup>19</sup> Selain itu ada peranan oleh setiap negara yang harus dilakukan dalam TSD, hal ini pada dasarnya akan kembali kepada urusan domestik dalam negeri negara masing masing.<sup>20</sup>

Setiap negara yang menjadi anggota TSD memiliki kontribusi untuk mengembangkan kerjasama sesuai dengan kebutuhan negara masing masing.

Australia dalam *Trilateral Strategic Dialogue* berkontribusi untuk menguji efektivitas dan utilitasnya dalam *Trilateral Strategic Dialogue*, membangun keterlibatan anggota, memastikan kekuatan ekonomi melalui opsi opsi ekonomi yang membangun bagi anggota lainnya, dan meningkatkan kemampuan intelegen guna mendapatkan informasi yang dibutuhkan.<sup>21</sup>

Sedangkan kontribusi Jepang pada *Trilateral Strategic Dialogue* yaitu memperbarui kemampuan pertahanan dan menunjukkan kapasitas untuk melakukan pencegahan konflik dan peningkatan keamanan bersama, menunjukkan kemampuan dan peningkatan di bidang pertahanan secara signifikan bagi mitra dalam *Trilateral Strategic Dialogue* dan penguatan

---

<sup>19</sup> Ibid.

<sup>20</sup> Ibid

<sup>21</sup> Ibid.

sektor ekonomi juga pembahasan wilayah sengketa dan konflik polusi dari lokasi sumber daya.<sup>22</sup>

Amerika Serikat sendiri memiliki kontribusi pada *Trilateral Strategic*

*Dialogue* berupa strategi khusus untuk asia yang meliputi tiga elemen utama

yaitu sekutu, institusi dan pertemanan. Amerika Serikat pada pemerintahan

Obama memiliki keinginan untuk memperkuat aliansi militer bilateral AS

yang berada di Asia. Yang kedua yaitu adanya keinginan untuk banyak

terlibat dengan dengan regionalisme Asia dengan membawa invasi

kelembagaan serta memupuk persahabatan baru terutama dengan Indonesia

dan India.<sup>23</sup>

Amerika Serikat dianggap sebagai kunci atas adanya kerjasama

trilateral. Hal ini dikarenakan Amerika Serikat memiliki banyak agenda di

wilayah Asia. Selain itu Amerika Serikat dianggap sebagai kunci politik bagi

Jepang untuk meningkatkan kapasitas militernya dikarenakan adanya Amerika

Serikat dianggap sebagai jaminan peningkatan kapasitas militer bagi Jepang.

Persamaan studi terdahulu dengan fokus penelitian penulis yaitu

bagaimana upaya pengamanan maritim yang dilakukan oleh tiga negara.

Penulis fokus pada Malaysia, Filipina dan Indonesia dimana penulis studi

terdahulu juga melakukan penelitian dimana Amerika Serikat, Jepang dan

<sup>22</sup> Ibid.

<sup>23</sup> Ibid.

Australia sebagai negara anggotanya. Berikutnya yaitu berada pada fokus kerja sama untuk keamanan yang bersifat non tradisional, TSD melakukan kerjasama untuk melakukan pengamanan yang sifatnya non tradisional yaitu pemulihan pasca bencana, perlawanan terhadap terorisme sedangkan Malaysia, Filipina dan Indonesia lebih terfokus pada upaya pengamanan wilayah maritim dari ancaman aktor non negara.

Perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh penulis studi terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu negara negara anggota *Trilateral Strategic Dialogue* merupakan negara sekutu militer Amerika Serikat dan memiliki kepentingan masing masing di kawasan Asia. Sedangkan Malaysia, Filipina dan Indonesia hanya terfokus untuk mengamankan wilayah Laut Sulu dari ancaman ancaman yang ada dengan menggunakan kerangka kerjasama Malsindo yang dilakukan terlebih dahulu untuk mengamankan Selat Malaka. Berikutnya yang menjadi perbedaan adalah kedekatan geografis dimana Jepang, Australia dan Amerika Serikat merupakan negara yang tidak berada pada satu regional sedangkan Malaysia, Filipina dan Indonesia berada di kawasan Asia Tenggara.

Kontribusi studi terdahulu bagi penulis yaitu melihat bagaimana pola kerjasama yang dilakukan oleh Jepang, Amerika Serikat dan Australia yang memulai kerjasama dari *Trilateral Strategic Dialogue*. Dimana dalam dialog ini pemerintah Australia, Jepang dan Amerika Serikat melakukan kolaborasi

untuk memaksimalkan fungsi NGO ( *Non Government Organization* ) dari masing masing negara dan peran masing masing yang telah disepakati untuk mencapai tujuan dari strategi yang dicanangkan.

### **2.1.2 *Growing Prospects for Maritime Security Cooperation in Southeast Asia.* Oleh Lieutenant John F Bradford**

Tulisan Bradford terfokus pada pembahasan isu keamanan maritim di wilayah Asia Tenggara. Isu yang dibahas oleh Bradford yakni adanya berbagai ancaman yang mengintai di wilayah Asia Tenggara dan upaya negara negara Asia Tenggara dalam mengatasi ancaman di wilayah Selat Malaka melalui kerjasama antar negara. Bradford menjelaskan bahwa isu keamanan maritim merupakan isu yang muncul pada pasca kejadian 9 / 11. Pasca kejadian 9 / 11 terdapat pergeseran *trend* pada isu keamanan beserta aktor yang terlibat di dalamnya. Dalam pergeseran isu keamanan beserta aktor yang terlibat didalamnya lebih spesifik lagi terjadi pada isu keamanan maritim dimana aktor tidak lagi berasal dari negara.

Isu yang dibahas tidak terbatas pada perang dan damai. Pasca perang dingin negara negara di dunia mengalami kemajuan secara global, salah satu indikatornya adalah semakin matangnya identitas regional. Matangnya identitas regional yang membuat negara negara di Asia Tenggara dengan cepat menanggapi bahwasanya isu ancaman pada keamanan maritim merupakan hal yang harus segera diatasi.

Dalam isu keamanan maritim terdapat dua pendekatan berbeda yakni pendekatan tradisional dan pendekatan non tradisional. Pendekatan tradisional memiliki kecenderungan pada isu antar negara seperti keterlibatan angkatan laut antar negara dan persengketaan batas teritori atau ancaman tradisional lainnya yang cakupannya lebih luas. Sedangkan untuk pendekatan non tradisional isu keamanan maritim lebih terfokus pada manajemen sumber daya laut, perubahan pola perdagangan melalui perairan, kejahatan transnasional, dan pencemaran lingkungan. Isu tersebut dijadikan perhatian oleh negara negara Asia tenggara karena tidak mungkin diatasi oleh satu negara saja dikarenakan wilayah perairan atau maritim seringkali memiliki garis batas yang bersinggungan dengan batas perairan wilayah atau negara yang lainnya.

Tahun 1992 merupakan awal munculnya forum komunikasi maritime pertama di Asia Tenggara atau yang biasa disebut dengan Deklarasi Manila, dalam forum ini negara anggota menekankan pentingnya untuk menyelesaikan masalah kedaulatan dan isu yurisdiksi mengenai batas negara yang bersinggungan dengan wilayah Laut China Selatan. Hingga beberapa tahun berikutnya, isu keamanan maritim tetap menjadi topik bahasan.

Munculnya kerjasama bilateral di wilayah Asia Tenggara yang mengangakat isu isu non tradisional semakin banyak dan terus bermunculan khususnya di wilayah Asia Tenggara.

Tindak kejahatan pada lingkungan maritim merupakan hal yang diperhatikan oleh negara-negara yang berada di wilayah Asia Tenggara.

Terdapat beberapa hal kontemporer yang dianggap sebagai ancaman di Asia Tenggara yakni adanya persengketaan wilayah atau garis batas teritori antar negara, tindakan terorisme dan adanya kekacauan di wilayah Selat Malaka mendorong negara-negara yang berada di Asia Tenggara untuk melakukan kerjasama, penyebab kekacauan disebabkan pada banyak bermunculannya kelompok pemberontak, teroris dan kelompok separatis yang beroperasi di wilayah perairan Asia Tenggara.

Setelah tindak terorisme dan kekacauan, aktivitas pelaku kejahatan transnasional juga menjadi ancaman bagi negara-negara yang berada di Asia Tenggara. Dikarenakan kelompok tersebut mampu melakukan perpindahan senjata atau personil, perdagangan secara ilegal untuk mendapatkan dana operasional dan memfasilitasi gerilyawan atau teroris. Faktor berikutnya yaitu adanya kerusakan yang terjadi pada lingkungan maritim. Hal ini terkait dengan adanya kerusakan pada lokasi penangkapan ikan juga adanya pencemaran lautan yang menyebabkan Thailand dan Myanmar bersitegang.

Selain dari adanya ancaman di wilayah Asia Tenggara, terdapat beberapa faktor dimana kemungkinan kerjasama dapat dilakukan beberapa hal yang memungkinkan negara Asia Tenggara melakukan kerjasama antara lain untuk mengurangi sensitivitas terhadap kedaulatan negara, dimana selama ini

negara anggota sering beranggapan kerjasama antar negara dapat mengurangi kedaulatan negara. Berikutnya yaitu adanya kepentingan negara yang berada di luar wilayah Asia Tenggara yang beriringan dengan inovasi pada setiap kerjasama yang dilakukan. Berikutnya yaitu meratanya norma bersama yang diimplementasi oleh anggota negara yang tergabung pada suatu kerjasama, meningkatnya kemampuan dan sumberdaya negara secara militer maupun perekonomian dan meningkatnya prioritas keamanan maritim oleh negara-negara di Asia Tenggara.

Dalam melaksanakan kerjasama terdapat beberapa transisi yang akan dialami oleh negara di wilayah Asia Tenggara yakni secara global, regional maupun bilateral. Transisi mungkin tidak terjadi pada seluruh faktor atau elemen namun terdapat beberapa hal yang akan berubah secara spesifik baik isu yang diangkat maupun kapabilitas negara pada forum forum tertentu.

Persamaan antara studi terdahulu pertama dengan penelitian penulis yakni topik pembahasan mengenai ancaman kejahatan maritim yang terjadi di wilayah Asia Tenggara dimana keamanan maritim menjadi *concern* pada periode berakhirnya perang dingin dan banyak terjadi pada pasca 9 / 11.

Selain itu jenis ancaman yaitu kejahatan maritim transnasional, terorisme dan kekacauan, dan rusaknya lingkungan menjadi persamaan penelitian penulis dengan peneliti studi terdahulu.

Perbedaan antara studi terdahulu dengan penelitian penulis terletak pada upaya yang dilakukan untuk mengatasi kekacauan maritim. Penulis studi terdahulu terfokus pada kerjasama negara Asia Tenggara sebagai upaya penanganan kejahatan maritim dan kasus maritim lainnya sedangkan penulis terfokus pada bagaimana upaya Filipina, salah satunya melalui kebijakan pemerintah dalam menangani kejahatan maritim.

Dalam studi terdahulu penulis membahas upaya penanggulangan kejahatan maritim melalui kerjasama dengan pihak eksternal dimana lokasi terjadinya kejahatan maritim tidak termasuk wilayah teritorial sebagian negara anggota dan bukan keseluruhannya. Sedangkan penelitian ini meneliti bagaimana upaya negara dalam menanggulangi kejahatan maritim di wilayah teritorialnya sendiri.<sup>24</sup>

## 2.2 Definisi Konseptual

### 2.2.1. Konsep *Cooperative Security* Michael Moodie

Pasca perang dingin terjadi beberapa pergeseran trend kejahatan dan pelaku tindak kriminal. Ancaman tidak terbatas pada perang antar negara atau persaingan peningkatan kapasitas militer antar negara khususnya dalam satu lingkup wilayah regional. Pada periode pasca perang dingin jumlah aktor

<sup>24</sup> Bradford, Lieutenant. The Growing Prospects for Maritime Security Cooperation in Southeast Asia. Sumber : <http://www.dtic.mil/dtic/tr/fulltext/u2/a522808.pdf>. Diakses pada : 4 Mei 2018

mulai bertambah yaitu dengan munculnya aktor *non state*. Aktor *non state* memiliki kontribusi pada dunia internasional baik secara positif melalui kontribusi NGO atau LSM internasional dalam membantu negara dalam merumuskan strategi dan kebijakan maupun secara negative melalui penciptaan teror dan ancaman yang mengganggu lingkungan internasional.<sup>25</sup>

Michael Moodie mendefinisikan *Cooperative Security* sebagai suatu proses dimana negara dengan kepentingan yang sama bergabung dan bekerjasama melalui mekanisme yang telah disepakati untuk mengurangi atau menurunkan ketegangan dan rasa curiga, memecahkan atau meredakan perselisihan, membangun kepercayaan meningkatkan prospek perkembangan ekonomi dan menjaga stabilitas di wilayah regional masing masing.<sup>26</sup>

*Cooperative Security* yang dijelaskan oleh Michael Moodie layak untuk dijadikan konsep karena beberapa alasan, antara lain : Pertama, beberapa masalah yang terjadi pada periode pasca perang dingin yaitu adanya perbedaan antara kasus keamanan tradisional dan non tradisional. Kasus tradisional yang dialami negara juga menjadi lebih kompleks saat negara tersebut tidak bisa mengamankan kepentingannya sendiri. Kedua, gagalnya *Competitive Security* menjadi penjamin kesuksesan. Hal ini dikarenakan

beberapa negara yang menganggap cara cara tradisional untuk menjaga

<sup>25</sup> Moodie, Michael. *Cooperative Security: Implications for National Security and International Relations*. Sumber : [https://www.sandia.gov/cooperative-monitoring-center/\\_assets/documents/sand98-050514.pdf](https://www.sandia.gov/cooperative-monitoring-center/_assets/documents/sand98-050514.pdf) [ online ] diakses pada : 8 Oktober 2018

<sup>26</sup> Ibid. Moodie, Michael.

keamanan melalui pembangunan kekuatan militer dan mendominasi wilayah regional berpotensi untuk membuat kondisi keamanan regional semakin meruncing dan berpotensi untuk memicu konflik. Terakhir, *Cooperative Security* menganggap pentingnya negara untuk menjaga lingkungan politik internalnya agar tetap stabil serta kemampuan negara untuk tetap terhubung dengan mampu menyediakan kebutuhan warga negaranya.<sup>27</sup>

*Cooperative Security* menjadi salah satu diantara banyaknya konsep yang muncul pada periode pasca perang dingin. Hal ini dikarenakan *Cooperative Security* merupakan respon ketika terjadi pergantian trend dalam keamanan internasional.<sup>28</sup> Dalam konsep *Cooperative Security* terdapat tiga bahasan yang kemudian akan penulis jabarkan masing masing berikut dengan variabel *Exploiting Changes*, *Overcoming Impediment* dan *Respond to Challenge*.<sup>29</sup>

### 2.2.1.1 *Exploiting Changes*

Variabel yang pertama menjelaskan faktor apa saja yang dapat mendorong negara untuk melakukan kerjasama keamanan. Variabel *Exploiting Changes* memiliki tiga sub variabel yaitu *Conceptual Challenges*,

<sup>27</sup> Moodie, Michael. *Cooperative Security: Implications for National Security and International Relations*

<sup>28</sup> Ibid. Moodie, Michael. Page : 6

<sup>29</sup> Ibid. Moodie, Michael. Page : 6

*Primacy of Economy*, dan *Domestic Politics & Foreign Policy*. Tiga sub variabel akan menjadi faktor pendorong negara dalam berproses membentuk kerjasama keamanan untuk mengamankan suatu wilayah yang bersinggungan dengan wilayah teritorinya.

#### 2.2.1.1.1 *Conceptual Challenges*

Sub variabel ini menjelaskan pemetaan masalah keamanan yang terjadi pada negara yang melakukan kerjasama keamanan sedangkan penyebab masalah keamanan bukan berasal dari aktor tradisional atau *state actor*. Definisi dari *Conceptual Challenges* sendiri yaitu proses bagaimana negara melakukan pemetaan mengenai adanya tren ancaman keamanan yang bergeser serta proyeksi dampak yang ditimbulkan adanya dari tren kejahatan yang tersebut. Di sisi lain isu non keamanan seperti Ekonomi, Keamanan dan Demografi juga turut menjadi masalah yang di sekuritisasi mengingat hal tersebut akan berdampak pada masyarakat sipil sehingga rentan menjadi korban ancaman isu isu sekuritisasi.<sup>30</sup>

#### 2.2.1.1.2 *Primacy of Economy*

Definisi dari sub variabel *Primacy of Economy* sendiri yaitu penggunaan ekonomi sebagai instrument utama untuk menentukan upaya yang perlu dilakukan negara dalam mencegah ancaman negara yang

<sup>30</sup> Ibid. Moodie, Michael. Page : 6

disebabkan oleh faktor ekonomi dan keuangan. Negara yang melakukan kerjasama keamanan seharusnya memperhatikan kekuatan ekonomi negara yang melakukan kerjasama keamanan. Hal tersebut dikarenakan perkembangan ekonomi akan mempengaruhi proses berjalannya kerjasama dan kapasitas militer suatu negara. Kemampuan ekonomi diperlukan untuk menghindari memburuknya kondisi negara akibat adanya kerjasama keamanan. Selain peningkatan di sektor ekonomi, ketersediaan forum internasional maupun regional juga penting, untuk membahas perkembangan ekonomi dan dampaknya pada perkembangan militer dan keamanan bersama.

31

#### 2.2.1.1.3 *Domestic Politics & Foreign Policy*

Sub variabel ini menjelaskan proses kerjasama keamanan pada tahap penyesuaian kebijakan luar negeri oleh negara yang melakukan kerjasama keamanan dan memiliki keterkaitan satu sama lain. Kepentingan politik domestik membentuk kebijakan luar negeri suatu negara beserta aktor aktor yang terlibat didalamnya.<sup>32</sup> Kebijakan luar negeri mendorong negara untuk melakukan kerjasama keamanan dengan negara lainnya yang sesuai dengan kebijakan luar negerinya. Dalam tahapan proses ini, Keterlibatan aktor *non state* misalnya NGO juga diperlukan untuk membantu negara atau pemerintah

<sup>31</sup> Ibid. Moodie, Michael. Page : 7

<sup>32</sup> Ibid. Moodie, Michael. Page : 7

yang melakukan kerjasama keamanan dalam membuat kebijakan kebijakan strategis yang bersifat koheren.<sup>33</sup>

### 2.2.1.2 *Overcoming Impediment*

Variabel *Overcoming Impediment* menjelaskan proses negara yang bekerjasama dalam mengatasi hambatan atau rintangan yang muncul.

Terdapat tiga hal yang menjadi rintangan penyebab negara melakukan kerjasama keamanan dengan negara lainnya. Hal tersebut menjadi indikator bahwasanya negara sedang berada dalam proses *Overcoming Impediment* dimana negara yang melakukan kerjasama keamanan berupaya untuk mengatasi beberapa hambatan sehingga menyebabkan kerjasama berjalan tidak optimal. Variabel *Overcoming Impediment* memiliki tiga sub variabel turunan yang menjelaskan apa saja upaya yang dilakukan untuk mengatasi penghambat kerjasama keamanan yang terdiri dari *state fragility and challenges to internal stability, conflicting perceptions* dan *strategic assyimetric*.<sup>34</sup>

#### 2.2.1.2.1 *State fragility and challenges to internal stability*

Definisi dari sub variabel ini menjelaskan proses bagaimana negara menghadapi situasi pasca perang dingin yang memiliki kerentanan dan ancaman yang disebabkan oleh aktor *non state* dan faktor hambatan dari

<sup>33</sup> Ibid. Moodie, Michael. Page : 7

<sup>34</sup> Ibid. Moodie, Michael. Page : 10

internal negara. Sub variabel ini juga menjelaskan bahwa negara dianggap rentan apabila tidak mampu untuk melindungi warga negaranya dari berbagai ancaman, baik ancaman dari aktor transnasional maupun aktor internal, terdapat konflik antar etnis yang menyebabkan perpecahan dalam satu negara dan keterbelakangan infrastruktur akibat tidak meratanya pembangunan. Hal hal yang telah disebutkan berakibat pada hilangnya legitimasi negara dan berpotensi memicu munculnya ancaman internal karena masyarakat atau warga negara kehilangan kepercayaan pada negara yang seharusnya menjamin dan memberikan perlindungan.<sup>35</sup>

#### 2.2.1.2.2 *Conflicting Perceptions*

Sub variabel *Conflicting Perceptions* menjelaskan bagaimana proses aktor sebagai pembuat kebijakan melakukan identifikasi terhadap masalah keamanan bersama yang sedang terjadi pada wilayah regionalnya, membangun kekuatan bersama untuk mencegah atau menghalangi munculnya pemberontak atau kekacauan yang terjadi di wilayah regional mereka dan memberikan pemahaman mengenai *arm control* dalam kerjasama keamanan.

Sub variabel ini berasal dari perbedaan pendapat dan pandangan antara aktor dengan mitra negara lainnya yang kemudian terbagi menjadi tiga set. Set pertama yaitu sifat ancaman dimana ancaman tidak berasal dari ancaman keamanan tradisional saja melainkan juga meliputi isu yang disekuritisasi. Set

<sup>35</sup> Ibid. Moodie, Michael. Page : 10

kedua tentang persepsi aktor utama mengenai penggunaan kekuatan, dalam proses ini negara akan meminimalisir terjadinya konflik yang timbul setelah perang konvensional dan membangun komunitas internasional dan regional melalui kerjasama. Pada set ketiga mengenai persepsi aktor terhadap pengendalian senjata atau *arms control*. Pengendalian senjata tidak semata-mata membatasi jumlah inventarisir senjata namun lebih menekankan pada kesediaan negara sebagai pelaku kerjasama untuk merubah kebiasaan tradisional yaitu meningkatkan persenjataan kepada kerjasama keamanan<sup>36</sup>

#### 2.2.1.2.3 *Strategic Assymetric*

Definisi *Strategic Assymetric* yaitu proses kerjasama yang dilakukan oleh negara anggota kerjasama dengan kondisi asimetris. Kondisi *strategic assymetric* sebenarnya berpotensi membentuk negara menjadi lawan. Namun, potensi kerjasama bisa dilihat apabila negara memiliki inventarisir persenjataan yang cukup besar atau sistem pertahanan yang sifatnya khusus.

Adanya *Strategic Assymetric* antar aktor kunci menyebabkan tujuan kerjasama keamanan menjadi sulit untuk dicapai. *Strategic Assymetric* merupakan kondisi negara pelaku kerjasama keamanan yang sangat sukar untuk diubah. meliputi tiga hal yaitu Geografi, Topografi, dan Demografi.<sup>37</sup>

Faktor *Geography* meliputi pengaruh negara tetangga dengan aktor kunci, adanya keterkaitan satu sama lain seperti sejarah atau sumber daya. Faktor

<sup>36</sup> Ibid. Moodie, Michael. Page : 11

<sup>37</sup> Ibid. Moodie, Michael. Page : 13

*Topography* yaitu letak negara atau mitra yang melakukan kerjasama keamanan apakah dipengaruhi oleh negara tetangganya atau musuh potensialnya negara mitra lainnya. Berikutnya adalah faktor *Demography* yang berkaitan dengan jumlah atau ukuran populasi. Faktor demografi dianggap memiliki pengaruh pada bentuk dan struktur militer suatu negara.<sup>38</sup>

### 2.2.1.3 Respond to Challenges

Konsep *Cooperative Security* menjadikan negara yang akan melakukan kerjasama melakukan perubahan sebagai respon dari beragamnya ancaman. Definisi dari variabel *Respond to Challenges* yaitu proses negara merespon tantangan keamanan dengan melakukan perubahan pola kerjasama dari aktivitas yang dilakukan telah dikerjakan oleh negara di masa lampau. Terdapat dua respon dalam merespon tantangan yaitu *Change in Perspective* dan *Change in Operation* dan keduanya memiliki cara kerja yang berbeda.<sup>39</sup>

#### 2.2.1.3.1 Change in Perspective

Definisi Sub variabel ini menjelaskan proses dimana negara yang melakukan kerjasama keamanan perlu merubah cara pandang terhadap ancaman, kasus kejahatan non tradisional dimana kasus ini tidak bisa diselesaikan dengan pendekatan tradisional karena sifat penyelesaian kasus kejahatan tradisional hanya bersifat *short term* dan tidak bertujuan pada

<sup>38</sup> Ibid. Moodie, Michael. Page : 13

<sup>39</sup> Ibid. Moodie, Michael. Page : 13

perbaikan performa ekonomi. Penyelesaian konflik transnasional dapat dilakukan melalui pembinaan hubungan regional dengan membentuk forum komunikasi untuk menciptakan kepercayaan antar anggota kerjasama keamanan. Kemudian peningkatan teknologi juga perlu dilakukan meskipun negara harus mengeluarkan banyak anggaran namun hal ini membantu negara untuk membuat kebijakan yang proporsional.<sup>40</sup>

#### 2.2.1.3.2 *Change in Operation*

Sub variabel ini menjelaskan negara yang melakukan kerjasama memiliki upaya untuk menciptakan peluang yang lebih luas. Definisi *Change in Operation* yaitu bagaimana proses negara sebagai pelaku kerjasama keamanan memiliki perilaku untuk melakukan perubahan yang bersifat operasional dalam melihat pola kerjasama dan melihat tren keamanan dan ancaman. Dalam sub variabel *Change in Operation* terdapat beberapa perubahan cara dalam mengatasi masalah keamanan Yaitu *Establishing Norms, Interim Steps, Importance of Transparency, dan Importance of Capacity Building*.<sup>41</sup>

#### 1. *Establishing Norms*

*Establishing Norms* menjelaskan bahwa menciptakan norma yang kuat memiliki pengaruh pada pencerminan kerjasama.

<sup>40</sup> Ibid. Moodie, Michael. Page : 16

<sup>41</sup> Ibid. Moodie, Michael. Page : 16

Penciptaan norma berfungsi untuk memastikan efektivitas kerjasama, membantu rezim agar dapat memastikan tindakan yang perlu dilakukan apabila terjadi ketidakpatuhan pada sesama anggotanya yang berakibat pada melemahnya kerjasama.<sup>42</sup>

### 2. *Interims Steps*

*Interims Steps* menjelaskan bahwa dalam proses melakukan kerjasama keamanan, pengambilan langkah sementara dilakukan melalui pembutan forum dan dialog untuk bertukar informasi sebagai dasar kerjasama keamanan. Hal tersebut diperlukan untuk mengurangi kecurigaan antar anggota kerjasama keamanan dan mengidentifikasi aktivitas militer yang beraktivitas tidak wajar.<sup>43</sup>

### 3. *The Importance of Transparency*

Definisi dari *The Importance of Transparency* yaitu proses negara yang melakukan kerjasama keamanan dalam meyakinkan mitra kerjasama melalui transparansi informasi mengenai inventarisir militer, hal ini menjadi vital untuk meyakinkan bahwa aktivitas militer yang dilakukan dalam lingkup kerjasama keamanan tidak berbahaya bagi mitra lainnya. Adanya transparansi mengenai aktivitas dan inventarisir militer membantu negara mitra untuk melakukan

<sup>42</sup> Ibid. Moodie, Michael. Page : 16

<sup>43</sup> Ibid. Moodie, Michael. Page : 17

pemeriksaan apabila terjadi aktivitas yang tidak sesuai dengan kesepakatan kerjasama keamanan yang telah disepakati. Selain negara, NGO juga dapat melakukan monitoring mengenai bagaimana kinerja dan aktivitas negara yang sedang melakukan kerjasama keamanan.<sup>44</sup>

#### 4. *The Importance of Capacity Building*

Definisi *The Importance of Capacity Building* yaitu proses negara dalam membentuk serangkaian kemampuan yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Dalam membentuk serangkaian kapasitas, negara harus memperhatikan kapasitas yang harus dipenuhi, antara lain negara dapat mengimplementasikan perjanjian internasional, membangun komunitas dan masyarakat sipil yang berfungsi sebagai pemeriksa integrasi kebijakan politik yang dibuat, mengarahkan ancaman transnasional dengan menggandeng NGO atau aktor *non state* lainnya, mencegah atau menyelesaikan konflik yang sedang berlangsung melalui pendekatan regional, dan membangun masyarakat sipil untuk mempermudah negara merealisasikan mobilisasi kebijakan yang diinginkan dan juga menjadikan masyarakat sipil sebagai pengawas bagi kinerja pemerintah.<sup>45</sup>

<sup>44</sup> Ibid. Moodie, Michael. Page : 18

<sup>45</sup> Ibid. Moodie, Michael. Page : 19

## 2.3 Definisi Operasional

### 2.3.1 *Exploiting Changes*

Variabel ini terfokus pada faktor apa saja yang mendorong proses perubahan yang dilakukan oleh Malaysia, Filipina dan Indonesia untuk melakukan kerjasama keamanan. Perubahan yang dilakukan meliputi bagaimana melihat tren ancaman yang ada di wilayah sekitar negara yang melakukan kerjasama keamanan, penggunaan performa ekonomi sebagai instrument yang mendorong kerjasama serta pembuatan kebijakan domestic maupun luar negeri dari masing masing negara yang melakukan kerjasama keamanan.

Dalam hal ini penulis akan membahas bagaimana Malaysia, Filipina dan Indonesia yang tergabung dalam *Trilateral Cooperation Agreement* (TCA).

#### 2.3.1.1 *Conceptual Challenges*

Adanya tantangan atau ancaman keamanan yang terjadi di Laut Sulu dimana area ini merupakan wilayah perairan yang berbatasan langsung dengan Malaysia, Philipina dan Indonesia. Dalam hal ini Malaysia, Philipina dan Indonesia melakukan proses pemetaan ancaman yang berasal dari aktor *non state* yaitu salah satunya berasal

dari Abu Sayyaf Grup dimana kelompok ini merupakan sekelompok penjahat yang melakukan operasinya di wilayah Laut Sulu.

### ***2.3.1.2 The Primacy of Economics Domestic***

Penilaian kesuksesan negara negara yang melakukan kerjasama berdasarkan bagaimana kinerja ekonomi dan perkembangannya.

Dalam hal ini yang diperhatikan bagaimana negara TCA yaitu Malaysia, Filipina dan Indonesia menjaga kerjasama keamanan tetap berlangsung melalui instrumen ekonomi dan keuangan. Alokasi anggaran di sektor militer atau pertahanan serta ketersediaan forum untuk membahas isu strategis bersama oleh negara anggota TCA sangat dibutuhkan, hal ini untuk mengetahui sejauh mana proses berjalannya kerjasama. juga sebagai upaya untuk memastikan bahwa kondisi ekonomi Malaysia, Filipina dan Indonesia tetap stabil meskipun sedang melakukan kerjasama keamanan.

### ***2.3.1.3 Domestic Policy and Foreign Policy***

Malaysia, Filipina dan Indonesia membuat kesepakatan dalam TCA sesuai dengan kebijakan politik domestik dan kebijakan luar negeri yang memiliki banyak keterkaitan. Politik domestik berperan untuk menentukan dan mendefinisikan prioritas negara sedangkan kebijakan luar negeri merupakan faktor pendorong melakukan

kerjasama. Keamanan Laut Sulu menjadi salah satu isu politik domestik bagi Malaysia, Filipina dan Indonesia karena letaknya yang strategis dan bersinggungan dengan tiga negara tersebut secara langsung. Kondisi keamanan Laut Sulu yang terancam mendorong Malaysia, Filipina dan Indonesia untuk membuat keamanan maritim menjadi salah satu fokus politik dan pembuatan kebijakan domestik. Letak Laut Sulu yang saling berbatasan membuat Malaysia, Filipina dan Indonesia terdorong untuk membuat kebijakan luar negeri untuk melakukan kerjasama TCA ( *Trilateral Cooperation Agreement* ) yang fokus untuk mengupayakan pengamanan di laut sulu.

### **2.3.2 Overcoming Impediments**

Variabel yang kedua yaitu *Overcoming Impediments*. Variabel ini menjelaskan proses bagaimana negara anggota TCA yaitu Malaysia, Filipina dan Indonesia mengatasi beberapa hambatan yang berpotensi menyebabkan kesuksesan upaya pengamanan di Laut Sulu terhambat. Hambatan yang terjadi terdiri dari tiga sub variabel antara lain, *State Fragility and Challenges to Internal Stability*, *Conflicting Perceptions* dan *Strategic Assymetric*

### **2.3.2.1 State Fragility and Challenges to Internal Stability**

Negara yang melakukan kerjasama pada umumnya memiliki kerentanan dan ancaman dari dalam negeri yang disebabkan oleh aktor non tradisional. Malaysia, Filipina dan Indonesia menghadapi ancaman internal yang salah satunya disebabkan oleh Abu Sayyaf Grup yang merupakan kelompok pelaku kejahatan maritim yang beroperasi di Laut Sulu. Minimnya pemerataan infrastruktur dan adanya gesekan etnis baik di Malaysia, Filipina dan Indonesia mengakibatkan berkurangnya kepercayaan masyarakat pada negara. Sehingga negara yang bekerjasama dalam TCA menjamin perlindungan warga negaranya dari ancaman yang mengganggu keamanan mereka, baik ancaman yang sifatnya tradisional maupun non tradisional.

### **2.3.2.2 Conflicting Perceptions**

Dalam melakukan kerjasama keamanan, Malaysia, Filipina dan Indonesia negara yang merupakan aktor kunci memiliki perbedaan pendapat dan perspektif mengenai bagaimana kekuatan yang akan digunakan untuk menghadapi atau mengatasi ancaman. Malaysia, Filipina dan Indonesia sebagai anggota TCA perlu menyamakan pendapat masing masing dalam upaya penggunaan kekuatan

khususnya di sektor militer dalam upaya menanggulangi ancaman yang terjadi di Laut Sulu.

### 2.3.2.3 *Strategic Assymetric*

Strategi yang bersifat asimetris menyebabkan negara yang melakukan kerjasama keamanan sulit melakukan kerjasama dikarenakan adanya perbedaan yang bersifat mutlak. Yaitu perbedaan secara geografis, topografis dan demografis. Malaysia, Filipina dan Indonesia memiliki perbedaan mutlak yang sifatnya tidak bisa dirubah. Namun anggota TCA bisa melakukan kerjasama apabila negara anggotanya memiliki inventarisir militer yang cukup besar atau memiliki spesifikasi khusus yang menunjang kinerja kerjasama keamanan. Perbedaan demografis atau jumlah penduduk Malaysia, Filipina dan Indonesia mempengaruhi jumlah kapasitas personil militer, perbedaan geografis mengakibatkan letak pemantauan Laut Sulu tidak sama dikarenakan pengaruh kebijakan militer dan keamanan internal dari Malaysia, Filipina dan Indonesia yang berbeda. Namun hal ini tidak menutup kemungkinan ketiga negara akan melakukan kerjasama keamanan.

### 2.3.3 Respond to Challenges

Variabel ketiga yaitu *Respond to Challenges* yaitu proses bagaimana Malaysia, Filipina dan Indonesia merubah tindakan atau pola kerjasama yang sebelumnya tidak pernah dilakukan sebagai respon terhadap ancaman kejahatan maritim yang ada di Laut Sulu, perubahan dilakukan baik dari segi perspektif ( *change in perspective* ) maupun tindakan operasional ( *change in operational* ).

#### 2.3.3.1 Change in Perspective

Pemerintah Malaysia, Filipina dan Indonesia yang tergabung dalam kerjasama TCA ( *Trilateral Cooperation Agreement* ) perlu merubah cara pandang mengenai bagaimana upaya mengatasi ancaman kejahatan non tradisional dengan menciptakan kondisi menciptakan stabilitas jangka panjang, berorientasi pada peningkatan ekonomi dalam melakukan kerjasama untuk menciptakan stabilitas regional. Meningkatkan kemampuan teknologi yang didukung dengan kebijakan merupakan hal yang perlu dilakukan oleh negara anggota TCA agar dapat mengakses informasi yang sesuai dengan kebutuhan.

Selain itu perlunya pemahaman bahwa kejahatan maritim di Laut Sulu merupakan kasus yang memerlukan pendekatan non tradisional

### 2.3.3.2 Change in Operation

Dalam merespon adanya tantangan atau ancaman Pemerintah Malaysia, Filipina dan Indonesia yang tergabung dalam kerjasama

TCA ( *Trilateral Cooperation Agreement* ) perlu melakukan beberapa perubahan untuk memperbaiki kinerja dalam upaya pengamanan Laut

Sulu. Beberapa langkah yang perlu dilakukan Pemerintah Malaysia, Filipina dan Indonesia yang tergabung dalam kerjasama TCA (

*Trilateral Cooperation Agreement* ) antara lain. *Establishing Norms*

yaitu menciptakan norma atau aturan. Norma atau aturan diimplementasikan agar kerjasama yang disepakati oleh Pemerintah

Malaysia, Filipina dan Indonesia yang tergabung dalam kerjasama

TCA ( *Trilateral Cooperation Agreement* ) dapat terus dilaksanakan

dan juga memberikan tindakan pada anggota yang melakukan ketidakpatuhan. Yang kedua *Interims steps* atau pengambilan langkah

sementara yang meliputi peletakan konsep dasar pada kerjasama

Pemerintah Malaysia, Filipina dan Indonesia yang tergabung dalam

kerjasama TCA ( *Trilateral Cooperation Agreement* ) yang kemudian

diikuti dengan adanya forum dan dialog untuk membangun

kepercayaan dalam kerjasama. *Importance of Transparency* atau

perlunya transparansi oleh Pemerintah Malaysia, Filipina dan

Indonesia yang tergabung dalam kerjasama TCA ( *Trilateral*

*Cooperation Agreement* ) berfungsi untuk meyakinkan anggota satu sama lain pengamanan laut sulu merupakan tindakan yang tidak membahayakan bagi satu sama lain, transparansi yang dimaksud pada poin ini lebih terfokus pada transparansi pada kontrol dan kepemilikan senjata. Berikutnya yaitu *Importance of capacity building* dimana Pemerintah Malaysia, Filipina dan Indonesia yang tergabung dalam kerjasama TCA ( *Trilateral Cooperation Agreement* ) juga memiliki tanggung jawab untuk mengimplementasikan perjanjian internasional dan mengatasi ancaman transnasional khususnya yang terjadi di Laut Sulu.

**2.4 Tabel Operasionalisasi Konsep**

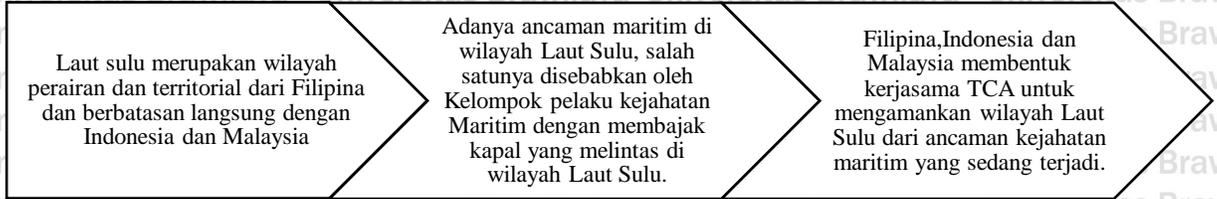
Konsep	Variabel	Sub Variabel	Operasionalisasi
Cooperative Security Michael Moodie	Exploiting Changes	<ul style="list-style-type: none"> <li><i>Conceptual Challenges</i></li> </ul>	Negara anggota TCA melakukan pemetaan ancaman kejahatan maritim di Laut Sulu dikarenakan adanya pergeseran tren ancaman dan aktor pelaku kejahatan maritim yang terjadi di Laut Sulu.
		<ul style="list-style-type: none"> <li><i>The Primacy of Economics Domestic</i></li> </ul>	Penggunaan kekuatan ekonomi sebagai instrument untuk menilai kesiapan masing masing anggota, selain itu dibutuhkan adanya forum dialog untuk kebutuhan koordinasi mengenai kestabilan berjalannya kerjasama.

Overcoming impediment	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Domestic Policy And Foreign Policy</i></li> </ul>	Malaysia, Filipina dan Indonesia menyesuaikan masing masing kebijakan luar negerinya dengan tujuan TCA oleh untuk mengamankan Laut Sulu.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>State Fragility and Challenges to Internal Stability</i></li> </ul>	Negara anggota TCA menjamin perlindungan warga negaranya dari ancaman yang mengganggu keamanan mereka, baik ancaman yang sifatnya tradisional maupun non tradisional. Untuk mencegah kerusakan didalam negeri masing masing anggota.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Conflicting perceptions</i></li> </ul>	Anggota TCA perlu menyamakan pendapat masing masing dalam upaya penggunaan kekuatan khususnya di sektor militer dalam upaya menanggulangi ancaman yang terjadi di Laut Sulu.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Strategic assymetric</i></li> </ul>	Negara anggota TCA bisa melakukan kerjasama apabila negara anggotanya memiliki inventarisir militer yang cukup besar atau memiliki spesifikasi khusus yang menunjang kinerja kerjasama keamanan.
Respond to challenge	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Change in Perspective</i></li> </ul>	Anggota TCA melakukan perubahan sudut pandang mengenai ancaman di Laut Sulu dengan pendekatan non tradisional yang bersifat <i>long term</i> . Serta meningkatkan kemampuan teknologi yang didukung dengan kebijakan agar dapat mengakses informasi yang sesuai dengan kebutuhan dan membantu pembuatan kebijakan pengamanan Laut Sulu.

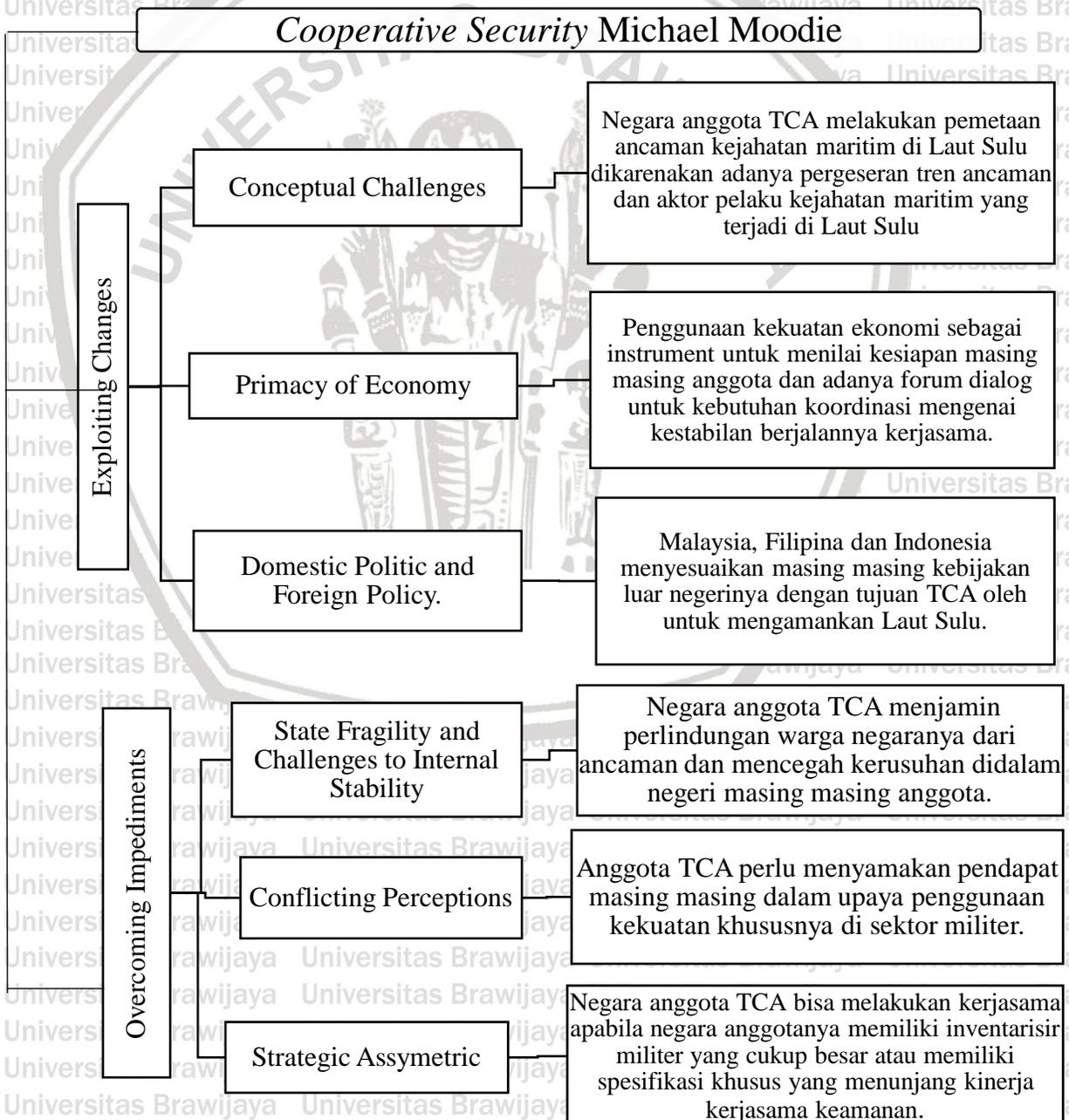
		<ul style="list-style-type: none"><li>• <i>Change in Operation</i></li></ul>	Adanya respon lanjutan oleh anggota TCA dengan membentuk forum atau dialog antar negara anggota TCA yang membahas upaya pengamanan Laut Sulu dengan meminimalisir penggunaan kekuatan militer dan lebih fokus membangun masyarakat sipil sebagai salah satu bentuk pertahanan dari sektor sosial.
--	--	--	---

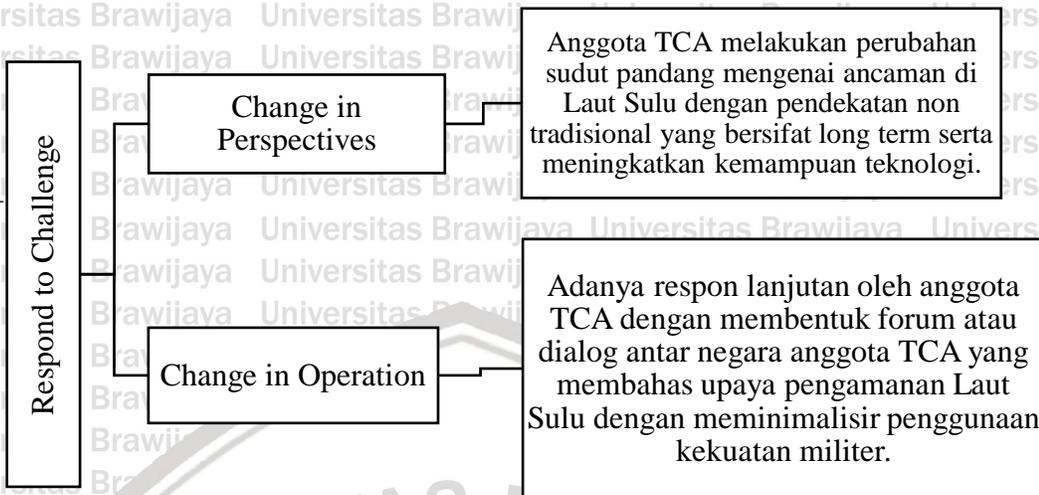


## 2.5 Alur Pemikiran



Bagaimana proses kerjasama pengamanan wilayah Laut Sulu melalui kerjasama *Trilateral Cooperation Agreement ( TCA )* pada tahun 2016 – 2017 ?

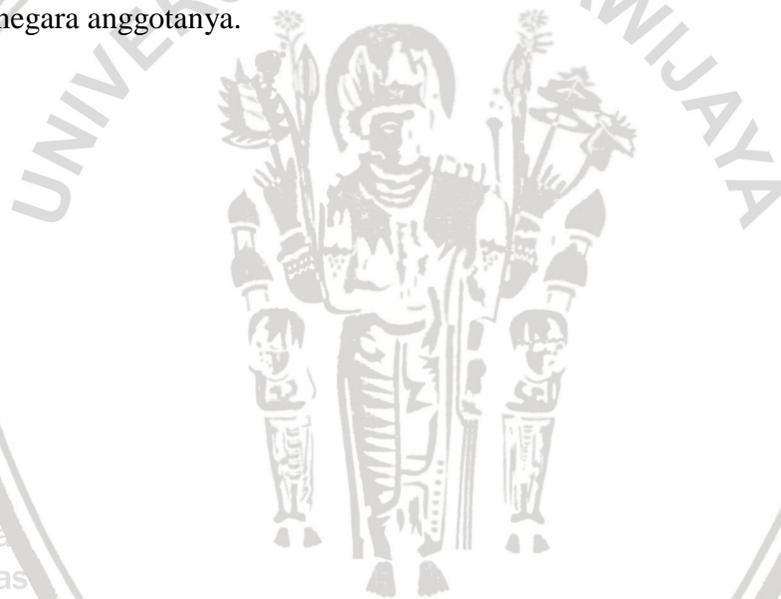




## 2.6 Argumen Utama

Dalam proses pengamanan wilayah Laut Sulu dari tindak Kejahatan transnasional, Negara anggota TCA (*Trilateral Cooperation Agreement*) melalui konsep *Cooperative Security* yang dijelaskan oleh Michael Moodie dapat disimpulkan bahwa ancaman yang terjadi di Laut Sulu merupakan hal yang sangat vital bagi Malaysia, Filipina dan Indonesia yang memiliki teritori bersinggungan langsung dengan Laut Sulu. Kerjasama antara Malaysia, Filipina dan Indonesia dalam pengamanan Laut Sulu fokus melakukan perubahan bukan hanya dari sektor militer atau pertahanan saja tapi juga perlu melakukan pemberdayaan masyarakat, pemerataan pembangunan dan pengembangan ekonomi hal ini berkaitan dengan rawannya kemiskinan dan menjadi pintu masuk teroris atau aktor kejahatan transnasional dalam merekrut anggotanya. Kerjasama keamanan Malaysia, Filipina dan Indonesia perlu merubah pandangan bahwasanya kejahatan yang terjadi di Laut Sulu

merupakan kejahatan non tradisional sehingga pendekatan tradisional tidak sesuai dengan kasus yang terjadi di Laut Sulu karena aktor yang terlibat merupakan aktor *non state* yang melakukan aksi kejahatannya pada wilayah lintas batas negara antara Malaysia, Filipina dan Indonesia. Dalam melakukan kerjasama keamanan di Laut Sulu, Malaysia, Filipina dan Indonesia perlu melihat apakah kerjasama *Trilateral Cooperation Agreement* ( TCA ) sudah sesuai dengan kebijakan luar negeri dan rencana strategis masing masing negara anggotanya.



### BAB III

#### METODE PENELITIAN

##### 3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian Kualitatif.

Melalui berbagai studi pustaka dan literatur. Penulis akan mendeskripsikan bagaimana upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia, Malaysia dan Filipina dalam upaya pengamanan Laut Sulu dan mengatasi ancaman didalamnya serta bagaimana operasi atau implementasi kebijakan TCA di wilayah Laut Sulu Filipina yang beroperasi di wilayah perairan yang berbatas langsung dengan Indonesia dan Malaysia.

##### 3.2 Ruang Lingkup Penelitian

Lingkup penelitian penulis terfokus pada upaya Pemerintah Indonesia, Malaysia dan Filipina dalam mengamankan wilayah Laut Sulu dari kejahatan maritim. Penelitian hanya terbatas pada implementasi kebijakan dari TCA yang penulis maksud agar penelitian dapat terarah dan memiliki batasan yang jelas dan tidak menyebar luas pada isu atau data yang tidak diperlukan. Adapun tahun data yang akan penulis ambil yakni dimulai pada tahun 2016 dimana aktivitas kejahatan maritim di Laut Sulu meningkat dan mulai diadakan pertemuan oleh kementerian pertahanan masing masing dari negara Malaysia, Indonesia dan Filipina

### 3.3 Level Analisa

Level analisa ( *Level of Analysis* ) yang digunakan oleh penulis yakni level analisa pada level negara ( *State* ). Negara yang menjadi fokus penelitian ini adalah Indonesia, Malaysia dan Filipina.

### 3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui data sekunder. Metode pengumpulan data sekunder dilakukan melalui studi literatur untuk mengumpulkan, mengolah, serta menganalisa informasi yang berasal dari buku-buku, dokumen jurnal, tesis, dan website internet yang mengkaji mengenai upaya pengamanan maritime yang dilakukan oleh Malaysia, Indonesia dan Filipina sejak tahun 2016 hingga tahun 2017

### 3.5 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan dengan teknik analisa deskriptif, sumber data yang digunakan disesuaikan dengan studi kasus dari penelitian ini sehingga diperoleh penjelasan dari permasalahan yang berkorelasi dalam penelitian ini, sehingga diharapkan penelitian ini dapat menjawab rumusan masalah. Adapun tambahan dalam penelitian ini adalah berupa gambar tabel, bagan dan angka-angka apabila diperlukan untuk memperkuat argumentasi penelitian.

### 3.6 Sistematika Penulisan

#### BAB I

Bab ini mendiskripsikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, serta manfaat penelitian. Latar belakang masalah menjabarkan bagaimana aktivitas kejahatan maritim yang terjadi di Laut Sulu terjadi sehingga menyebabkan ancaman bagi negara Malaysia, Filipina dan Indonesia. Perkembangan aktivitas kejahatan maritim dari tahun ke tahun dan upaya apa saja yang telah dilakukan oleh pemerintah Malaysia, Filipina dan Indonesia dalam mengatasi kejahatan yang terjadi di Laut Sulu.

#### BAB II

Bab ini berisi studi terdahulu yang menjadi acuan penulis dalam melakukan penelitian ini. Serta penjelasan teori yang penulis gunakan untuk menganalisa fenomena yang diangkat yaitu dengan menggunakan konsep *Cooperative Security* yang dijelaskan oleh Michael Moodie Pada bagian bab II juga menjelaskan indikator yang ada dalam konsep yang kemudian dioperasionalisasi pada fenomena yang diambil.

#### BAB III

Bab ini berisi metode penelitian seperti apa yang digunakan oleh penulis, bagaimana ruang lingkup penelitian, level analisa serta teknik pengumpulan data. Adapun data yang diolah merupakan data sekunder dengan jenis penelitian kualitatif.

#### **BAB IV**

Bab ini menjelaskan gambaran umum mengenai Laut Sulu. Baik dari segi potensi, jenis ancaman yang kerap terjadi di Laut Sulu hingga kategori kejahatan pada kasus kejahatan maritim. Selain itu penulis juga memberikan gambaran umum mengenai negara anggota TCA kepentingannya terhadap Laut Sulu serta upaya lainnya dalam menangani kejahatan maritim yang terjadi di Laut Sulu.

#### **BAB V**

Bab ini berisi hasil analisis penulis mengenai upaya apa saja yang telah diterapkan oleh negara anggota TCA yaitu Malaysia, Filipina dan Indonesia untuk mengamankan Laut Sulu

#### **BAB VI**

Bab ini berisi kesimpulan semua pembahasan dari bab 1 hingga bab 5. Di bab ini penulis juga memberikan saran bagi penulis atau peneliti selanjutnya juga negara anggota TCA dalam proses mengamankan wilayah laut Sulu.



## BAB IV

### GAMBARAN UMUM MENGENAI ANCAMAN KEJAHATAN PERAIRAN LAUT SULU SEBAGAI KONSEN WILAYAH PENGAMANAN OLEH NEGARA TCA ( *TRILATERAL COOPERATION AGREEMENT* )

Pada bab ini penulis akan berupaya menjelaskan gambaran umum mengenai potensi strategis Laut Sulu bagi Malaysia, Filipina dan Indonesia. Laut Sulu menjadi penting bagi Malaysia, Filipina dan Indonesia karena letaknya yang berbatasan dengan Laut Sulawesi untuk Indonesia dan Sabah untuk Malaysia. Bab IV dimulai penulis dengan menarasikan potensi yang dimiliki Laut Sulu baik potensi yang ada di bawah laut dan juga potensi Laut sulu sebagai jalur transportasi dan perdagangan internasional baik ekspor maupun impor. Selanjutnya penulis menjelaskan ancaman apa saja yang terjadi di Laut Sulu serta menjabarkan kategori tingkat kejahatan yang kerap terjadi di Laut Sulu dan perubahan tren perilaku kejahatan mulai tahun 2016 hingga tahun 2017 pada tahun Malaysia, Filipina dan Indonesia sudah membentuk TCA ( *Trilateral Cooperation Agreement* ) dimana kerjasama ini mengupayakan pengamanan Laut Sulu dari ancaman perompak yang sering melakukan operasinya di Laut Sulu. Sebelum membentuk TCA Malaysia dan Indonesia sebelumnya sudah melakukan kerjasama pengamanan selat Malaka yaitu kerjasama MSP ( *Malacca Strait Patrols* ), dimana Malaysia, Singapura dan Indonesia melakukan kerjasama patroli keamanan maritim di wilayah selat Malaka, dimana pada saat itu angka

perompakan di wilayah Selat Malaka sangat tinggi sedangkan Selat malaka sendiri merupakan jalur perdagangan yang cukup sibuk.

Dalam Bab IV penulis akan fokus untuk memberikan data data terkait Laut Sulu sebagai lokasi penelitian penulis, potensi potensi strategis Laut Sulu bagi Malaysia, Filipina dan Indonesia sebagai pintu perdagangan antar negara baik anggota TCA saja dan negara lain yang ada disekitarnya. Selain dengan upaya pengamanan Laut Sulu, TCA juga berperan sebagai wadah dan forum kerjasama antara Malaysia, Filipina dan Indonesia dalam merundingkan upaya pengamanan Laut Sulu dari tindak kejahatan perompak yang beroperasi.

#### **4.1 Arti Strategis Laut Sulu untuk Malaysia, Filipina dan Indonesia.**

Laut Sulu merupakan wilayah perairan yang bersinggungan langsung dengan Malaysia tepatnya di sebelah timur perairan Sabah sedangkan dengan Indonesia berbatasan langsung dengan Laut Sulawesi dan provinsi Kalimantan Utara. Laut Sulu sendiri merupakan wilayah teritori Filipina yang cukup strategis, namun terpencil dari pusat pemerintahan Filipina.<sup>46</sup> Awalnya Laut Sulu merupakan lokasi dimana aktivitas perdagangan dilakukan oleh penduduk lokal di kepulauan kecil Mindanao. Pada periode berikutnya potensi yang ada di Laut Sulu semakin berkembang, hal ini ditunjukkan dengan semakin banyaknya aktor yang melakukan aktivitas perdagangan

---

<sup>46</sup> Lokasi Laut sulu. Sumber : <https://nasional.kompas.com/read/2016/03/31/13512981/Kepulauan.Sulu-Mindanao.Poros.Kriminalitas.Indonesia-Malaysia-Filipina?page=all> [ online ] diakses pada : 12 Agustus 2019

di Laut Sulu. Selain potensi yang berasal dari perdagangan, kekayaan alam bawah laut perairan sulu juga menjadi daya tarik wisatawan asing.<sup>47</sup>

Berbicara mengenai potensi Laut Sulu bagi Malaysia, Filipina dan Indonesia hal ini tidak terlepas dari lingkungan strategis yang berkaitan dengan geografi, geopolitik dan geostrategic yang terdapat pada satu lokasi tertentu. Aspek geografis merupakan bawaan fisik dan kondisi alam yang dimiliki oleh suatu negara, sedangkan aspek geopolitik dipengaruhi oleh SDM yang ada di lokasi tertentu.<sup>48</sup> Aspek geopolitik merupakan hasil interaksi teknologi yang diimplementasikan dengan teknologi dengan output kepentingan politis yang berkaitan tentang ekonomi, politik dan strategis dari satu lokasi. Kemudian pada aspek geostrategi didefinisikan sebagai hasil kebijakan luar negeri suatu negara, aspek geostrategi membantu negara untuk memproyeksikan kekuatan militer dan mengarahkan kegiatan diplomatiknya. Hal ini menjadikan Laut Sulu sebagai konsen bagi negara anggota TCA dikarenakan lokasinya yang potensial dimana Malaysia, Filipina dan Indonesia memiliki kepentingan pada lokasi tersebut.

#### **4.1.1. Potensi Bawah Laut dan Kekayaan Alam Laut Sulu**

Laut Sulu berbatasan langsung dengan Laut Sulawesi yang merupakan lokasi yang memiliki nilai ekonomis. Kekayaan alam Laut Sulu terlihat dari adanya Taman Nasional Bawah Laut Tubbataha dimana lokasi ini dianggap sebagai habitat laut yang

<sup>47</sup> Potensi dan kekayaan Laut Sulu. Sumber : <http://ecological.panda.org/2017/05/24/sulu-seas-shark-tourism-expedition/> [ online ] diakses pada : 12 Agustus 2019

<sup>48</sup> Grygiel, J Jakub. Great Powers and Geopolitical Changes. The Johns Hopkins University p. 22

berkualitas tinggi. Taman bawah laut Tubтатаha berada di tengah Laut Sulu yang melindungi tiga atol. Taman Nasional Bawah Laut Tubтатаha yang berada di Laut Sulu merupakan habitat bagi lumba-lumba, hiu, kura – kura. Terdapat hampir 500 jenis ikan dan 350 jenis terumbu karang yang berada Taman Nasional Bawah Laut Tubтатаha.<sup>49</sup>

Kekayaan Laut Sulu akan kelestarian alam bawah lautnya berdampak pada semakin meningkatnya kunjungan wisatawan asing. Adapun tujuan wisatawan asing lebih terfokus pada penelitian konservasi ikan hiu dan ikan pari, dimana dua jenis ikan ini dianggap peneliti sebagai salah satu sumber objek wisata yang sangat potensial dikarenakan populasinya di dunia sudah menurun dengan sangat drastis.<sup>50</sup>

Dalam upaya konservasi alam bawah laut, Laut Sulu memiliki 3 kategori yang menjadi pertimbangan peneliti untuk melakukan konservasi adapun 3 kategori antara lain ; kategori ( vii ) dimana kategori ini Laut Sulu dikategorikan sebagai taman bawah laut dengan fenomena dan kecantikan alam yang sangat mendukung kepentingan estetika Taman nasional bawah laut, pada kategori ( ix ) Laut Sulu merupakan ekosistem tertua di Filipina, hal tersebut menjadikan Laut Sulu sebagai laboratorium alami untuk mempelajari proses ekologis dan biologis dalam pembentukan terumbu karang. Pada kategori ( x ) taman nasional bawah laut Tubтатаha merupakan habitat laut yang terancam punah. Berkaitan dengan kategori

<sup>49</sup> Tubтатаha Reefs Natural Park. Sumber : <https://whc.unesco.org/en/list/653>. [ online ] diakses pada : 18 Agustus 2019

<sup>50</sup> Op. Cit. Potensi dan kekayaan Laut Sulu.

sebelumnya, Laut Sulu memiliki 374 spesies karang dimana jumlah tersebut merupakan 90% presentasi dari keseluruhan karang di Filipina.<sup>51</sup>

Dengan kekayaan dan keanekaragaman hayati, letak Laut Sulu yang berbatasan langsung dengan Laut Sulawesi dan sebagian perairan Malaysia menjadikan Laut Sulu sebagai bagian dari anggota Segitiga Terumbu Karang Dunia (*Coral Triangle*) dimana sisanya masih membentang hingga ke wilayah perairan Timor Leste dan perairan Papua Nugini dan kepulauan Solomon.<sup>52</sup>

**Gambar 4.1.1 Coral Triangle**



Sumber : *World Economic Forum*

Selain tergabung menjadi dari wilayah Segitiga Terumbu Karang Dunia Laut Sulu, Laut Sulawesi dan sebagian perairan Sabah juga tergabung menjadi anggota

<sup>51</sup> Category and Criteria of Reef. The Criteria for Selection. Sumber : <https://whc.unesco.org/en/criteria/>. [ online ] diakses pada : 22 Agustus 2019.

<sup>52</sup> The apex Coral Triangle. Sumber : <https://www.weforum.org/agenda/2018/09/what-is-the-coral-triangle/>. [ online ] diakses pada : 22 Agustus 2019

*Sulu Sulawesi Marine Ecoregion* ( SSME ) dengan proporsi 10% Malaysia, 70%

Filipina dan 20% Indonesia. Kawasan SSME merupakan puncak dari segitiga

terumbu karang yang terbentang dari perairan Sabah hingga perairan kepulauan

Solomon. Dengan potensi kekayaan alam yang besar tentunya hal ini dapat

mendorong sektor pariwisata bagi masyarakat pesisir yang menetap disekitarnya.

Potensi yang dapat dieksplorasi oleh masyarakat pesisir di sekitar perairan Sulu –

Sulawesi yaitu bidang perikanan dimana letak Laut Sulu merupakan koridor penting

untuk jalur migrasi spesies secara besar besaran. Adapun jenis jenis spesies yang

memiliki potensi nilai jual antara lain sirip Kuning, Cakalang, Tuna Mata Besar,

Udang dan masih banyak lainnya. Produktivitas perikanan yang ada di Laut Sulu

diprediksi dapat memanen hasil ikan di kisaran antara 3 hingga 36 ton per kilometer

persegi setiap tahunnya.<sup>53</sup>

Dengan prediksi panen yang telah disebutkan. Hal ini tentu menjadi potensi

besar bisa diambil manfaatnya oleh masyarakat sekitar. Eksplorasi potensi perikanan

yang ada di Laut Sulu tentunya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar,

selain itu adanya Taman Nasional Bawah Laut Tubbataha dan pusat konservasi Hiu

dan Pari diharapkan dapat menjadi salah satu upaya pelestarian ekosistem laut untuk

mencegah punahnya hewan hewan laut yang mulai langka.

<sup>53</sup> Sulu Sulawesi marine ecoregion. WWF International Corals Initiative. P.1

#### 4.1.2 Potensi Laut Sulu Sebagai Jalur Perdagangan dan Transportasi.

Lokasi Laut Sulu yang berbatasan dengan Malaysia dan Indonesia tentunya menjadi titik strategis untuk jalur perdagangan dan transportasi. Pada tahun 2016 lebih dari seratus ribu kapal dagang melintasi wilayah Laut Sulu – Sulawesi. Adapun jumlah angkatan yang dimuat oleh kapal yang melewati Laut Sulu mengangkut lebih dari 55 juta metric ton dan 18 juta awak kapal beserta penumpang. Selain kapal yang melintas dari Malaysia, Filipina dan Indonesia, juga terdapat kapal angkatan lain yang melintasi wilayah Laut Sulu antara lain kapal dagang yang berasal dari Australia dan negara Asia Timur yang juga hendak melakukan kegiatan ekspor dan impor.<sup>54</sup>

Laut Sulu memiliki potensi strategis sebagai jalur perdagangan dan transportasi, meskipun jumlahnya tidak seramai Selat Malaka namun rute Laut Sulu cukup efektif untuk memotong rute dan jalur lintasan kapal yang akan melintas. Kapal dagang yang melintas di perairan Laut Sulu umumnya didominasi oleh kapal dengan muatan Batu Bara. Kapal kargo yang melintasi Laut Sulu kemudian melanjutkan rutenya ke China, Jepang atau Korea Selatan.<sup>55</sup> Jalur pelayaran Laut Sulu yang mulai ramai dilintasi tentunya menjadi pembuka potensi ekonomi bagi Malaysia, Filipina dan Indonesia.

Namun ramainya jalur pelayaran di Laut Sulu juga menjadi penyebab ramainya perompakan atau kejahatan maritim yang terjadi. Ancaman perompak yang sering

<sup>54</sup> Confronting Threats in the Sulu-Sulawesi Seas: Opportunities and Challenges. Sumber : <https://thediplomat.com/2016/06/confronting-threats-in-the-sulu-sulawesi-seas-opportunities-and-challenges/> [ online ] diakses pada : 22 Agustus 2019.

<sup>55</sup> Ancaman Abu Sayyaf: Mengapa Laut Sulu penting untuk Indonesia? Sumber : <https://www.rappler.com/indonesia/131543-mengapa-laut-sulu-penting-untuk-indonesia>. [ online ] diakses pada : 23 Agustus 2019

terjadi dalam lingkup pelayaran antara lain adanya perompak yang mencuri muatan kapal kargo selain itu, Laut Sulu juga rawan bagi masyarakat atau kapal yang ingin melintas tanpa dilengkapi dengan dokumen pendukung yang asli.<sup>56</sup>

Potensi rute perdagangan Laut Sulu dianggap sangat efisien bagi beberapa perusahaan pelayaran. Dalam beberapa kasus terdapat beberapa perusahaan pelayaran yang jalur pengiriman barangnya tidak perlu melewati selat Malaka. Disekitar Laut Sulu terdapat beberapa 3 jalur potensial jalur pertama yaitu jalur barat, jalur ini melewati Selat Karimata, Laut China Selatan dan Selat Malaka. Jalur Kedua atau jalur tengah yaitu melintasi Selat Makassar antara pulau Kalimantan dan Sulawesi menuju Laut Sulu berlanjut hingga Samudera Pasifik atau Laut China Selatan. Jalur ketiga yaitu jalur timur dengan rute melintas antara Pulau Sulawesi dan Pulau Maluku untuk menuju Laut China Selatan atau Samudera Pasifik.<sup>57</sup>

Kapal kapal yang melintasi Laut Sulu didominasi oleh angkatan Batu Bara. Filipina sendiri membutuhkan impor batu bara sebanyak 15 juta ton pertahun dari Indonesia. Pada tahun 2016 Malaysia dan Indonesia menempati 10 besar negara importir bagi Filipina. Adapun jumlah impor Filipina dari Indonesia sebanyak 4,6 milyar US\$ sedangkan Malaysia mendapatkan profit sebesar 3,3 Milyar US\$ dari kegiatan impor Filipina.<sup>58</sup>

<sup>56</sup> Ibid. Ancaman Abu Sayyaf.

<sup>57</sup> Ibid. Ancaman Abu Sayyaf.

<sup>58</sup> Foreign Trade Statistics of the Philippines: 2016. Sumber : <https://psa.gov.ph/content/foreign-trade-statistics-philippines-2016> [ online ] diakses pada : 24 Agustus 2019

Gambar 4.1.2 Major Trading Partners Philippines



Sumber : *Philippines Statistics Authority*

Dari gambar diatas dapat disimpulkan bahwasanya Indonesia dan Malaysia juga turut mendapatkan keuntungan dari Filipina dari segi perdagangan, meskipun jika dilihat secara keseluruhan Malaysia dan Indonesia bukan negara yang paling banyak melakukan ekspor terhadap Filipina. Sedangkan angka yang ditunjukkan grafik menunjukkan adanya peningkatan dibandingkan dengan tahun 2015 atau tahun sebelumnya.<sup>59</sup>

Malaysia, Filipina dan Indonesia memiliki potensi besar sebagai mitra kerjasama, Filipina memiliki kebutuhan yang sangat besar terhadap batubara, dimana batubara tersebut digunakan sebagai bahan bakar pembangkit listrik di Filipina.

Setiap tahunnya Filipina diperkirakan melakukan impor batu bara sebanyak 15 juta Ton batu bara, dalam nominal kegiatan impor tersebut mencapai 800 juta US\$ atau

<sup>59</sup> Ibid. Foreign Trade Statistics of the Philippines.

70% dari total impor kebutuhan batu bara nasional Filipina.<sup>60</sup> Sedangkan dominasi komoditas impor Filipina dari Malaysia antara lain kelapa sawit, karet dan kayu.

Ekspor kelapa sawit, karet dan kayu dari Malaysia untuk Filipina. Pada tahun 2016 *Malaysian Palm Oil Board* ( MPOB ) mencatat telah melakukan ekspor 625 ribu ton minyak kelapa sawit untuk Filipina. Sedangkan jurnal resmi *Oil World* menjelaskan bahwa 2/3 kebutuhan minyak sawit Filipina dikirim dari Malaysia.<sup>61</sup>

Dari himpunan data yang telah disebutkan sebelumnya. Maka baik Malaysia, Filipina maupun Indonesia memang seharusnya melakukan upaya pengamanan di Laut Sulu. Hal ini untuk memastikan jalur perdagangan atau ekspor impor antara Malaysia, Filipina dan Indonesia dapat dilintasi dengan aman, mengingat banyaknya masalah pembajakan kapal dan perompakan di Laut Sulu yang sudah terjadi sejak lama dan telah berulang kali menculik para pelaut baik yang berasal dari Malaysia dan Indonesia maupun negara sekitarnya.<sup>62</sup>

Memperhatikan pentingnya Laut Sulu sebagai wilayah yang vital bagi perdagangan anatara Malaysia, Filipina dan Indonesia. Maka diperlukan kerjasama keamanan laut untuk meningkatkan konektivitas di sekitar Laut Sulu dan negara

---

<sup>60</sup> Coal Trade Indonesia-Philippines Disturbed by Abu Sayyaf Ship Hijackings. Sumber : <https://www.indonesia-investments.com/id/news/todays-headlines/coal-trade-indonesia-philippines-disturbed-by-abu-sayyaf-ship-hijackings/item6744?> [ online ] diakses pada : 24 Agustus 2019

<sup>61</sup> M'sia targets Philippines to import more palm oil, rubber. Sumber : <https://www.nst.com.my/business/2017/07/258868/msia-targets-philippines-import-more-palm-oil-rubber>. [ online ] diakses pada : 24 Agustus 2019

<sup>62</sup> Minister confident cooperation in Sulu Sea will defeat piracy. Sumber : <https://www.thejakartapost.com/news/2016/11/22/minister-confident-cooperation-in-sulu-sea-will-defeat-piracy.html>. [ online ] diakses pada : 25 Agustus 2019

negara tetangga. Tujuan meningkatkan konektivitas bagi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran baik dari lingkup bilateral maupun regional.

Selain untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, keamanan Laut Sulu juga perlu diperhatikan mengingat banyaknya kasus kejahatan yang terjadi di sisi barat Pulau

Mindanao.<sup>63</sup>

Pada acara KTT ASEAN ke 30 yang diadakan di Manila pemerintah Indonesia dan Filipina meresmikan rute Davao – General Santos – Bitung untuk kapal RoRo.

Rute tersebut menghubungkan beberapa proyek infrastruktur yang menjadi prioritas

di bawah inisiatif kawasan timur ASEAN atau Brunei – Indonesia – Malaysia –

Philippines East ASEAN Growth Area ( BIMP – EAGA ) dimana kerjasama ini

betujuan untuk mengurangi kesenjangan pembangunan antara negara negara yang

berada di wilayah timur ASEAN. Adanya rute Davao – General Santos – Bitung

diharapkan dapat mempercepat proses pengiriman barang.<sup>64</sup>

#### 4.2 Ancaman Kejahatan Maritim Di Laut Sulu

Perbincangan kejahatan maritim hingga saat ini menjadi topik bahasan yang

cukup menarik. Kejahatan maritim menjadi topik bahasan yang menarik sekaligus

berbahaya bagi negara, hal tersebut dikarenakan kejahatan maritim merupakan

<sup>63</sup> Indonesia-Philippines talks to fortify new trade route. Sumber :

<https://www.thejakartapost.com/seasia/2017/04/26/indonesia-philippines-talks-to-fortify-new-trade-route.html> [ online] diakses pada : 25 Agustus 2019

<sup>64</sup> Ibid. Indonesia-Philippines talks to fortify new trade route.

kejahatan yang lokasi kejadiannya tidak hanya berada di satu negara saja, namun bersifat lintas negara. Pelaku kejahatan maritim juga terstruktur rapi dan terorganisir.

Hingga saat ini wilayah perairan, masih menjadi jalur perdagangan yang potensial. Dimana 90% aktivitas perdagangan dan pengiriman barang. Kejahatan maritim akan berbanding lurus dengan ramainya aktivitas pelayaran, apabila terdapat wilayah perairan yang ramai dengan aktivitas perdagangan maka bisa dipastikan ancaman kejahatan juga turut mengikuti.<sup>65</sup>

Kejahatan maritim seperti perompakan ( *piracy* ) dan perompakan bersenjata ( *armed robbery* ) pada dasarnya bukanlah hal yang baru, kejahatan maritim merupakan salah satu kejahatan tertua yang memang sudah ada sejak ribuan tahun lalu meskipun perlengkapan dan persenjataannya tidak secanggih seperti saat ini. Kejahatan maritim baik perompakan ( *piracy* ) dan perompakan bersenjata ( *armed robbery* ) bergerak dengan tujuan mencari keuntungan ekonomi atau profit baik secara berkelompok atau secara individu. Pada saat ini pelaku kejahatan di laut disokong dengan senjata api modern bahkan melakukan tindak kekerasan. Kejahatan maritim baik perompakan ( *piracy* ) dan perompakan bersenjata ( *armed robbery* ) melakukan aksinya dengan mencuri isi kapal membunuh awak kapal, menculik lalu menyandera awak kapal untuk dimintai tebusan kemudian.<sup>66</sup>

<sup>65</sup> ANCAMAN KEAMANAN MARITIM INDONESIA. Sumber : <http://ruangrakyat.com/ancaman-keamanan-maritim-indonesia/> [ online ] diakses pada : 26 Agustus 2019

<sup>66</sup> Sagena, Uni W. Memahami Keamanan Tradisional dan Non-Tradisional di Selat Malaka. Jurnal Interdependence, Th. 1, Vol. 1, Januari-April 2013, hal 72-90

#### 4.2.1 Perompakan

Pelaku kejahatan maritim di Laut Sulu memiliki modus operandi tersendiri yang terus berkembang, target awal adalah kapal yang bergerak dengan sangat lambat seperti tugboat atau tongkang bermuatan batu bara yang ditarik dengan kapal tunda dari Indonesia menuju Filipina. Namun targetnya turut berkembang dengan menarget kapal kapal asing khususnya kapal berat yang berbendera Korea Selatan pada oktober 2016.<sup>67</sup> Kejahatan di Laut Sulu sangat beragam tidak terbatas hanya pada satu aktivitas atau satu kegiatan saja. Salah satunya perompakan yang merupakan salah satu kasus kejahatan yang sudah lama terjadi, perompakan termasuk kejahatan yang menyinggung ranah hukum internasional. Perompakan sendiri memiliki dua versi yaitu menurut *United Nation Convention on The Law of the Sea* ( UNCLOS ) dan *International Maritime Organization* ( IMO ).<sup>68</sup>

Definisi perompakan menurut *United Nation Convention on The Law of the Sea* atau UNCLOS pasal 101, yakni<sup>69</sup>:

Pembajakan kapal ( *Piracy* ) terdiri atas tindakan-tindakan sebagai berikut :

a) Setiap perbuatan dengan kekerasan secara tidak sah atau penahanan atau setiap perbuatan yang merusak yang dilakukan dengan maksud untuk memiliki

<sup>67</sup> Is this the most dangerous backwater in the world?. Sumber : <https://www.bbc.com/news/world-asia-39252503> [ online ] diakses pada : 29 Agustus 2019

<sup>68</sup> Pembajakan Kapal di Laut Lepas. Sumber : <https://kumparan.com/dio-alif1523888395681/pembajakan-kapal-di-laut-lepas>. [ online ] diakses pada : 26 Agustus 2019

<sup>69</sup> United Nations Convention on the Law of the Sea. Sumber : [https://www.un.org/depts/los/convention\\_agreements/texts/unclos/unclos\\_e.pdf](https://www.un.org/depts/los/convention_agreements/texts/unclos/unclos_e.pdf) [ online ] diakses pada : 26 Agustus 2019

barang berharga milik orang secara tidak sah yang dilakukan kru atau penumpang dari suatu kapal dan dilakukan :

i) Di laut bebas terhadap kapal lainnya atau terhadap seseorang atau barang berharga yang ada diatas kapal.

ii) Terhadap suatu kapal, seseorang atau barang berharga di luar yurisdiksi dari suatu negara tertentu.

b) Setiap perbuatan turut-serta yang dilakukan secara sukarela dalam suatu operasi dari kapal yang diketahui perilaku secara nyata sebagai kapal perompak.

c) Setiap perbuatan yang mendorong atau memfasilitasi suatu perbuatan melawan hukum sebagai tersebut dalam item (a) atau (b) di atas.

Sedangkan definisi menurut *International Maritime Organization* ( IMO ) yaitu

<sup>70</sup> :  
“Perampokan bersenjata terhadap kapal berarti suatu tindakan kekerasan melawan hukum atau penahanan atau setiap perbuatan yang merusak atau ancaman kekerasan selain daripada tindakan perompakan kapal, yang ditujukan kepada Seseorang atau terhadap kapal atau barang berharga di atas kapal yang terjadi di dalam yurisdiksi suatu negara tertentu.”

<sup>70</sup> Definisi Piracy. Sumber :  
<http://oceansbeyondpiracy.org/sites/default/files/attachments/Piracy%20definition%20table.pdf> [online] diakses pada : 26 Agustus 2019

Definisi dari IMO sebenarnya merupakan solusi untuk melengkapi kekurangan UNCLOS pasal 101. Hanya saja definisi dari IMO tidak bersifat yuridis sehingga tidak bisa diimplementasikan sebagai dasar hukum internasional untuk menghentikan perompakan kapal yang sedang berlangsung, karena definisi yang diajukan IMO hanya bersifat rekomendasi yang tidak harus dipatuhi oleh negara anggotanya. Selain itu perbedaan definisi antara IMO dan UNCLOS pasal 101 juga berpotensi menjadi konflik hukum yang mempersulit penegakan hukum untuk kasus pembajakan kapal yang sedang terjadi.<sup>71</sup>

Perairan di Asia Tenggara termasuk pada kategori salah satu perairan dengan aktivitas tersibuk di dunia. Hal ini mencakup jalur pelayaran yang padat, lingkungan hayati laut yang beragam dan banyaknya produksi perikanan global. Kompleksitas geografis dan politis Laut Sulu menyebabkan adanya tantangan dan ancaman keamanan maritim yang saling terkait, sehingga tata kelola maritim sangat dibutuhkan.<sup>72</sup> Karena tingginya kasus pembajakan kapal yang terjadi, Laut Sulu mendapatkan predikat 'New Somalia'.<sup>73</sup> Para perompak melakukan tindakan penculikan dengan membawa awak kapal senior lalu membawanya ke daratan. Para pelaut yang melintasi Laut Sulu harus lebih berhati-hati dengan serangan perompak,

<sup>71</sup> Op, cit. Pembajakan Kapal di Laut Lepas.

<sup>72</sup> Laut Sulu – Sulawesi. Sumber : <https://stableseas.org/publications/sulu-celebes-seas>. [ online ] diakses pada : 26 Agustus 2019

<sup>73</sup> A Threat to Tugs and Barges – Piracy in the Sulu Sea: The “new Somalia” or a limited threat? Sumber : <https://www.tugadvice.com/resources/articles/a-threat-to-tugs-and-barges-piracy-in-the-sulu-sea-the-new-somalia-or-a-limited-threat/> [ online ] diakses pada : 26 Agustus 2019

salah satunya Abu Sayyaf Grup dimana kelompok ini berbasis di pulau Jolo dan Basilan Selatan.<sup>74</sup>

Selama beberapa tahun terakhir, perairan Asia menempati posisi kedua dimana aktivitas perompakan sering terjadi. Laut Sulu menempati posisi kedua setelah Selat Malaka. Berdasarkan kategori ( CAT ) terdapat beberapa peningkatan kejahatan sejak tahun 2013 hingga tahun 2017 :

**GAMBAR 4.2.1 Tabel Kejahatan Maritim 2013 – 2017 berdasarkan CAT**

	2013	2014	2015	2016	2017
● CAT 1	0	0	0	6	2
● CAT 2	0	1	1	1	1
● CAT 3	1	0	0	0	3
● CAT 4	4	4	6	2	15
▲ Attempted	0	0	1	6	1
<b>Total</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>8</b>	<b>15</b>	<b>22</b>

Sumber : *ReCAAP Annual Report 2017*

Tabel diatas memberikan informasi jumlah tindak kejahatan maritim di Laut Sulu. Dimana pada tahun 2016 hingga tahun 2017 mengalami peningkatan jumlah total. Selain itu pada tahun 2016 hingga tahun 2017 terdapat penurunan angka pada beberapa CAT tertentu dan begitu juga sebaliknya.<sup>75</sup> Perompak memiliki modus operandi dalam melakukan aksinya, terdapat 2 kategori dalam upaya perompakan kapal antara lain ;

<sup>74</sup> Asia Tenggara Surga Bajak Laut. Sumber : <https://tirto.id/asia-tenggara-surga-bajak-laut-cvXA>. [ online ] diakses pada : 27 Agustus 2019

<sup>75</sup> ReCAAP ISC Annual Report 2016. Sumber : <http://www.recaap.org/resources/ck/files/reports/annual/annualreport2017.pdf>. [ online ] diakses pada : 27 Agustus 2019

a. Perompakan di Laut. Perompak yang melakukan operasi di laut memiliki sasaran perompakan yang berbeda. Umumnya perompak kapal untuk mencuri mesin, suku cadang dan barang pribadi milik pelaut. Pembajakan kapal tanker bertujuan untuk menjarah muatan kapal dan menjualnya kembali di pasar gelap.

Sedangkan cara untuk menyerang sasaran berasal dari perencanaan pemimpin perompak. Perompakan di Laut khususnya Asia secara luas dibagi menjadi beberapa kategori sebagai berikut ;

- Perampokan oleh kelompok bersenjata. Kelompok perampok ini biasa beroperasi pada saat penjangkaran kapal atau pada saat kapal sedang berada di titik pelayaran yang padat. Kelompok pelaku ini melakukan pencurian dan meninggalkan kapal tanpa diketahui.

- Pembajakan kapal. Kategori ini seringkali diidentikkan dengan penyedotan minyak dengan sasaran kapal tanker kecil berkecepatan rendah dan bermuatan khusus. Selain penyedotan bahan bakar, juga terdapat beberapa kasus dimana kapal diambil alih oleh pembajak dengan memutuskan sistem komunikasi, navigasi dan sistem operasi kapal dan menghilangkan identitas kapal lalu membiarkan awak kapal dari kapal tersebut di skoci.

b. Perompakan di Pelabuhan, *Anchorage* dan transfer kapal ke kapal ( STS ). Perompakan di pelabuhan, penjangkaran atau pada saat STS memiliki resiko lebih tinggi. Perompak seringkali menyamar sebagai kelompok nelayan untuk

mengetahui rute lintasan kapal dagang yang dijadikan sasaran, selain itu perompak lebih memilih melakukan operasi pada saat kondisi gelap atau minim pencahayaan.<sup>76</sup>

Banyaknya perompakan di Laut Sulu menyebabkan banyak kerugian dari berbagai pihak yang bersangkutan dan beberapa sektor. Akibat perompakan, Filipina harus menerima penangguhan ekspor batu bara yang dilakukan oleh Indonesia. Hal ini disebabkan karena diculiknya awak kapal Indonesia oleh kelompok perompak Filipina. Sejak maret tahun 2016 terhitung terdapat 4 kali insiden yang berlangsung.<sup>77</sup>

Selain terhentinya kegiatan ekspor impor batu bara antara Filipina dan Indonesia. Perusahaan pelayaran juga terkena dampaknya, kebijakan moratorium ekspor batu bara yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia menambah jumlah kapal dagang yang tidak beroperasi, khususnya rute Filipina – Indonesia. Moratorium batu bara merupakan hilangnya peluang besar perusahaan pelayaran Indonesia.<sup>78</sup>

Begitu juga dengan Malaysia, akibat adanya kasus perompakan Malaysia juga menerima dampak negatif di sektor pariwisata. Para wisatawan mancanegara memiliki kekhawatiran terhadap keselamatan dan keamanan mereka saat berlibur di Malaysia. Adanya perompakan yang juga disertai tindak kekerasan menyebabkan

---

<sup>76</sup> Modus Operandi. Sumber : ReCAAP Guide to Counter Piracy and Armed Robbery Against Ships.pdf. P. 3 - 4

<sup>77</sup> Govt evaluates coal exports to Philippines over abductions. Sumber : <https://www.thejakartapost.com/news/2016/07/13/govt-evaluates-coal-exports-to-philippines-over-abductions.html>. [ online ] diakses pada : 26 Agustus 2019

<sup>78</sup> Ekspor Batu Bara Tertunda, Industri Pelayaran Terancam Kian Lesu. Sumber : <https://ekonomi.bisnis.com/read/20160729/98/570111/ekspor-batu-bara-tertunda-industri-pelayaran-terancam-kian-lesu>. [ online ] diakses pada : 26 Agustus 2019

turis yang berkunjung ke Malaysia mengalami paranoid. Akibatnya jumlah kunjungan wisatawan menurun dibanding tahun tahun sebelumnya.<sup>79</sup>

#### 4.2.2 Penyelundupan Senjata Illegal.

Filipina selatan sebagai wilayah perairan dan juga perbatasan antara Filipina dan Indonesia merupakan wilayah yang cukup rentan. Pemerintah Indonesia cukup khawatir dengan kondisi tersebut, terlebih seiring dengan adanya perjanjian damai antara pemerintah Filipina dan *Moro Islamic Front Liberation* ( MILF ). Secara geografis Filipina dan Indonesia berbagi perbatasan laut lebih dari 1000 kilometer yang mencakup ratusan pulau di laut Sulawesi, Maluku, Halmahera dan selat Makassar.<sup>80</sup>

<sup>79</sup> Ayob, Norizawati Mohd . Issues of Safety and Security: New Challenging to Malaysia Tourism Industry. Sumber : [https://www.shs-conferences.org/articles/shsconf/pdf/2014/09/shsconf\\_4ictr2014\\_01083.pdf](https://www.shs-conferences.org/articles/shsconf/pdf/2014/09/shsconf_4ictr2014_01083.pdf). [ online ] diakses pada : 26 Agustus 2019

<sup>80</sup> Cegah Aliran Senjata Ilegal, Indonesia Tingkatkan Pengawasan Perbatasan. Sumber : <https://www.matamatapolitik.com/news-cegah-aliran-senjata-ilegal-indonesia-tingkatkan-pengawasan-perbatasan/>. [ online ] diakses pada : 26 Agustus 2019

**GAMBAR 4.2.2 : Rute Penyelundupan Senjata Filipina Malaysia Indonesia**



Sumber : *The Strait Times*.

Jalur diatas digunakan kelompok teroris untuk menyelundupkan senjata ke Indonesia. Pemerintah Indonesia khawatir apabila kasus penyelundupan ini semakin besar dengan lebih banyaknya senjata yang dibawa ke Indonesia. Meskipun pejuang MILF telah melakukan perjanjian untuk kembali menjadi masyarakat sipil pada umumnya. Kekhawatiran pemerintah Indonesia disebabkan oleh adanya 2 kelompok yang menggunakan jalur tersebut yaitu Jemaah Islamiyah yang menjadi otak dibalik Bom Bali 2002 dan Jemaah Ansharut Daulah yang namanya menjadi terkenal ketika melakukan serangan bom bunuh diri di Jakarta pada Januari 2016 dimana kedua kelompok ini menggunakan senjata yang dikirim dari Filipina.<sup>81</sup> Jenis jenis senjata yang sering diselundupkan antara Filipina, Indonesia dan Malaysia termasuk dalam jenis *Small Arms and Light Weapon* ( SALW ). *Small Arms* atau senjata kecil yang dirancang untuk penggunaan pribadi meliputi senapan mesin ringan, senapan sub-mesin, termasuk senapan mesin, senapan otomatis penuh dan senapan serbu, dan

<sup>81</sup> Ibid.

senapan semi-otomatis. *Light Weapons* atau senjata ringan dirancang untuk penggunaan berkelompok 2 hingga 3 orang meskipun beberapa diantaranya dapat digunakan perseorangan. Senjata ringan mencakup senapan mesin berat, peluncur granat genggam dan peluncur genggam, senjata anti-pesawat portabel, senapan anti-tank portabel, senapan recoilless, peluncur portabel sistem rudal dan roket anti-tank, peluncur portabel sistem rudal anti-pesawat, dan mortir kaliber kurang dari 100 mm.<sup>82</sup>

Tingginya angka terorisme dan gerakan separatis berkaitan erat dengan pemasokan senjata, meningkatnya konflik senjata dan pemberontakan juga berpengaruh pada peningkatan di Asia Tenggara. Hal ini mengancam stabilitas politik, keselarasan sosial dan stabilitas ekonomi. Menurut Zarina Othman terdapat 3 faktor dan penyebab adanya penyelundupan. Pertama penyelundupan dan perdagangan SALW pada umumnya dilakukan oleh aktor non negara.<sup>83</sup>

Aktivitas penyelundupan dan perdagangan SALW menimbulkan ancaman bagi negara karena sifatnya lintas batas dan memiliki akses pendanaan dari pendukungnya yang berada di luar negeri hal tersebut menyebabkan negara kesulitan menangani penyelundupan senjata. Faktor kedua, yaitu komunikasi dan *supply*. Perdagangan SALW terfokus pada pasar senjata Kamboja yang disebut dengan "grey area" sedangkan Thailand digunakan sebagai lokasi transit untuk transfer SALW. Faktor ketiga, yaitu posisi geografis. Hal ini memiliki peranan besar dalam aktivitas

<sup>82</sup> Small arms and light weapons control A training manual.

<sup>83</sup> Othman, Zarina. Non-Traditional Security Issues and the Stability of Southeast Asia.

penyelundupan dan perdagangan SALW semakin berkembang dengan lemahnya kebijakan penjagaan batas teritori baik di darat maupun di laut. Aktor negara dan aktor non negara harusnya menjalin kerjasama agar tindakan penyelundupan dapat diselesaikan.<sup>84</sup>

Dari tiga faktor diatas dapat disimpulkan bahwasanya perdagangan SALW di Asia Tenggara dapat mengacaukan pasar senjata resmi. Selain itu pertumbuhan produksi senjata yang melebihi batas selama ini dikendalikan oleh kartel narkoba.

Sehingga dapat disimpulkan kejahatan non tradisional yang terjadi memiliki kaitan erat dengan motif kejahatan transnasional yang lainnya.<sup>85</sup> SALW yang beredar antara Indonesia, Filipina dan Malaysia umumnya merupakan senjata rakitan individu atau perorangan dan bukan hasil dari industri senjata resmi, harga SALW yang beredar di ‘pasar gelap’ yang sangat murah sehingga menarik minat para pemberontak yang berasal dari Filipina, Malaysia maupun Indonesia. Kendala dihadapi saat membawa senjata selundupan ke wilayah tujuan, oleh karena itu tindakan suap kerap dilakukan kepada petugas bea cukai untuk melancarkan penyelundupan ke negara tujuan dengan penyimpanan kotak ikan di Pelabuhan Bitung, Sulawesi Utara.<sup>86</sup>

Senjata yang beredar di Filipina khususnya SALW dirakit oleh individu, sedangkan komponennya didapatkan perakitan dari industri senjata lokal, hasil

<sup>84</sup> Ibid.

<sup>85</sup> Ibid.

<sup>86</sup> Can Indonesia Keep Philippines Assault Rifles Out of Indonesian Militants' Hands?

Sumber : [https://www.vice.com/en\\_asia/article/bj5z9d/can-indonesia-keep-philippines-assault-rifles-out-of-indonesian-militants-hands](https://www.vice.com/en_asia/article/bj5z9d/can-indonesia-keep-philippines-assault-rifles-out-of-indonesian-militants-hands). [ online ] diakses pada : 26 Agustus 2019

penyelundupan dan sisa stok persenjataan milik gudang stok persenjataan milik pemerintah. Di Filipina industri senjata illegal berada di dua kota yaitu kota Danao dan kota Mandaue. Industri senjata lokal di dua kota tersebut umumnya beroperasi di halaman belakang rumah atau gubuk kemudian disalurkan kepada penjahat atau aktor *non state*.<sup>87</sup>

#### 4.2.3 Peredaran Narkotika atau Obat Obatan Terlarang

Drug trafficking merupakan salah satu kejahatan transnasional yang sangat mengkhawatirkan. Di Asia Tenggara sendiri terdapat wilayah *Golden Triangle* dimana wilayah ini meliputi perbatasan Myanmar, Thailand dan Laos. Di wilayah *Golden Triangle* heroin seberat 147 kilogram pernah ditemukan untuk diselundupkan dari Myanmar menuju Thailand. Perdagangan narkotika dan obat terlarang lainnya yang bersifat transnasional menyebabkan negara tidak bisa lepas dari sindikat perdagangan dan kejahatan narkoba.<sup>88</sup> Secara harfiah narkotika diartikan sebagai obat (seperti opium atau morfin) yang dalam dosis sedang menumpulkan indra, mengurangi rasa sakit, dan menginduksi tidur nyenyak, tetapi dalam dosis berlebihan menyebabkan pingsan, koma, atau kejang.<sup>89</sup>

<sup>87</sup> Wall, Hamish K. 2006. THE DYNAMICS OF SMALL ARMS TRANSFERS IN SOUTHEAST ASIAN INSURGENCIES. Thesis Master of Art in Political Science University Canterbury. P 82.

<sup>88</sup> Narkoba Mengancam? Peran ASEAN dalam Upaya Mengentikannya. Sumber : <https://kumparan.com/puji-sentosa/narkoba-mengancam-peran-asean-dalam-upaya-mengentikannya>. [ online ] diakses pada : 26 Agustus 2019

<sup>89</sup> Arti harfiah narkoba. Sumber : <https://www.merriam-webster.com/dictionary/narcotic>. [ online ] diakses pada : 26 Agustus 2019

## Konsumsi Narkoba dan jenis lainnya di wilayah Asia Timur dan Asia Tenggara

bisa dikatakan cukup tinggi, pada tahun 2013 Thailand sebagai negara dengan konsumsi narkoba, warga negara yang ditangkap dengan tuduhan penyalahgunaan narkoba umumnya mengonsumsi narkoba dengan jenis metamfetamin, pil atau kristal met. Metamfetamin menjadi opsi terbanyak konsumsi masyarakat Asia Tenggara dikarenakan membutuhkan lebih sedikit bahan kimia, pengaturan laboratorium dasar dan ahli kimia yang kompeten. Pemasaran metamfetamin di luar dosis medis secara ilegal tidak bisa berjalan sendiri, penjualan dalam jumlah besar membutuhkan jaringan kerjasama yang kuat antara laboratorium obat-obatan dan pejabat berwenang yang korup, sekelompok pengguna narkoba aktif dan potensial juga tunjangan geografis dan infrastruktur yang menguntungkan. Untuk memperlancar hubungan tiga komponen di atas pemberian suap sangat sering digunakan untuk memperlancar transaksi.<sup>90</sup>

Malaysia, Filipina dan Indonesia memiliki kecenderungan konsumsi metamfetamine lebih tinggi hal ini ditunjukkan dengan adanya lebih dari sepuluh ribu laporan terkait penyalahgunaan metamfetamine. Pada tahun 2016 negara-negara ASEAN menyumbang 75% kasus penyalahgunaan metamfetamin dari total 360.000 kasus yang dilaporkan.<sup>91</sup> Perkembangan teknologi yang pesat menyebabkan masyarakat lebih mudah untuk melakukan pembelian dan berkomunikasi, hal ini

<sup>90</sup> Sumber : <https://www.worldpoliticsreview.com/articles/27933/a-booming-meth-trade-challenges-southeast-asia-s-approach-to-drug-policy>. [ online ] diakses pada : 26 Agustus 2019

<sup>91</sup> ASEAN DRUG MONITORING REPORT 2016. Sumber : <https://asean.org/wp-content/uploads/2016/10/Doc6-ADM-Report-2016-as-of-15-November-2017-FINAL.pdf>. [ online ] diakses pada : 27 Agustus 2019

juga berpengaruh pada kemampuan pelaku kejahatan transnasional di bidang apapun khususnya peredaran obat-obatan terlarang dan narkoba.<sup>92</sup>

Kemajuan teknologi, tersedianya platform sosial media membuat pelaku semakin bebas berkomunikasi, menutupi identitas kejahatan dan aktivitas kriminal tanpa khawatir terdeteksi. Selain kemajuan teknologi, oknum pemerintahan yang korup juga mempersulit pihak berwenang untuk meringkus pelaku.<sup>93</sup> UNODC ( *United Nation Office on Drugs and Crime* ) mencatat pada tahun 2016 produksi dan peredaran narkoba dan produk turunannya mencapai angka 31.3 miliar USD.

Dimana angka tersebut mencapai lebih dari sepertiga dari total angka perdagangan ilegal di sektor yang lain.<sup>94</sup>

Selain kemajuan di bidang teknologi, dari segi geografis Asia Tenggara merupakan lokasi yang sangat strategis dan lebih mudah untuk melakukan aktivitas penyelundupan menuju Timur Tengah, Jepang dan Australia. Laut Sulu – Sulawesi sendiri juga menjadi jalur perdagangan atau penyelundupan narkoba khususnya pada jenis Sabu, Heroin dan *Marijuana*. Abu Sayyaf Grup memiliki peran dalam mengedarkan narkoba dan obat-obatan terlarang, hal tersebut dikarenakan Abu

<sup>92</sup> Transnational Organized Crime in Southeast Asia: Evolution, Growth and Impact. Sumber : [https://www.unodc.org/documents/southeastasiaandpacific//Publications/2019/SEA\\_TOCTA\\_2019\\_web.pdf](https://www.unodc.org/documents/southeastasiaandpacific//Publications/2019/SEA_TOCTA_2019_web.pdf). [ online ] diakses pada : 27 Agustus 2019

<sup>93</sup> Ibid.

<sup>94</sup> Drug trafficking trends & border management in southeast Asia : “responding to an evolving context of regional integration”. Sumber : [https://www.unodc.org/documents/ungass2016/CND\\_Preparations/Brown\\_Bag\\_lunch/Asia/2014.11..19\\_CND\\_preparation\\_for\\_UNGASS\\_2016\\_final.pdf](https://www.unodc.org/documents/ungass2016/CND_Preparations/Brown_Bag_lunch/Asia/2014.11..19_CND_preparation_for_UNGASS_2016_final.pdf). [ online ] diakses pada : 27 Agustus 2019

Sayyaf Grup memiliki keterkaitan dengan jaringan pengedar yang berasal dari Hongkong untuk menyelundupkan Sabu dan jenis narkotika lainnya ke Filipina dan wilayah Asia Tenggara lainnya.<sup>95</sup>

#### 4.2.4 Terorisme Dan Gerakan Separatisme

Pasca kejadian 9/11 wilayah Asia Tenggara dicap sebagai “*second front*” dalam kebijakan luar negeri *Global War on Terror* Amerika Serikat. Hal ini dikarenakan eksistensi kelompok separatis Islam yang memiliki hubungan atau jaringan dengan Al Qaeda selaku domatur beberapa gerakan separatis di Asia Tenggara. Pada tahun 2011 *United States Counter Terrorism Center* memaparkan bahwasanya Filipina dan Thailand merupakan basis dari kelompok teroris di Asia Tenggara. Meskipun tidak termasuk pada daftar negara basis kelompok teroris, Indonesia turut menjadi perhatian dikarenakan mengalami dampak atas aktivitas yang dilakukan kelompok tersebut.<sup>96</sup> Di beberapa negara Asia Tenggara terdapat kelompok teroris atau separatis, hanya saja Abu Sayyaf Grup merupakan kelompok yang paling populer diantara yang lain. Abu Sayyaf Grup merupakan kelompok Teroris yang berasal dari Filipina. Dalam menjalankan operasionalnya menjadi kelompok teroris, Abu Sayyaf Grup juga melakukan beberapa kejahatan transnasional seperti penyelundupan barang terlarang dan pembajakan kapal yang melintasi Laut Sulu. Selain Abu Sayyaf Grup, juga terdapat RSIM atau *Rajah Solaiman Islamic Movement* dimana kelompok ini

<sup>95</sup> LaVerle Berry, et al, “A Global Overview of Narcotics-Funded Terrorist and Other Extremist Group”, the library of congress may 2002, 105

<sup>96</sup> Othman, Zarina. Non-Traditional Security Issues and the Stability of Southeast Asia. *Jurnal Kajian Wilayah*, Vol. 4, No. 2, 2013, Hal. 157.

merupakan kelompok ekstrimis Islam yang berupaya untuk memaksa penganut agama Kristen untuk berpindah keyakinan pada agama Islam.<sup>97</sup> Di Indonesia terdapat

JII atau Jemaah Islamiyah kelompok teroris ini berbasis di provinsi Jawa Tengah, didirikan oleh Abu Bakar Baasyir dengan membentuk pondok pesantren atau sekolah dengan dasar pendidikan agama Islam. Di dalam pesantren tersebut pelajarannya diberikan atau diajarkan paham paham radikal. Kelompok teroris yang tersebar di Asia Tenggara diduga memiliki hubungan atau terikat jaringan dengan Al Qaeda.<sup>98</sup>

#### 4.3 Kategori Kejahatan Maritim / CAT

Kejahatan yang terjadi di Laut Sulu dan di Laut lainnya tidak bisa disamaratakan. Tindakan kejahatan maritim yang terjadi dengan berbagai motif pada dasarnya dibagi menjadi empat kategori atau CAT. Tindak kejahatan pada ketogori CAT 1 melibatkan 9 orang pelaku dengan perlengkapan senjata api atau senjata tajam sedangkan kru kapal yang menjadi korban atau sandera kemungkinan mengalami cedera akibat tindak kekerasan yang dilakukan oleh pelaku. Kerugian yang dialami pada tipe kejahatan tipe CAT 1 antara lain diambilnya muatan kapal, jika membajak

<sup>97</sup> Non-Traditional Threats and Maritime Domain Awareness in the Tri-Border Area of Southeast Asia.

Sumber : [https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/occasional\\_papers/2012/RAND\\_OP372.pdf](https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/occasional_papers/2012/RAND_OP372.pdf). [ online ] diakses pada : 27 Agustus 2019

<sup>98</sup> Ibid.

kapal tanker perompak akan menyedot bahan bakar baik untuk muatan atau untuk operasional.<sup>99</sup>

Pada CAT 2 pelaku kejahatan berkisar antara 4 hingga 9 orang dengan perlengkapan senjata konvensional seperti pisau atau parang atau hanya sebagian kecil menggunakan senjata api atau senjata modern. Sandera mengalami kekerasan fisik namun tidak separah pada CAT 1, sedangkan kerugian antara lain kehilangan uang tunai, hilangnya suku cadang kapal atau mesin mesin kapal dimana pencurian ini dilakukan pada saat awak kapal disandera atau disekap.<sup>100</sup>

CAT 3 merupakan penyerangan kapal yang dilakukan oleh perompak dengan anggota 1 hingga 6 orang. Perlengkapan atau senjata yang digunakan antara lain pisau, parang atau benda lain seperti kayu atau tongkat. Perbedaan terletak pada jumlah korban. Dalam CAT 3 awak kapal jarang sekali mengalami cedera sedangkan kerugiannya yaitu raibnya suku cadang kapal.<sup>101</sup>

Pada kategori terakhir atau CAT 4 pelaku kejahatan tidak dilengkapi dengan senjata sedangkan pelakunya tidak lebih dari 3 orang. Awak kapal tidak disandera dan kapal tidak mengalami kerugian apapun, hal tersebut dikarenakan pelaku

<sup>99</sup> APRIL 2018 PIRACY AND ARMED ROBBERY AGAINST SHIPS IN ASIA. Sumber : [http://www.recaap.org/resources/ck/files/reports/monthly/2018/ReCAAP%20ISC%20April%202018%20Report\(1\).pdf](http://www.recaap.org/resources/ck/files/reports/monthly/2018/ReCAAP%20ISC%20April%202018%20Report(1).pdf). [ online ] diakses pada : 27 Agustus 2019

<sup>100</sup> Ibid.

<sup>101</sup> Ibid.

langsung melarikan diri ketika melihat awak kapal sedang mendapati mereka yang mendekati kapal.<sup>102</sup>



<sup>102</sup> Ibid.

**BAB V****PROSES PENGAMANAN MARITIM MELALUI TRILATERAL  
COOPERATION AGREEMENT ( TCA ) DI WILAYAH LAUT SULU PADA  
TAHUN 2016 – 2017 MENGGUNAKAN KONSEP COOPERATIVE SECURITY**

Dalam upaya pengamanan dan penanggulangan Laut Sulu, Negara yang memiliki perbatasan langsung sebenarnya perlu mengenali dan memahami terlebih dahulu bagaimana kondisi *real* lokasi yang dijadikan sebagai objek pengamanan antar negara yaitu Malaysia, Filipina dan Indonesia. Pengenalan medan atau lokasi *real* lebih awal memudahkan pihak yang berkepentingan untuk memproyeksikan hal apa yang harus dilakukan. Berikutnya adalah pengenalan terhadap tren kejahatan yang sedang terjadi dan siapa aktor yang berada dibalik aktivitas kejahatan tersebut. Telah dijelaskan pada bab sebelumnya apa saja ancaman yang terjadi di lokasi dan aktor yang bertindak di belakangnya.

Pada bab V penulis akan menjelaskan dan menguraikan bagaimana proses yang ditempuh oleh anggota TCA dalam mengamankan Laut Sulu dimana wilayah ini merupakan wilayah perairan yang berbatasan langsung dengan Malaysia, Filipina dan Indonesia.

Dalam bab ini penulis akan meneliti dan menjabarkan bagaimana proses yang ditempuh oleh Malaysia, Filipina dan Indonesia dalam mengamankan wilayah Laut Sulu pada tahun 2016 hingga tahun 2017. Adapun alat atau konsep yang digunakan

untuk menjabarkan proses pengamanan Laut Sulu oleh Malaysia, Filipina dan Indonesia yakni dengan menggunakan konsep *Cooperative Security* yang dijelaskan oleh Michael Moodie. Melalui konsep penulis kemudian akan menjabarkan pada variabel yang dapat digunakan untuk melihat bagaimana kinerja Malaysia, Filipina dan Indonesia dalam kerjasama TCA secara utuh, antara lain ; (1) *Exploiting Changes*, (2) *Overcoming Impediment* dan (3) *Respond to Challenges*.

*Cooperative Security* yang dijelaskan oleh Michael Moodie menekankan negara harusnya lebih aktif satu sama lain jika berada dalam satu lingkup regional hal tersebut perlu dilakukan untuk memperkuat dukungan apabila negara memiliki kepentingan, selain itu Michael Moodie juga menjelaskan kerjasama keamanan merupakan pendekatan yang perlu dilakukan sebagai fondasi utama kerjasama melalui penanaman nilai atau norma yang dianut bersama. Selain itu *Cooperative Security* juga melibatkan aktor non negara atau NGO dalam merumuskan strategi atau kebijakan yang diambil oleh negara dengan orientasi masa depan. Selain meminimalisir penggunaan militer, *Cooperative Security* juga memiliki tujuan untuk membangun kepercayaan negara mitra melalui transparansi yang dilakukan pada forum dialog.<sup>103</sup>

Baik Malaysia, Filipina dan Indonesia dalam melakukan pengamanan terhadap Laut Sulu akan melakukan beberapa perubahan di dalam pemerintahannya masing

<sup>103</sup> Moodie, Michael. *Cooperative Security: Implications for National Security and International Relations*. Sumber : [https://www.sandia.gov/cooperative-monitoring-center/\\_assets/documents/sand98-050514.pdf](https://www.sandia.gov/cooperative-monitoring-center/_assets/documents/sand98-050514.pdf) ( online ) diakses pada : 28 Agustus 2019

masing. Perubahan yang dilakukan meliputi bagaimana melihat trend ancaman yang ada di wilayah sekitar negara yang melakukan kerjasama keamanan, alokasi anggaran di sektor pertahanan atau militer serta pembuatan kebijakan domestik maupun luar negeri dari masing masing negara yang melakukan kerjasama keamanan.

### 5.1. *Exploiting Changes*

Melalui konsep *Cooperative Security* Michael Moodie menjelaskan bahwa *Exploiting Changes* merupakan upaya yang dilakukan dengan melakukan eksplorasi mengenai hal apa saja yang perlu dilakukan perubahan untuk mengamankan wilayah perairan dalam lingkup kerjasama antar negara. Negara yang bekerjasama awalnya harus melakukan proyeksi mengenai trend ancaman yang sedang mengintai wilayah teritori mereka. Adanya perubahan trend ancaman adalah faktor yang mendorong negara untuk bekerja sama khususnya di sektor keamanan, ancaman keamanan yang terjadi di Laut Sulu merupakan ancaman non tradisional dimana pelakunya merupakan aktor *non state* yang beraktivitas di lintas negara dan terlibat dalam banyak aktivitas kejahatan maritim di Laut Sulu.

Selain trend ancaman, terdapat beberapa hal yang kemudian ikut berubah antara lain, *budgeting* di sektor pertahanan setiap negara anggota kerjasama akan melakukan perubahan anggaran atau alokasi biaya di sektor pertahanan, hal ini dikarenakan kebutuhan negara yang sedang melakukan kerjasama khususnya di sektor keamanan akan berbeda dibandingkan dengan negara yang tidak melakukan kerjasama keamanan. Biaya koordinasi yang diperlukan dalam melakukan kerjasama.

Berikutnya juga terdapat penilaian keunggulan di sektor ekonomi masing masing negara yang akan melakukan kerjasama. Kesiapan ekonomi negara yang melakukan kerjasama keamanan juga perlu diperhatikan, kesiapan ekonomi suatu negara juga akan berpengaruh pada keberlangsungan negara yang melakukan kerjasama keamanan maritim, kesiapan ekonomi juga mencakup ketersediaan forum bagi negara yang melakukan kerjasama untuk menyampaikan pendapat atau merancang beberapa rencana yang akan dilakukan dalam beberapa waktu kedepan. Selain itu kesiapan masing masing negara dalam merumuskan kebijakan juga menjadi hal yang vital bagi berjalannya kerjasama keamanan yang dilakukan oleh negara. Perumusan kebijakan mencakup dua hal yaitu kebijakan luar negeri dan kebijakan domestik masing masing negara yang melakukan kerjasama keamanan. Kebijakan luar negeri seringkali dianggap sebagai cerminan dan kebutuhan dari kepentingan domestik suatu negara, hal tersebut menjadi faktor pendorong negara untuk melakukan kerjasama keamanan.

Pada dasarnya *Exploiting Changes* yang dijelaskan oleh Micahel Moodie lebih menekankan pada kesiapan masing masing negara anggota kerjasama untuk melakukan kerjasama keamanan baik dari segi proyeksi dan pemetaan ancaman keamanan maritim yang terjadi di Laut Sulu, kesiapan ekonomi masing masing negara yang kemudian berpengaruh pada perkembangan sektor ekonomi dan ketersediaan forum untuk merancang rencana kerjasama yang akan dilakukan selama

waktu yang disepakati dan kebijakan masing masing negara baik dari segi kebijakan luar negeri dan kebijakan domestik.<sup>104</sup>

### 5.1.1 *Conceptual Challenges.*

Kerjasama keamanan yang dijelaskan oleh Michael Moodie dilakukan karena banyaknya pergeseran trend ancaman keamanan menjadi faktor pendorong negara negara yang akan melakukan kerjasama. Pergeseran *trend* ancaman keamanan yang terjadi yaitu negara negara sudah tidak lagi merasa terancam dengan keberadaan negara tetangganya bahkan perang antar negara, akan tetapi negara mendefinisikan ancaman serius dengan adanya kerusakan lingkungan, isu permasalahan ekonomi, demografis serta gangguan kehidupan keluarga dan masyarakat. Kerusakan ekologis seperti kekeringan dan penyakit menular dan kelangkaan pangan dianggap sebagai alat pembunuh manusia yang paling ampuh daripada senjata perang, permasalahan demografis dianggap serius karena dianggap sebagai faktor baru yang berhubungan dengan pengungsi dan migrasi juga konflik kontemporer. Keamanan non tradisional juga menambah panjang kasus kejahatan transnasional seperti perdagangan narkoba, kejahatan transnasional, penyelundupan dan pembajakan. Kerjasama TCA ( *Trilateral Cooperation Agreement* ) merupakan tindak lanjut adanya ancaman keamanan yang terjadi di wilayah perairan Malaysia, Filipina dan Indonesia yang

<sup>104</sup> Moodie, Michael. Sumber : Cooperative Security: Implications for National Security and International Relations. Hal. 6

cukup beragam antara lain peningkatan ancaman kelompok kelompok ekstrimis bersenjata dan adanya persengketaan wilayah perairan Laut Cina Selatan.<sup>105</sup>

Beberapa kejahatan yang terjadi di wilayah Laut Sulu banyak dilakukan oleh kelompok pelaku kejahatan transnasional antara lain, MILF ( *Moro Islamic Liberation Front* ), Abu Sayyaf Grup, Jemaah Islamiyah dan beberapa gerakan separatis yang masih memiliki jaringan dengan Al Qaeda. Dari sekian banyak kegiatan terorisme, Abu Sayyaf Grup dianggap kelompok yang paling sukses melakukan menjalankan tindakan terorisme dan separatism. Hal tersebut dikarenakan Abu Sayyaf Grup memiliki beberapa jaringan bisnis illegal yang beroperasi lintas negara. Terorisme, pemberontakan maupun seperatisme yang dilakukan oleh beberapa kelompok di Filipina pada umumnya berasal dari ketidakpuasan masyarakat atas sikap pemerintah.<sup>106</sup>

Penulis akan menekankan awal munculnya terorisme dan separatisme di Filipina karena hal ini berkaitan dengan munculnya kejahatan maritim di Laut Sulu yang menjadi fokus lokasi penelitian penulis. Awal munculnya separatisme dan pemberontakan di Filipina berawal dari ketidakpuasan bangsa Moro di Filipina. Kata Moro sendiri merupakan konotasi negative yang ditujukan kepada masyarakat penganut agama Islam di Mindanao. Pada masa kepemimpinan Nur Misuari,

<sup>105</sup> Challenges to regional security: Territory and terrorism. Sumber :

<https://www.bworldonline.com/challenges-to-regional-security-territory-and-terrorism/>. [ online ] diakses pada : 28 Agustus 2019

<sup>106</sup> Sobandi, Khairu Roojiqien. Separatisme di Asia Tenggara: Antara Penguasa dan Gerakan Nasionalis Kelompok Minoritas. Jurnal Kajian Wilayah, Vol. 2, No. 1, 2011, Hal.40

terminologi Moro merujuk pada perjuangan etno – nasionalis melawan orang Filipina

Kristen imperialis yang dipimpin oleh birokrat pusat Manila beserta elit militernya.

Separatis ini berlandung di bawah bendera *Moro National Liberation Front* (MNLF)

dan mendapatkan banyak dukungan dari orang-orang muslim pada saat itu.

Bangsa Moro memiliki karakteristik yang berbeda dengan Filipina dimana

wilayahnya dipimpin dengan model Kesultanan, dimana pemimpinnya dianggap

sebagai sultan yang merupakan perwakilan tuhan. Dengan alasan tersebut bangsa

Moro memiliki gagasan untuk mendirikan negara sendiri dan melepaskan diri dari

Filipina. Adapun Moroland sendiri membawahi beberapa wilayah yaitu Sulu, Lanao

dan Maguindanao<sup>107</sup>

Berikutnya gerakan *Moro Islamic Liberation Front* (MILF), gerakan ini

merupakan pecahan dari MNLF. Berpusat di Mindanao, MILF memiliki ribuan

pejuang dan dukungan dari rakyat di desa-desa. Perbedaan yang mencolok dengan

MNLF yaitu MILF mengisi posisi kepemimpinannya dengan lebih banyak ulama

ulama Islam.<sup>108</sup> Selain itu, MILF juga memiliki kekuatan militer dan menimbulkan

gencatan senjata beberapa kali dengan pemerintah Filipina sejak tahun 1996 hingga

tahun 2000.<sup>109</sup> Gerakan separatis yang dilakukan oleh MILF pada akhirnya

membuahkan perjanjian damai antara pemerintah Filipina dan anggota MILF. Hanya

saja hal tersebut tidak benar-benar diimplementasikan secara sempurna. Hal ini

<sup>107</sup> Ibid. Sobandi, Khairu Roojiqien. Hal. 41

<sup>108</sup> Muslim Separatists in the Southern Philippines. Sumber : <https://asiasociety.org/muslim-separatists-southern-philippines>. [online] diakses pada : 28 Agustus 2019

<sup>109</sup> Ibid. Muslim Separatists in the Southern Philippines.

dikarenakan perjanjian damai dengan pemerintah Filipina tidak tercapai dan banyak dari mantan anggota MILF bergabung dan memproklamkan diri sebagai anggota relawan ISIS, khususnya para kader muda yang dulu pernah bergabung dengan MILF. Selama 40 tahun konflik separatis di Mindanao menyebabkan tewasnya 120 ribu jiwa dan jutaan orang terlantar. Hingga pada tahun 2014 pemerintah Filipina melakukan perjanjian damai dengan MILF yaitu *Comprehensive Agreement on Bangsamoro* dimana isi perjanjian ini menjanjikan peningkatan otonomi politik, pembagian sumber daya yang lebih adil dan demobilisasi mantan kombatan separatis.<sup>110</sup>

Pada saat ini kelompok separatis berkembang menjadi kelompok yang banyak diilhami oleh ISIS, hal ini mendorong negara untuk melakukan kerjasama multilateral bagi negara yang berada disekitar Laut Sulu. Pada Januari 2018, enam negara anggota ASEAN meluncurkan inisiatif “*Our Eyes*” dimana inisiatif ini memiliki mekanisme dimana pejabat pertahanan senior akan melaporkan dan bertukar informasi mengenai perkembangan kelompok separatis yang mereka pantau setiap 2 minggu sekali.<sup>111</sup>

Selain bergabung dengan inisiatif “*Our Eyes*” Presiden Filipina Rodrigo juga memberikan izin kepada pasukan TNI AL, Angkatan Laut kerajaan Malaysia (RMN) untuk memasuki teritori apabila menemukan petunjuk pergerakan dari aktivitas

<sup>110</sup> Franco, Joseph. Philippines: Addressing Islamist Militancy after the Battle for Marawi.

Sumber : <https://www.crisisgroup.org/asia/south-east-asia/philippines/philippines-addressing-islamist-militancy-after-battle-marawi>. [ online ] diakses pada : 28 Agustus 2019

<sup>111</sup> Transnational Security in the Sulu Sea: Something New or Something Old?. Sumber : [https://centreasia.eu/wp-content/uploads/2019/01/9-Franco-SécuritéSulu\\_Juin2018.pdf](https://centreasia.eu/wp-content/uploads/2019/01/9-Franco-SécuritéSulu_Juin2018.pdf). [ online ] diakses pada : 28 Agustus 2019

kelompok separatisme atau terorisme. Duterte juga menjelaskan unit Angkatan Laut dari 3 negara baik Indonesia, Malaysia dan Filipina akan terus melakukan koordinasi tanpa batas waktu hingga masalah ini selesai dan berakhir.<sup>112</sup>

Selain konflik separatis, juga terdapat kejahatan maritim transnasional. Kasus ini terus berlanjut dan meningkat, ancaman kejahatan maritim yang terjadi memiliki motivasi ekonomi dimana aktivitasnya berfokus pada aktivitas pembajakan, penyelundupan dan migrasi. Aktivitas kejahatan maritim transnasional memiliki dampak antar negara baik dari segi konflik antar negara maupun kekerasan non politik. Adanya kejahatan maritim transnasional memungkinkan para gerilyawan dan teroris untuk memindahkan senjata dan personel, mengumpulkan dana dan merekrut anggota baru. Teroris Islam diduga kuat menggunakan rute laut Sulawesi untuk beroperasi memindahkan bahan peledak dan senjata api antara Indonesia, Filipina dan Malaysia.<sup>113</sup>

Perompakan dan pembajakan yang terjadi menyebabkan gangguan pada stabilitas pelayaran. Pada saat pelayaran perompak yang berbahaya bagi awak kapal melakukan aktivitas kejahatannya dengan menyusup ke kapal dengan cara sembunyi sembunyi kemudian mengambil barang barang berharga seperti uang tunai, perhiasan atau peralatan elektronik. Dalam bentuk pembajakan, kasus yang mengerikan yaitu

<sup>112</sup> Ibid. Franco, Joseph

<sup>113</sup> Bradford, John. Southeast Asian maritime security in the age of terror : threats, opportunity, and charting the course forward. (RSIS Working Paper, No. 75). Singapore: Nanyang Technological University.

Sumber : [https://dr.ntu.edu.sg/bitstream/handle/10220/4474/RSIS-WORKPAPER\\_78.pdf?sequence=1&isAllo](https://dr.ntu.edu.sg/bitstream/handle/10220/4474/RSIS-WORKPAPER_78.pdf?sequence=1&isAllo) wed=y. [ online ] diakses pada : 28 Agustus 2019

penjahat membajak seluruh kapal, membunuh awak kapal, memindahkan isi kargo bahkan mengubah identitas kapal. Seiring berjalannya waktu pembajakan semakin menunjukkan perkembangannya dan perompak menunjukkan kemampuan yang lebih kompleks untuk mengambil benda-benda milik awak kapal. Selain membahas kemampuan pembajakan dengan segala kemampuannya, pembajakan juga memiliki keterkaitan dengan terorisme. Beberapa pejabat meyakini bahwasanya kelompok terorisme bekerja sama bersama perompak dengan mengadopsi teknik mereka untuk diimplementasikan pada operasi serangan besar.<sup>114</sup>

Kelompok Abu Sayyaf Grup menjadi sasaran pada periode 15 tahun terakhir, hal ini dikarenakan banyaknya kecelakaan atau kerugian yang disebabkan oleh kelompok tersebut. Salah satu penyebab *Trilateral Cooperation Agreement* (TCA) dilakukan dikarenakan munculnya pembajakan laut oleh kelompok jihadis dimana kelompok ini menyebabkan 14 orang nelayan Indonesia diculik dalam dua insiden terpisah. Selain kelompok nelayan Indonesia yang menjadi korban penculikan, kelompok berasal dari Kanada juga menjadi korban penculikan. Penculikan yang dilakukan kelompok jihadis bernama Abu Sayyaf Grup ini melakukan operasinya di sekitar pulau Mindanao, Palawan dan Kepulauan Sulu. Sedangkan jalur tersebut menjadi jalur angkut muatan Batu Bara dari Indonesia menuju Filipina.<sup>115</sup>

<sup>114</sup> Ibid. Bradford, John.

<sup>115</sup> Indonesia, Philippines, and Malaysia Agree to Anti-Piracy Patrols. Sumber : <https://www.centerforsecuritypolicy.org/2016/05/06/indonesia-philippines-and-malaysia-agree-to-anti-piracy-patrols/>. [ online ] diakses pada : 28 Agustus 2019

Adapun jumlah pasokan Batu Bara Indonesia yang dimuat menuju Filipina menutup 70% kebutuhan pasokan Batu Bara Filipina. Terdapat beberapa angka yang disebutnya oleh para analis antara lain barang dagang yang dimuat dan melalui Laut Sulu mencapai nilai 40 juta USD termasuk kapal tanker dari Samudera Hindia yang tidak dapat memasuki wilayah Selat Malaka yang sangat ramai.<sup>116</sup>

Adanya jumlah kerugian yang sangat tinggi akibat dari tindak kejahatan maritim baik perompakan, pembajakan dan terorisme mendorong negara negara TCA yaitu Malaysia, Filipina dan Indonesia untuk membentuk suatu forum yang membahas bagaimana upaya pengamanan di wilayah Laut Sulu, koordinasi pemantauan wilayah yang menjadi objek pemantauan serta melakukan diskusi mengenai perkembangan ekonomi, dimana perkembangan ekonomi negara negara anggota kerjasama keamanan merupakan salah satu faktor penentu berlanjut atau tidaknya suatu anggota dalam sebuah kerjasama koordinasi keamanan.

### 5.1.2 *Primacy of Economics Domestic.*

Kemampuan dan kesiapan ekonomi menjadi pertimbangan negara dalam melakukan kerjasama keamanan. Pasca perang dingin kemampuan ekonomi dipandang sangat penting selain dari kemampuan militernya, dua hal tersebut menjadi juga menjadi standar kekuatan suatu negara dalam komunitas internasional. Pentingnya kekuatan ekonomi dalam lingkungan atau komunitas internasional diilustrasikan dengan adanya forum forum di tingkat regional, salah satunya di

<sup>116</sup> Ibid.

ASEAN yang dikenal dengan ARF ( *ASEAN Regional Forum* ) dimana forum ini membahas situasi keuangan saat ini dan faktor faktor penyebab krisis serta cara melakukan kerjasama yang lebih dekat dalam menghadapi berbagai tantangan. Kekuatan ekonomi suatu negara pada era pasca perang dingin dijadikan sebuah standar untuk mengukur kemampuan suatu negara untuk terus bertahan. Lingkungan politik regional yang stabil dan aman dibutuhkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan. Bahkan beberapa negara yang terikat dalam kerjasama tetap memperhatikan perkembangan ekonomi meskipun ada perselisihan antar anggota kerjasama.<sup>117</sup>

Negara anggota *Trilateral Cooperation Agreement* ( TCA ) dalam melakukan kerjasama keamanan maritim di Laut Sulu tetap melakukan kontrol terhadap kondisi ekonomi masing. Selain itu adanya kerjasama keamanan dianggap memiliki kontribusi positif bagi negara anggotanya apabila kinerja ekonominya meningkat, tetapi apabila dengan adanya kerjasama keamanan membuat negara anggotanya mengalami penurunan performa ekonomi, secara tidak langsung kerjasama keamanan dianggap sebagai beban baru bagi negara anggota. Berdasarkan laporan perkembangan ekonomi dari World Bank baik Indonesia, Malaysia dan Filipina memiliki perkembangan ekonomi yang baik dan terus meningkat sejak tahun 2015 dimana kerjasama *Trilateral Cooperation Agreement* ( TCA ) bahkan belum dimulai hingga tahun 2017 dimana *Trilateral Maritime Patrol* ( TMP ) yang merupakan sub dari

<sup>117</sup> Loc. Cit. Moodie, Michael.

*Trilateral Cooperation Agreement* ( TCA ) sudah dibentuk pertumbuhan ekonomi dari Malaysia, Filipina dan Indonesia terus membaik.<sup>118</sup>

Dalam penelitian ini penulis menilai perkembangan negara baik Filipina, Malaysia dan Indonesia menggunakan ukuran GDP ( *Gross Domestic Product* ) dimana GDP merupakan jumlah keseluruhan pendapatan negara yang berasal dari dalam negeri baik produksi milik perusahaan negeri maupun perusahaan asing yang beroperasi di negara tersebut. GDP sendiri berdasarkan hasil produk jadi atau produk jasa tanpa menghitung proses produksi, hal tersebut dilakukan untuk menghindari penghitungan ganda GDP. umumnya GDP suatu negara dihitung per tahun namun beberapa negara atau lembaga tertentu menghitung GDP setiap 4 bulan sekali.<sup>119</sup>

Filipina sebagai negara yang secara yuridis memiliki teritori Laut Sulu, lokasi yang dijadikan operasi *Trilateral Maritime Patrol* ( TMP ) bersama dengan Malaysia dan Indonesia menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang positif. Adapun sumber pendapatan Filipina didominasi oleh 3 sektor usaha yaitu sektor pertanian dan perikanan, sektor manufaktur dan sektor jasa.<sup>120</sup> 3 sektor usaha tersebut sangat berpengaruh pada pendapatan GDP Filipina dengan perolehan GDP sebanyak

<sup>118</sup> World Bank national accounts data, and OECD National Accounts data files.

Sumber : <https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD?end=2017&locations=ID-MY-PH&start=2015&view=chart>. [ online ] diakses pada : 28 Agustus 2019

<sup>119</sup> Gross Domestic Product and How It Affects You. Sumber : <https://www.thebalance.com/what-is-gdp-definition-of-gross-domestic-product-3306038>. [ online ] Sumber : [https://dr.ntu.edu.sg/bitstream/handle/10220/4474/RSIS-WORKPAPER\\_78.pdf?sequence=1&isAllowed=y](https://dr.ntu.edu.sg/bitstream/handle/10220/4474/RSIS-WORKPAPER_78.pdf?sequence=1&isAllowed=y). [ online ] diakses pada : 28 Agustus 2019

<sup>120</sup> Philippine National Accounts 2015 – 2018 ( Q4 ).PDF

284.371 juta USD pada tahun 2016 kemudian pada tahun 2017 memperoleh GDP sebanyak 303.360 juta USD.<sup>121</sup>

Berikutnya adalah perkembangan ekonomi Malaysia, negara ini bermitra dengan Filipina dan banyak melakukan ekspor karet dan sebagian batu bara untuk memenuhi kebutuhan Filipina. Sumber pendapatan Malaysia didominasi 2 sektor utama yaitu sektor jasa dan sektor manufaktur. Sektor manufaktur mencakup industri elektrik dan elektronik, industri konstruksi dan industri otomotif. Sektor manufaktur memiliki peranan penting bagi Malaysia karena selain menyumbang GDP dengan porsi yang cukup besar, sektor manufaktur juga mempekerjakan 40% dari total populasi penduduk Malaysia.<sup>122</sup> Industri manufaktur dan jasa membawa Malaysia mendapatkan total GDP sebanyak 344.272 juta USD pada tahun 2016 kemudian mengalami peningkatan sebanyak GDP sebanyak 364.574 juta USD pada tahun 2017.<sup>123</sup>

Berikutnya Indonesia, sebagai negara kepulauan yang dihubungkan oleh lautan dan perairan Indonesia memiliki wilayah teritori lebih besar dan lebih luas dari Malaysia dan Filipina. Indonesia memiliki 3 sektor usaha utama yang berkontribusi pada pendapatan GDP, antara lain sektor jasa yang menyumbang sekitar 43% dari

<sup>121</sup> Loc.cit. World Bank national accounts data, and OECD National Accounts data files.

<sup>122</sup> The Biggest Industries In Malaysia. Sumber : <https://www.worldatlas.com/articles/the-biggest-industries-in-malaysia.html>. [ online ] Sumber : [https://dr.ntu.edu.sg/bitstream/handle/10220/4474/RSIS-WORKPAPER\\_78.pdf?sequence=1&isAllowed=y](https://dr.ntu.edu.sg/bitstream/handle/10220/4474/RSIS-WORKPAPER_78.pdf?sequence=1&isAllowed=y). [ online ] diakses pada : 28 Agustus 2019

<sup>123</sup> Loc cit. World Bank national accounts data, and OECD National Accounts data files.

total pendapatan GDP, sektor industri yang menyumbang 39% pada pendapatan GDP dan sisanya adalah sektor pertanian yang menyumbang 13% pada pendapatan GDP.

Urutan kontribusi pendapatan GDP berdasarkan sektor di Indonesia bersifat stabil sehingga dalam 10 tahun tidak mengalami perubahan.<sup>124</sup> Adapun pertumbuhan ekonomi Indonesia jika dilihat dari pendapatan GDP Indonesia mengalami sedikit peningkatan, pada tahun 2016 Indonesia mendapatkan 1.038 milyar USD kemudian mendapatkan peningkatan pendapatan GDP pada tahun 2017 sebanyak 1.090 milyar USD pada tahun 2017.<sup>125</sup>

Kerjasama keamanan maritim yang dilakukan oleh Malaysia, Filipina dan Indonesia dalam mengupayakan keamanan Laut Sulu tentunya telah dikaji terlebih dahulu apakah sesuai dengan performa ekonomi masing masing negara sehingga tidak mengganggu anggaran ekonomi negara anggota. Selain itu kerjasama keamanan maritim yang dilakukan akan dinilai apakah sudah sesuai dengan kebijakan luar negeri dan cukup merepresentasikan politik domestik suatu negara dalam kerjasama keamanan maritim yang dilakukan.

### ***5.1.3 Domestic Policy and Foreign Policy.***

Kebijakan nasional dan kebijakan luar negeri menjadi hal yang sangat menentukan suatu negara dalam melakukan interaksi dengan lingkungan

<sup>124</sup> Share of economic sectors in the GDP in Indonesia 2007-2017. Sumber : <https://www.statista.com/statistics/319236/share-of-economic-sectors-in-the-gdp-in-indonesia/>. [online] diakses pada : 28 Agustus 2019

<sup>125</sup> Loc. cit. World Bank national accounts data, and OECD National Accounts data files.

internasional. Michael Moodie menjelaskan, negara yang akan melakukan kerjasama keamanan akan mempertimbangkan bagaimana kondisi kebijakan domestik dan kebijakan luar negerinya terlebih dahulu. Apakah tujuan kerjasama keamanan yang akan diikuti sesuai dengan kebijakan luar negeri tersebut atau tidak, sedangkan kebijakan luar negeri sendiri merupakan representasi kebijakan domestik dari negara tersebut. Kebijakan domestik dan kebijakan luar negeri menjadi hal penting dalam melakukan kerjasama keamanan karena antara kebijakan domestik dan kebijakan luar negeri terdapat kaitan erat yang menjadi definisi prioritas kepentingan nasional.<sup>126</sup>

Selain itu kebijakan luar negeri dan kebijakan domestik negara merupakan cerminan kekuatan politik suatu negara yang bekerja sama dalam *concern* upaya peningkatan keamanan maritim. Dalam upaya meningkatkan keamanan maritim dalam lingkup kerjasama, pemerintah juga perlu melibatkan aktor non pemerintah yang berperan membantu membentuk kebijakan meskipun terkadang aktor non pemerintah sering tersandung terhadap urusan yang tidak sesuai dengan kapasitasnya.

Kolaborasi antara pemerintah dan dan aktor non pemerintah dapat membantu terbentuknya strategi yang koheren dalam pendekatan kerjasama di masa depan.<sup>127</sup>

Malaysia, Filipina dan Indonesia memulai *Trilateral Cooperation Agreement* ( TCA ) pada tahun 2016 sebagai kerangka kerjasama keamanan maritim yang terkoordinasi di Laut Sulu – Laut Sulawesi sebagai *choke point* pemantauan. Di titik Laut Sulu – Laut Sulawesi banyak terjadi masalah keamanan seperti penculikan,

<sup>126</sup> Loc, cit. Moodie, Michael.

<sup>127</sup> Loc, cit. Moodie, Michael.

pembajakan kapal dan pencurian. Sehingga adanya *Trilateral Cooperation Agreement* ( TCA ) akan membantu kapal yang melintasi area Laut Sulu – Laut Sulawesi apabila menghadapi masalah, khususnya masalah keamanan. Untuk meningkatkan kinerja pada tahun 2017 dibentuk *Trilateral Maritime Patrol* ( TMP ) dalam perjanjian tersebut, terdapat penetapan patroli oleh angkatan laut. Selain angkatan laut, pengawasan melalui komponen udara juga diluncurkan untuk mengawasi Laut Sulu. *Trilateral Maritime Patrol* ( TMP ) merupakan patroli yang berada dibawah rekomendasi *Trilateral Cooperation Agreement* ( TCA ). Hanya saja pemerintah dari masing masing pihak masih terus membahas standar operasional prosedur ( SOP ) yang dilakukan.<sup>128</sup>

Kerjasama yang dilakukan antara Malaysia, Filipina dan Indonesia tentunya sudah diperhitungkan apakah sesuai dengan kebijakan politik domestik dan kebijakan luar negeri masing masing negara yaitu Malaysia, Filipina dan Indonesia. Pemerintah Filipina dalam melakukan kerjasama *Trilateral Cooperation Agreement* ( TCA ) berada dibawah kepemimpinan Rodrigo Duterte. Melakukan kerjasama Trilateral bersama Indonesia dan Malaysia dianggap sesuai karena hal ini sejalan dengan salah satu realitas kebijakan luar negeri yang dirumuskan oleh Duterte yang terdapat pada

<sup>128</sup> STABLE SEAS: SULU & CELEBES SEAS. Sumber : <http://www.mima.gov.my/images/2019/06/sulu-celebes-seas.pdf>. [ online ] diakses pada : 28 Agustus 2019

nomer 4, yaitu semakin pentingnya melakukan kolaborasi organisasi multilateral dan antar daerah untuk mempromosikan kepentingan bersama.<sup>129</sup>

Laut Sulu merupakan wilayah dengan kepentingan bersama yang harus diamankan karena merupakan jalur perdagangan impor batu bara dari Indonesia dan jalur impor karet yang berasal dari Malaysia. Sedangkan untuk mendorong peningkatan sektor pariwisata, Filipina memang harus bermitra dengan Malaysia dan Indonesia untuk melakukan koordinasi karena wilayah Laut Sulu merupakan wilayah yang berbatasan langsung dengan Malaysia dan Indonesia. Terlebih wilayah Laut Sulu merupakan wilayah *coral triangle* yang menjadi pusat konservasi terumbu karang dunia sehingga pengamanan yang ketat dari tindak kejahatan dan perusakan lingkungan perlu dilakukan.<sup>130</sup>

Berikutnya kebijakan luar negeri Malaysia, dalam melaksanakan kerjasama *Trilateral Cooperation Agreement* ( TCA ) terdapat beberapa objek kebijakan luar negeri Malaysia yang dijadikan acuan untuk melakukan kerjasama keamanan maritim khususnya *Trilateral Cooperation Agreement* ( TCA ) antara lain menekankan pentingnya membagikan kemampuan teknis dan pengalaman dalam bekerja sama.

Hal ini diperlukan dalam upaya pengamanan Laut Sulu dimana setiap negara perlu melakukan koordinasi mengenai tindakan apa yang harus dilakukan dalam mengamankan Laut Sulu, baik dari pembentukan kebijakan hingga strategi

<sup>129</sup> PHILIPPINE FOREIGN POLICY. Sumber : <https://www.dfa.gov.ph/80-transparency-category/75-philippine-foreign-policy>. [ online ] diakses pada : 28 Agustus 2019

<sup>130</sup> Ibid. PHILIPPINE FOREIGN POLICY.

pengamanan di lapangan. Hal ini sesuai dengan kebijakan luar negeri Malaysia pada butir ke 6 yaitu “ Dalam hal kerja sama teknis dengan negara-negara berkembang lainnya, Malaysia telah bekerja dengan negara-negara lain melalui berbagai pengalaman dan pengetahuannya melalui berbagai mekanisme kebijakan luar negeri ”<sup>131</sup>

Malaysia juga mengupayakan membangun kepercayaan antar anggota *Trilateral Cooperation Agreement* ( TCA ) bahwa tujuan kerjasama keamanan untuk menciptakan kesejahteraan bagi negara tetangganya yaitu Indonesia dan Filipina dengan cara bekerja sama mengamankan Laut Sulu yang menjadi jalur strategis perdagangan untuk Malaysia dan negara tetangga yaitu Indonesia dan Filipina. Dengan adanya kerjasama *Trilateral Cooperation Agreement* ( TCA ) juga membuktikan bahwa Malaysia berperan aktif dalam organisasi atau kerjasama kerjasama multilateral atau kegiatan diplomasi lainnya. Hal ini sejalan dengan kebijakan luar negeri Malaysia point ke 8 yang berbunyi “ Melalui organisasi-organisasi ini, Malaysia berupaya mempromosikan Kerjasama Selatan-Selatan di antara negara-negara berkembang dan dunia Muslim. Malaysia juga mengadvokasi kebijakan "*Prosper thy neighbour*" untuk meningkatkan hubungan ekonomi dan kerja sama dengan negara-negara tetangganya ”<sup>132</sup>

<sup>131</sup> MALAYSIA'S FOREIGN POLICY. Sumber : <https://www.kln.gov.my/web/guest/foreign-policy>. [ online ] diakses pada : 28 Agustus 2019

<sup>132</sup> Ibid. MALAYSIA'S FOREIGN POLICY.

Selain Malaysia dan Filipina, Indonesia memiliki kebijakan luar negeri yang cukup spesifik di bidang perlindungan dan keamanan maritim. Selama masa pemerintahan Joko Widodo bidang maritim menjadi hal yang sangat diperhatikan, hal ini terbukti dengan diperjuangkannya visi Indonesia sebagai Poros Maritim yang didorong dengan Diplomasi Kerakyatan dan Membumi. Indonesia juga meningkatkan kerjasama keamanan dengan negara negara mitra sebagai respon berkembangnya jaringan *foreign terrorist fighters* yang tergabung dengan ISIS. Indonesia bersama negara negara sahabat juga mengupayakan Diplomasi Maritim melalui kemitraan yang strategis untuk menjaga keamanan wilayah teritori Indonesia.<sup>133</sup>

Diplomasi Maritim Indonesia yang bertujuan untuk menjaga keutuhan teritori wilayah Indonesia dan mencegah agar tidak terjadi tindak kejahatan transnasional juga memerlukan mitra kompeten yang turut berkontribusi untuk mengamankan wilayah perbatasan. Malaysia dan Filipina dianggap sebagai pihak yang sesuai dengan kebijakan luar negeri Indonesia terlebih lagi maraknya kasus keamanan maritim di Laut Sulu yang banyak dilakukan oleh Abu Sayyaf Grup dimana kelompok ini berbasis di Filipina dan menjalankan operasinya di Laut Sulu yang merupakan perbatasan bagi Indonesia, Filipina dan Malaysia.<sup>134</sup>

<sup>133</sup> Fitriani, Analisis Kinerja Kementerian Luar Negeri Indonesia (2015-2018). Sumber : [https://www.csis.or.id/uploaded\\_file/publications/analisis\\_kinerja\\_kementerian\\_luar\\_negeri\\_2015-2018\\_.pdf](https://www.csis.or.id/uploaded_file/publications/analisis_kinerja_kementerian_luar_negeri_2015-2018_.pdf) [ online ] diakses pada : 29 Agustus 2019

<sup>134</sup> Ibid. Fitriani.

Kerjasama *Trilateral Cooperation Agreement* ( TCA ) yang dilakukan Indonesia dengan menggandeng Malaysia dan Filipina merupakan tindakan yang sesuai karena kerjasama keamanan maritim yang dilakukan sesuai dengan garis besar kebijakan luar negeri Indonesia butir ke 5 dan sasaran strategis Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia pada poin pertama yaitu Diplomasi Maritim dan perbatasan yang kuat.<sup>135</sup>

Selain melakukan kerjasama trilateral Malaysia, Filipina dan Indonesia juga menggandeng beberapa pihak lain. Adapun kontribusi yang diberikan sesuai dengan bidangnya masing masing, Malaysia dalam melakukan kerjasama TCA menggandeng beberapa antara lain ; Maritime Institute of Malaysia (MIMA) Malaysian Maritime Enforcement Agency (MMEA), Institute of Strategic and International Studies (ISIS), National Defence University of Malaysia (Universiti Pertahanan Nasional Malaysia, UPM). Filipina juga turut menggandeng beberapa mitra antara lain ; Philippine Coast Guard, National Coast Watch, Council Asia Pacific Pathways to Progress, Foundation Australian Border Force dan Mindanao State University. Berikutnya Indonesia juga menggandeng beberapa aktor lainnya, yaitu ; Badan Keamanan Maritim (BAKAMLA), Lembaga Analisis Kebijakan Konflik, Departemen Kementerian Luar Negeri, Kantor Kejaksaan, *Australian Border Force* dan Kedutaan Besar Inggris.<sup>136</sup>

<sup>135</sup> Ibid. Fitriani.

<sup>136</sup> Loc cit. STABLE SEAS: SULU & CELEBES SEAS.

Adapun pihak-pihak yang ditunjuk dalam kerjasama *Trilateral Cooperation Agreement* (TCA) memberikan kontribusi sesuai dengan keahlian masing-masing melalui bidang yang ditekuni seperti kemampuan melakukan proyeksi strategis untuk menanggulangi kejahatan maritim, pengawasan wilayah-wilayah perbatasan serta melakukan studi lapangan pada lokasi atau pihak yang bersangkutan.<sup>137</sup>

Upaya yang dilakukan Malaysia, Filipina maupun Indonesia cukup beragam mengingat banyaknya tindak kejahatan yang beroperasi di Laut Sulu sehingga pengamanan wilayah menggunakan alutsista di wilayah Laut Sulu saja tidak cukup.

Kebijakan yang berkaitan dengan keamanan Laut Sulu juga perlu dikaji ulang karena dalam mengimplementasikan kebijakan akan terjadi beberapa hambatan yang berpotensi mengganggu kelancaran kerjasama keamanan maritim *Trilateral Cooperation Agreement* (TCA)

## 5.2 Overcoming Impediment

Dalam variabel *Overcoming Impediment* Michael Moodie menjelaskan bagaimana proses yang dilakukan oleh negara yang melakukan kerja sama keamanan untuk mengatasi hambatan yang akan terjadi, meskipun sebelum melakukan kerjasama negara anggota akan melakukan prediksi mengenai hambatan apa yang dihadapi dalam melakukan kerjasama keamanan. Negara anggota TCA perlu

<sup>137</sup> Ibid.

mengatasi hambatan yang mungkin terjadi dengan instrument yang dimiliki untuk melakukan kerjasama keamanan, khususnya kerjasama keamanan maritim.<sup>138</sup>

Hambatan yang mungkin dihadapi oleh anggota kerjasama antara lain, adanya konflik internal masing masing negara anggota seringkali menyebabkan negara mengalami kondisi yang rentan sehingga tidak mampu untuk melindungi warga negaranya sendiri, sehingga negara kehilangan legitimasi untuk melindungi warga negaranya sendiri. Adanya gesekan dan persepsi mengenai pandangan mengenai ancaman antara negara anggota yang melakukan kerjasama juga menjadi hambatan tercapinya tujuan atau fokus kerjasama keamanan maritim. Terakhir adalah perbedaan strategi menjadikan kerjasama keamanan menjadi sulit untuk dilaksanakan karena adanya perbedaan mutlak yang tidak bisa dihindari, adapun perbedaan ini mencakup letak geografis dan topografi negara juga jumlah demografi yang kemudian berpengaruh pada pembentukan struktur militer.<sup>139</sup>

### 5.2.1 *State Fragility and Challenges to Internal Stability*

Kerjasama keamanan yang dilakukan oleh aktor pemerintah seringkali mengalami hambatan. Hambatan yang dialami tidak hanya berasal dari faktor eksternal, faktor penghambat tersebut juga sebaliknya datang dari sistem internal pemerintahan negara itu sendiri. Masalah internal pada negara anggota *Trilateral Cooperation Agreement* ( TCA ) menyebabkan pencapaian tujuan kerjasama sulit

<sup>138</sup> Loc.cit. Moodie, Michael.

<sup>139</sup> Loc. cit. Moodie Michael.

dicapai. Malaysia, Filipina dan Indonesia memiliki masalah domestik yang sama dan sangat serius. Pelaku kejahatan maritim di Laut Sulu merupakan aktor kejahatan transnasional yang memiliki jaringan dengan pelaku kejahatan yang lainnya.<sup>140</sup>

Adanya kejahatan transnasional dapat mencederai kedaulatan negara anggota *Trilateral Cooperation Agreement* ( TCA ) dengan melintasi batas wilayah negara untuk melakukan kejahatan transnasional. Dalam melakukan aksi kejahatannya Abu Sayyaf Grup mengaburkan garis antara teroris dan tindak kejahatan transnasional, aktivitas Abu Sayyaf Grup dikategorikan sebagai tindakan terorisme dikarenakan berafiliasi dengan ISIS dan memiliki tujuan untuk mendirikan negara Islam. Pada bulan Mei 2017 Abu Sayyaf Grup melakukan serangan agresif di kota Marawi yang merupakan kota dengan populasi muslim terbesar di Mindanao yang berujung pada upaya penangkapan Isnilon Hapilon.<sup>141</sup>

Kelompok Maute juga turut andil pada serangan agresif yang dilakukan di Marawi. Pada bulan agustus 2017 kelompok Abu Sayyaf Grup kembali melakukan serangan di Maluso yang berakibat pada tewasnya 10 orang dan melukai 9 orang lainnya. Tindakan separatis yang dilakukan oleh Abu Sayyaf Grup bertujuan untuk mendirikan negara Moro yang berbasis agama Islam, meskipun pemerintah sudah menetapkan Mindanao sebagai daerah otonomi muslim Filipina atau *Autonomy*

<sup>140</sup> Criminals With a Cause: The Crime-Terror Nexus in the Southern Philippines. Sumber : <https://thediplomat.com/2017/04/criminals-with-a-cause-the-crime-terror-nexus-in-the-southern-philippines/> [ online ] diakses pada : 29 Agustus 2019

<sup>141</sup> Mapping Militant Organizations. "Abu Sayyaf Group". Sumber : <https://cisac.fsi.stanford.edu/mappingmilitants/profiles/abu-sayyaf-group>. [ online ] diakses pada : 29 Agustus 2019

*Region Muslim Mindanao* ( ARMM ). Sebagai upaya untuk meredam serangan agresif, dewan perwakilan rakyat Filipina mengeluarkan *Bill Organic Bangsamoro* ( BOL ) yang bertujuan untuk membentuk wilayah otonomi baru di Mindanao Selatan.

Namun adanya undang undang ini menuai protes dari anggota *Autonomy Region Muslim Mindanao* ( ARMM ) dan kembali menuai serangan agresif yang melibatkan angkatan bersenjata Filipina dan Abu Syyaf Grup.<sup>142</sup>

Selain menjadi gerakan separatis, Abu Syyaf Grup juga melakukan kejahatan transnasional untuk keberlangsungan aktivitas kelompoknya, beberapa jenis kejahatan yang dilakukan antara lain melakukan penyelundupan senjata, menjual obat obatan terlarang seperti *heroin* dan *amphetamine* dan kejahatan yang sangat meresahkan masyarakat internasional yaitu melakukan pembajakan kapal dan penculikan awak kapal. Laut Sulu dijadikan *focal point* patroli keamanan maritim TCA dikarenakan lokasi ini dijadikan tempat beroperasinya Abu Syyaf Grup melakukan tindak kejahatan maritim.<sup>143</sup>

Banyaknya konflik di wilayah sekitar Laut Sulu baik perompakan dan separatisme disebabkan oleh tingginya angka kemiskinan dan tidak meratanya pembangunan untuk masyarakat yang berada di wilayah Mindanao. Faktor sosial ekonomi menyebabkan separatisme dan perompakan menjadi hal lumrah untuk dilakukan oleh masyarakat yang tinggal di pulau pulau kecil sekitar Mindanao. Kemiskinan dan kekerasan menjadi hal yang sangat lekat dengan masyarakat

<sup>142</sup> Ibid. Mapping Militant Organizations. "Abu Syyaf Group".

<sup>143</sup> Loc.cit. Criminals with a Cause.

Mindanao khususnya bagi kaum muda, membuat mereka sangat mudah untuk bergabung dengan kelompok-kelompok militan. Dalam merekrut anggota muda, kelompok radikal akan mendoktrin idealisme kelompok muda dan mengarahkannya untuk melakukan tindakan yang diperintahkan oleh pimpinan mereka.<sup>144</sup>

Gerakan separatisme yang dilakukan oleh kelompok Abu Sayyaf Group merupakan ancaman yang berasal dari internal Filipina. Hal ini mengancam kedaulatan Filipina karena dianggap sebagai negara yang tidak mampu menjamin keamanan warga negaranya dan meratakan pembangunan serta kesejahteraan untuk masyarakatnya. Awal mula separatisme terbentuk berasal dari 2 syarat yaitu adanya diskriminasi etnis minoritas dan adanya elit nasional yang aktif. Alasan dasar penyebab separatisme antara lain adanya kondisi ekonomi yang tidak seimbang, kontradiksi budaya atau preferensi politik yang berbeda.<sup>145</sup> Pada kasus Abu Sayyaf Group, terdapat 2 penyebab tindakan yang memicu gerakan separatisme yaitu pemerintah Filipina tidak membiayai masyarakat pesisir Laut Sulu sebagaimana mestinya sehingga tetap berada di bawah garis kemiskinan serta kondisi masyarakat pesisir Laut Sulu sebagai Muslim yang merupakan agama minoritas di Filipina.

Kerentanan dan ancaman internal yang dialami Filipina dikarenakan pemerintah Filipina sendiri tidak membangun daerah-daerah Filipina secara merata. Untuk mengatasi perpecahan dan konflik internal, Filipina melakukan beberapa antara lain pemerintah Filipina peningkatan diluar sektor pertanian, warga Filipina banyak yang

<sup>144</sup> Loc.cit. Criminals with a Cause.

<sup>145</sup> Ryabinin, Yevgeny. THE BASIC CAUSES OF THE CONTEMPORARY SEPARATISM, P.7. [ PDF ]

berpindah profesi pada pekerjaan semi formal dikarenakan minimnya penghasilan yang diperoleh dari hasil pertanian sehingga pemerintah Filipina perlu melakukan eksplorasi mengenai lapangan kerja khususnya dibidang jasa. Penerimaan remitansi dari warga Filipina yang bekerja di luar negeri juga membantu pendapatan Filipina, pelatihan untuk meningkatkan calon tenaga kerja Filipina yang akan dikirim ke luar negeri juga menjadi perhatian hal ini berkaitan dengan semakin meningkatnya keterampilan tenaga kerja Filipina semakin tinggi daya tawar yang akan diperoleh tenaga kerja Filipina dalam pasar tenaga kerja internasional. Berikutnya yaitu penyaluran bantuan langsung kepada mesyarakat untuk memenuhi kebutuhan pangan dan kebutuhan dasar lainnya sebagai upaya untuk menekan angka gizi buruk dan kematian dini pada anak usia dini.<sup>146</sup> Selain permasalahan internal, perbedaan persepsi dalam melakukan kerjasama antar anggota TCA juga menjadi kendala kerjasama yang dilakukan. Perbedaan yang dimaksud meliputi bagaimana negara Anggota TCA memandang ancaman yang terjadi dan penggunaan kekuatan untuk mengamankan Laut Sulu.

### 5.2.2 *Conflicting Perceptions*

Pada proses pengamanan Laut Sulu yang melibatkan Malaysia, Indonesia dan Filipina tidak selalu berjalan lancar, negara anggota TCA harus memahami dan mencari jalan keluar untuk mengatasi perbedaan pemahaman antar anggota mengenai ancaman di Laut Sulu yang menjadi *focal point* pemantauan masih terjadi. Perbedaan

<sup>146</sup> Overcoming poverty in the Philippines. Sumber : <https://www.bworldonline.com/overcoming-poverty-in-the-philippines/>. diakses pada : 29 Agustus 2019

persepsi terbagi pada 3 hal yaitu mengenai sifat ancaman yang terjadi di Laut Sulu.

Setiap negara anggota baik Malaysia, Filipina dan Indonesia memiliki penekanan yang berbeda pada ancaman yang terjadi di Laut Sulu, penekanan fokus ini bukan hanya dipandang dari masalah keamanan maritim saja namun terdapat aspek lain dengan *concern* berbeda dari masing masing negara baik Malaysia, Filipina dan Indonesia. Ketika menghadapi ancaman maritim di Laut Sulu, Indonesia memiliki persepsi berbeda dengan Filipina dan Malaysia. Indonesia menganggap Laut Sulu merupakan jalur yang harus diamankan karena Laut Sulu merupakan jalur yang harus diamankan untuk meningkatkan keamanan jalur pelayaran kapal kargo yang notabene merupakan instrument perdagangan ekspor impor yang dikolaborasikan dengan patroli wilayah perairan nasional untuk wilayah utara Laut Sulawesi bagi Indonesia.<sup>147</sup>

Bagi Malaysia Laut Sulu menjadi penting karena bersinggungan langsung dengan Laut Sabah yang merupakan wilayah teritori Malaysia. Hishamuddin selaku menteri luar negeri Malaysia menjelaskan bahwasanya tantangan Malaysia bukan hanya berasal dari Laut Sulu saja namun pada cakupan yang lebih besar yaitu bagaimana mengatasi tantangan keamanan yang berfokus pada ancaman terorisme dan mempelajari bagaimana ISIS dan kelompok terorisme yang memiliki kaitan dapat menimbulkan ancaman bagi negara di Asia Tenggara dengan beberapa caranya antara lain dengan memasukkan doktrin pada populasi suatu negara, melakukan serangan

<sup>147</sup> IPAC: Kerja Sama Trilateral Tak Mampu Cegah Terorisme, Penculikan di Laut Sulu.

Sumber : <https://www.benarnews.org/indonesian/berita/ipac-trilateral-maritim-tak-mampu-cegah-terorisme-01092019150853.html>. [ online ] diakses pada : 29 Agustus 2019

tunggal melalui bom bunuh diri atau memanfaatkan konflik yang sedang terjadi seperti di bagian selatan Filipina dan bagian selatan Thailand.<sup>148</sup>

Dalam kerjasama TCA Hishamuddin membahas bagaimana tantangan dan peluang yang akan didapatkan dalam kerjasama patroli trilateral Laut Sulu.

Tantangan yang dihadapi bukan hanya kejahatan maritim di Laut Sulu, tapi lebih condong pada status Sabah sebagai bagian dari Malaysia Timur. Bagi Malaysia tantangan dalam melakukan kerjasama TCA bukan hanya bagaimana mengamankan

Laut Sulu namun lebih fokus pada bagaimana kolaborasi ini tetap berjalan maju meskipun merancang kerjasama trilateral memakan waktu yang cukup lama.

Sambutan Hishamuddin menjadi hal yang perlu dipertimbangkan mengenai kerjasama yang harus tetap berjalan meskipun masih terdapat beberapa kendala.<sup>149</sup>

Berbeda dengan Filipina, sejak pasca peristiwa 9 / 11 Filipina menjadi wilayah pengamanan yang menjadi pengawasan Amerika Serikat. Hal ini dikarenakan wilayah selatan Filipina merupakan konsentrasi sebagai tempat perlindungan yang cukup aman, atau untuk melakukan pelatihan individu dan membuat perencanaan.

Filipina dijadikan salah satu lokasi misi Amerika dalam misi Perang Melawan Teror melalui pemberian saran dan strategi untuk memenangkan perang melawan kelompok Islam radikal yang mengganggu ketenangan pulau-pulau di Filipina selatan. Infiltrasi untuk menanggulangi kejahatan dan kelompok separatis di Laut Sulu tidak begitu

<sup>148</sup> Malaysia Spotlights Expanded Sulu Sea Trilateral Patrols. Sumber : <https://thediplomat.com/2018/04/malaysia-spotlights-expanded-sulu-sea-trilateral-patrols/>. [ online ] diakses pada : 29 Agustus 2019

<sup>149</sup> Ibid. Malaysia Spotlights Expanded Sulu Sea Trilateral Patrols.

terkenal seperti misi Irak dan Afghanistan. Pemerintah Filipina memiliki perspektif bahwasanya perlu untuk menggandeng mitra sebanyak mungkin untuk menanggulangi isu terorisme dan separatisme salah satunya Abu Sayyaf Grup yang melindungi beberapa aktor kunci yaitu Khalid Sheikh Muhammad yang merencanakan Bom *World Trade Center*, Ramzi Yousef yang memiliki peran penting dalam Bom *World Trade Center* dan Dulmatin yaitu aktor kunci serangan bom Bali, dan mereka banyak menghabiskan waktu di Filipina.<sup>150</sup>

Laut Sulu sebagai *focal point* pengamanan mendorong negara anggota TCA untuk melakukan kerjasama keamanan, Perbedaan persepsi mengenai kerjasama yang dilakukan oleh Malaysia, Filipina dan Indonesia tidak seharusnya membuat tujuan kerjasama terpecah dikarenakan sebelum melakukan kerjasama anggota TCA sudah memfokuskan apa yang akan dilakukan oleh dalam kerjasama TCA dengan menjadikan pemngamanan Laut Sulu sebagai fokus awal kerjasama TCA. Selain perbedaan persepsi terdapat perbedaan mutlak yang tidak bisa dihindari oleh anggota TCA yang berpengaruh pada kinerja masing masing negara dalam melakukan kerjasama TCA.

### 5.2.3 Strategic Assymetries

Dalam melakukan kerjasama TCA, tujuan untuk mengamankan Laut Sulu akan mungkin akan terhambat oleh beberapa perbedaan mutlak yang dimiliki negara

<sup>150</sup> Sulu: The islands that are home to Philippine militancy. Sumber :

<https://www.bbc.com/news/world-asia-21349891>. [ online ] diakses pada : 29 Agustus 2019

anggota TCA. Perbedaan ini disebut dengan *Strategic Assymetric* yaitu adanya perbedaan mutlak yang membuat pengaturan kerjasama menjadi lebih sulit untuk dilakukan.<sup>151</sup> Namun hal ini bisa menjadi pertimbangan kepada negara anggota TCA mengapa mereka melakukan kerjasama pengamanan Laut Sulu, Malaysia, Indonesia dan Filipina ketiga negara ini merupakan negara kepulauan yang setiap pulau-pulunya disambungkan dengan laut atau perairan yang menjadi penghubung antara satu pulau dan pulau yang lain.

Beberapa perbedaan yang membuat kerjasama antara Malaysia, Filipina dan Indonesia sulit melakukan kooperasi antara lain adanya perbedaan di beberapa sektor, di sektor geografi Indonesia tidak banyak memiliki perbatasan dengan negara namun terletak diantara 2 lautan besar yaitu samudra hindia dan perairan pasifik, Malaysia memiliki banyak perbatasan antara lain, semenanjung yang berbatasan dengan Thailand, sebagian pulau Kalimantan yang menjadi teritori Indonesia, Brunei Darussalam, Laut China Selatan dan bagian selatan Vietnam. Sementara Filipina, berada di antara laut Filipina, Laut China Selatan dan bagian timur Vietnam. Dari Filipina dan Malaysia yang bersinggungan dengan banyak wilayah negara tetangganya tentu memiliki banyak personil yang menjaga perbatasan baik dari kesatuan penjagaan maritim atau penjagaan darat. Sedangkan wilayah Indonesia yang tidak banyak memiliki wilayah yang berbatasan langsung dengan teritori daratan negara tetangganya dan banyak memiliki perbatasan dengan wilayah perairan

---

<sup>151</sup> Loc cit. Moodie, Michael.

mengharuskan Indonesia memperbanyak penjagaan dengan personil angkatan lautnya.<sup>152</sup>

Sementara itu berdasarkan komposisi militer, Malaysia memiliki jumlah personil militer ( non perwira ) dengan masa pelayanan negara lebih lama dibandingkan Filipina dan Indonesia. Usia pelayanan angkatan bersenjata Filipina berkisar pada usia 17 hingga 23 tahun, Malaysia memiliki pasukan angkatan bersenjata dengan usia pelayanan dimulai pada usia 17 tahun 6 bulan hingga usia 60 tahun, sedangkan Indonesia memulai masa pelayanan pada usia 18 tahun hingga usia 45 tahun. sementara untuk alokasi pembiayaan militer, Filipina mengalokasikan 1,28 % dari total GDP nya untuk kebutuhan militer, Indonesia mengalokasikan 0,88 % dari total GDP yang diperoleh untuk memenuhi kebutuhan militernya, sedangkan Malaysia mengalokasikan 1,44 % dari total pendapatan GDP yang diperoleh.<sup>153</sup>

Perbedaan alokasi anggaran militer yang dimiliki masing masing negara anggota TCA memang berpotensi menjadi sumber kecurigaan. Namun hal ini akan menjadi salah satu faktor pendorong mengapa anggota TCA melakukan pengamanan Laut Sulu dikarenakan Indonesia sebagai salah satu anggotanya memiliki kapasitas militer dan inventarisir persenjataan yang cukup lengkap sehingga hal ini justru mampu untuk mengamankan Laut Sulu yang menjad *focal point* pengamanan TCA.

<sup>152</sup> Geographical features of Malaysia, Filipina and Indonesia. Sumber :

<https://www.indexmundi.com/factbook/compare/philippines.indonesia>. [ online ] diakses pada : 29 Agustus 2019

<sup>153</sup> Military expenditure Malaysia, Filipina and Indonesia. sumber :

<https://www.indexmundi.com/factbook/compare/malaysia.indonesia>. [ online ] diakses pada : 29 Agustus 2019

Perbedaan dasar penduduk Filipina, Malaysia dan Indonesia memang menjadi hal yang perlu diperhatikan karena akan menjadi takaran porsi pengamanan dalam melakukan kerjasama keamanan maritim TCA. Berikutnya akan dibahas bagaimana Malaysia, Filipina dan Indonesia dalam merespon ancaman yang ada di Laut Sulu baik secara perspektif dan operasional.

### 5.3. Responding to the Challenges

Kerjasama TCA yang dilakukan oleh Malaysia, Filipina dan Indonesia merupakan kerjasama keamanan maritim yang fokusnya bukan lagi kasus keamanan tradisional dimana penyebab masalahnya merupakan aktor negara seperti yang terjadi pada kasus konflik keamanan tradisional seperti yang terjadi pada tahun-tahun sebelum kejadian perang dingin atau sebelum terjadinya peristiwa 9 / 11.<sup>154</sup>

#### 5.3.1 Changes in Perspectives

Dalam mengganti perspektif baik Malaysia, Filipina dan Indonesia seharusnya menyadari bahwasanya kerjasama model lama dengan pembahasan topik lama akan membuat kerjasama terhambat dan berhenti pada satu titik saja tanpa menemukan solusi atau final yang menyelesaikan masalah. Adanya kerjasama TCA bertujuan untuk menyelesaikan masalah kejahatan transnasional yang ada di Laut Sulu dimana kejahatan ini bukan hanya terjadi di satu negara yaitu Filipina yang merupakan wilayah teritori dari Filipina. Kejahatan maritim baik perompakan, terorisme dan

<sup>154</sup> Loc. cit. Moodie, Michael.

tindak kejahatan lainnya merupakan jenis kejahatan transnasional yang tidak bisa diselesaikan dengan pendekatan tradisional. Menyadari banyaknya korban berjatuhannya di Laut Sulu yang bukan berasal dari warga negara setempat, kerugian akibat pembajakan kapal dan pencurian kapal kargo menunjukkan bahwa wilayah ini perlu mendapatkan pengamanan yang lebih intensif bukan hanya dari satu negara namun melibatkan semua pihak yang dianggap berkompeten.<sup>155</sup>

Ancaman keamanan maritim khususnya penculikan yang dialami oleh wisatawan asing yang mengunjungi Laut Sulu menjadikan kasus ini sebagai kasus internasional sehingga negara sekitarnya harus melakukan kerjasama keamanan maritim. Penculikan yang terjadi di Laut Sulu sangat sulit dideteksi karena lokasi *base camp* yang berpindah dan lokasinya jarang dilalui warga setempat. Bertambahnya kasus pembunuhan menjadi faktor terbentuknya forum pertemuan Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan dari tiga negara yaitu Malaysia, Filipina dan Indonesia. Tiga negara ini kemudian menginstruksikan untuk melakukan pertemuan rutin secara berkala untuk meninjau dan merumuskan langkah yang perlu dilakukan untuk membuat SOP ( standar operasional perosedur ) dalam melakukan patroli di Laut Sulu.<sup>156</sup>

Upaya mengamankan Laut Sulu memang terbilang tidak mudah banyak pihak yang terlibat dalam upaya pengamanan ini, selama melakukan pengamanan kerjasama keamanan maritim oleh TCA, beberapa badan sub dari kerjasama ini dibentuk yaitu

<sup>155</sup> Loc. cit. Moodie, Michael

<sup>156</sup> Resky, ade nurul. eJournal Ilmu Hubungan Internasional, Volume 6, Nomor 3, 2018: 1281-1298

*Trilateral Maritime Patrol ( TMP ) dan Trilateral Air Patrol ( TAP )* dimana

kelompok ini melakukan pemantauan secara komprehensif untuk mengetahui

keberadaan kelompok pelaku kejahatan maritim dan menerima laporan dari kapal

yang melintas apabila selama dalam perjalanan mereka mendapatkan ancaman atau

tindakan yang mencurigakan dari kapal yang tidak dikenali identitasnya.<sup>157</sup>

Berikutnya yaitu perubahan operasional apa saja yang dilakukan oleh anggota

kerjasama keamanan maritim dalam mengamankan wilayah Laut Sulu dalam rangka

kerjasama TCA

### **5.3.2 Changes in Operations**

Selama melakukan kerjasama maritim TCA, ada beberapa perubahan yang

dilakukan oleh negara antara lain menciptakan norma atau nilai nilai yang kuat dalam

melakukan kerjasama. Norma atau nilai menjadi hal yang sangat mendasar sebagai

fondasi ketaatan anggota untuk menghindari kelalaian atau memastikan bahwa

kesepakatan yang telah dibuat dapat berjalan dan diimplementasikan sesuai dengan

kesepakatan yang telah dibuat. Dalam kerjasama TCA baik Malaysia, Filipina dan

Indonesia melalui kerjasama TCA juga melakukan sharing informasi untuk mencegah

timbulnya keurigaan anatar anggota mengenai tindakan operasional yang dilakukan.

Hal ini dikarenakan pada kerjasama TCA baik Malaysia, Filipina dan Indonesia

mengizinkan satu sama lain untuk memasuki wilayah Laut Sulu yang menjadi *concern*

wilayah pengaman yang disepakati oleh Malaysia, Filipina dan Indonesia. Sehingga

<sup>157</sup> Loc.cit.

transparansi mengenai hal yang telah dilakukan menjadi hal yang sangat penting untuk dilakukan.

Inventarisir persenjataan juga merupakan hal yang perlu dilakukan. Untuk menghindari rasa curiga antara anggota TCA. Bahkan dalam beberapa hal negara juga perlu menerbitkan *white book* yang berisi informasi dan perkembangan data mengenai kepemilikan senjata oleh negara satu sama lain yang melakukan kerjasama keamanan.<sup>158</sup> Selain memiliki fungsi untuk memberikan informasi dan perkembangan data mengenai inventarisir senjata, *White Book* berguna bagi negara yang melakukan kerjasama untuk mengetahui strategi politik dan keamanan masing masing negara oleh negara yang melakukan kerjasama selama beberapa tahun kedepan hingga *White Book* berikutnya diterbitkan. Bagi negara penerbit, *White Book* sendiri merupakan acuan penting bagi pembuat kebijakan, pemangku kepentingan, pelaksana tugas dalam lingkup militer, seluruh masyarakat di negara penerbit *White Book* itu sendiri dan masyarakat internasional yang mengaksesnya.<sup>159</sup>

Bagi negara yang melakukan kerjasama keamanan, *White Book* berfungsi untuk memantau kebijakan dalam sektor keamanan dan pertahanan masing masing negara yang melakukan kerjasama keamanan mengenai kesesuaian tujuan militer masing

---

<sup>158</sup> Loc.Cit, Moodie, Michael.

<sup>159</sup> White Book Function. Sumber :

<https://www.sinarharian.com.my/article/31762/BERITA/Nasional/Pentingnya-Kertas-Putih-Pertahanan>. [ online ] diakses pada : 29 Agustus 2019

masing negara satu sama lain dalam mengupayakan keamanan negara.<sup>160</sup> Kerjasama keamanan maritim yang dilakukan oleh Malaysia, Filipina dan Indonesia disesuaikan dengan White Book yang telah diterbitkan. Indonesia dalam menerbitkan *White Book* menjelaskan bahwasanya *Transnational Crime* merupakan hal yang harus diperhatikan hal ini dikarenakan dapat menciptakan kondisi rawan bagi negara dan mencedarai kedaulatan negara. Adapun kejahatan yang sering termasuk dalam *Transnational Crime* antara lain penyelundupan obat-obatan terlarang, perdagangan manusia, pembajakan kapal, pencucian uang dll.

Pada *White Book* Filipina yang diterbitkan oleh Kementerian Pertahanan Filipina, salah satu fokus pemerintah Filipina terdapat pada pengamanan pada wilayah maritim sebagai upaya pertahanan nasional.<sup>161</sup> Wilayah maritim yang menjadi fokus pengamanan yaitu laut Filipina bagian barat dimana pada lokasi tersebut terdapat beberapa pelanggaran seperti tindak kekerasan yang dilakukan oleh para ekstrimis serta pelaku kejahatan yang melintasi perairan Filipina. Hal ini tentunya tidak hanya mengganggu kedaulatan negara saja, namun mengganggu keamanan dan stabilitas nasional Filipina.

<sup>160</sup> INDONESIA DEFENCE WHITE PAPER. Sumber : <https://www.kemhan.go.id/wp-content/uploads/2016/05/2015-INDONESIA-DEFENCE-WHITE-PAPER-ENGLISH-VERSION.pdf>. diakses pada : 29 Agustus 2019

<sup>161</sup> Department of National Defense; 23 July 2012. Sumber : [https://www.files.ethz.ch/isn/167331/Philippines\\_ENG\\_2012.pdf](https://www.files.ethz.ch/isn/167331/Philippines_ENG_2012.pdf) [ online ] diakses pada : 29 Agustus 2019

## BAB VI

### PENUTUP

#### 6.1 KESIMPULAN

Laut Sulu merupakan wilayah strategis yang terletak di antara perairan Malaysia, Filipina dan Indonesia. Kekayaan alam Laut sulu menjadikan wilayah sebagai daya tarik bagi wisatawan yang mancanegara. Namun hal ini tidak bisa berlanjut mengingat adanya ancaman dari kelompok teroris dan pelaku kejahatan maritim yang lain, salah satunya Abu Sayyaf Grup. Laut Sulu menjadi pintu tindak kejahatan maritim adapun tindak kejahatan maritim yang dilakukan antara lain, pembajakan, perompakan, penculikan untuk meminta tebusan dan penyelundupan barang barang terlarang.

Penulis berupaya untuk menjelaskan apa saja yang dilakukan oleh Filipina, Malaysia dan Indonesia yang melakukan kerjasama maritim untuk menanggulangi tindak kejahatan maritim yang terjadi di Laut Sulu menggunakan konsep *Cooperative Security* yang dijelaskan oleh Michael Moodie. Dalam konsep yang dijelaskan oleh Michael Moodie terdapat beberapa variabel yang diperhatikan yaitu *Exploiting Changes* yang merupakan upaya negara untuk melakukan eksplorasi mengenai tantangan apa yang dihadapi oleh negara yang kerjasama, mengukur kemampuan ekonomi negara untuk melakukan kerjasama keamanan apakah kerjasama yang dilakukan akan mengganggu stabilitas ekonomi atau tidak, dan menyesuaikan apakah

kerjasama yang dilakukan oleh Malaysia, Filipina dan Indonesia sudah sesuai dengan kebijakan luar negeri masing masing negara.

Pada variabel *overcoming impediment*, penulis membahas hal hal apa yang menjadi pengahalang kerjasama keamanan maritim, hal yang menjadi penghambat antara lain, negara yang melakukan kerjasama keamanan maritim mengalami gangguan dari sisi internal sehingga negara tidak bisa maksimal dalam menjamin keamanan negaranya. Selain itu perbedaan persepsi antara anggota TCA menjadi hal yang mengganggu fokus tujuan kerjasama antara Malaysia, Filipina dan Indonesia.

Perbedaan kepentingan menjadi penghambat lancarnya kerjasama keamanan maritim. Perbedaan komponen negara membuat kerjasama keamanan menjadi tidak berimbang. Indonesia dengan kepulauan yang banyak tentu anggarannya tidak akan sama dengan Filipina. Tidak tepatnya anggaran untuk melakukan kerjasama membuat kerjasama TCA sulit untuk menyelaraskan kerjasama keamanan.

Dalam menghadapi ancaman, negara TCA tentunya memiliki respon yang berbeda dalam menghadapi ancaman bersama yaitu ancaman kejahatan yang ada di Laut Sulu. Negara TCA baik Indonesia, Malaysia dan Filipina merubah pandangan terhadap satu sama lain bahwasanya ancaman yang terjadi di Laut Sulu merupakan masalah kejahatan dan ancaman transnasional yang penyelesaiannya tidak bisa menggunakan pendekatan tradisional. Dalam operasionalnya, anggota TCA harus memastikan bahwasanya tindakan yang mereka lakukan tidak berbahaya bagi anggota yang lain. Selain itu transparansi mengenai inventarisir persenjataan juga harus

dilakukan dan dapat diakses oleh semua pihak untuk mendapatkan kepercayaan dari anggota satu sama lain.

Meninjau bagaimana TCA dilakukan sejak tahun 2016 hingga 2017, penulis dapat menyimpulkan kerjasama ini berhasil meskipun belum maksimal. Hal ini dikarenakan adanya penurunan tindak kejahatan maritim pada CAT-1 yang cukup signifikan hanya saja trend kejahatan berubah pada CAT 3 dengan resiko dan kerugian yang lebih kecil. Selain itu, keberhasilan kerjasama TCA juga dilihat dari banyaknya kelompok non tradisional seperti akademisi, dan LSM yang turut memberikan kontribusi untuk kerjasama keamanan TCA, hal ini menandakan bahwasanya pihak pihak yang terlibat bukan hanya berasal dari aktor tradisional yaitu militer dan pemerintah namun adanya pihak non tradisional menandakan bahwa kerjasama keamanan maritim merupakan bukanlah hal yang sifatnya tradisional lagi karena hanya melibatkan aktor negara.

## 6.2 SARAN

Melihat *progress* kerjasama keamanan maritim yang telah dilakukan oleh *Trilateral Cooperation Agreement* ( TCA ). Sejauh ini dapat dikategorikan berhasil hal ini dilihat dari menurunnya angka kejahatan maritim pada kategori CAT 1. Hal ini menunjukkan keseriusan antara Malaysia, Filipina dan Indonesia dalam menanggulangi ancaman maritim di Laut Sulu. Suksesnya kerjasama *Trilateral Cooperation Agreement* ( TCA ) tidak lepas dari peranan semua pihak baik aktor negara maupun non negara. Pencegahan yang dilakukan oleh Malaysia, Filipina dan

Indonesia seharusnya tidak hanya fokus pada area Laut Sulu namun juga pada daerah pesisir sekitarnya. Hal ini dikarenakan para perompak yang melakukan aksi kejahatan di Laut Sulu merupakan warga pesisir yang berada di bawah garis kemiskinan sehingga perlu bagi pemerintah Filipina untuk meratakan pembangunan dan program untuk menyejahterakan masyarakat khususnya yang berada di bagian Filipina selatan.

Dalam penulisan ini penulis menyadari banyak kekurangan baik dari segi sistematika penulisan maupun substansi, dari penelitian ini penulis banyak mendapatkan pengetahuan baru mengenai penyebab munculnya kejahatan maritim dan bagaimana upaya negara dalam menanggulangi ancaman maritim melalui kerjasama TCA. Kepada peneliti berikutnya atau pembaca penelitian ini. Penulis menghimbau kepada peneliti selanjutnya untuk tidak ragu menggunakan perspektif atau konsep *alternative*, karena kasus kejahatan maritim yang terjadi saat ini khususnya di Laut Sulu merupakan kasus non tradisional dimana pelaku bukanlah aktor negara dan melintasi perbatasan wilayah negara dengan berbagai macam motif tindakan kejahatan. Dalam mencari referensi, penulis menyarankan agar peneliti berikutnya dapat lebih cermat dan teliti dalam mencari referensi atau sumber yang dijadikan rujukan.

Kesesuaian konsep dengan studi kasus akan mempermudah peneliti berikutnya untuk melakukan penelitian khususnya dalam membahas kerjasama keamanan maritim. Hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan penelitian khususnya dalam melakukan kerjasama maritim yaitu memperhatikan perkembangan kerjasama

melalui berita dan yang berisi data akumulasi perkembangan di satu lokasi. Harapan penulis pada peneliti berikutnya agar dapat melanjutkan penelitian ini dengan konsep dan isu yang lebih menarik untuk dibahas.



## DAFTAR PUSTAKA

**Buku**

Grygiel, J. J. (n.d.). *Great Powers and Geopolitical Changes*. The Johns Hopkins University.

saferworld . (n.d.). *saferworld · small arms and light weapons control: a training manual*.

**Jurnal**

Berry, L. (2002). Narcotics-Funded Terrorist/Extremist Groups. *Library of Congress – Federal Research Division* .

Bradford, J. (2005). Institute of Defence and Strategic Studies. *SOUTHEAST ASIAN MARITIME SECURITY IN THE AGE OF TERROR: THREATS, OPPORTUNITY, AND CHARTING THE COURSE FORWARD*.

Bradford, J. F. (2005). The Growing Prospects for Maritime Security. *Naval War College Review*.

Fitriani. (2018). CSIS WORKING PAPER SERIES. *Analisis Kinerja Kementerian Luar Negeri Indonesia*.

ISC, R. (2016). *Annual Report*.

Moodie, M. (2000). Cooperative Security: Implications for National Security and International Relations. *Chemical and Biological Arms Control Institute*.

Othman, Z. (2013 ). Non-Traditional Security Issues and the Stability of Southeast Asia. *Jurnal Kajian Wilayah, Vol. 4, No. 2, 150-164*.

Rezky, A. N. (2018). KERJASAMA TRILATERAL INDONESIA MALAYSIA FILIPINA DALAM MENANGGULANGI KELOMPOK TERORIS ABU SAYYAF. *eJournal Hubungan Internasional Fisip Universitas Mulawarman*.

Sagena, U. W. (2013). Memahami Keamanan Tradisional dan Non-Tradisional di Selat Malaka. *Jurnal Interdependence, Th. 1, Vol. 1*.

Sobandi, K. R. (2011). Separatisme di Asia Tenggara: Antara Penguasa dan Gerakan Nasionalis Kelompok Minoritas. *Jurnal Kajian Wilayah, Vol. 2, No. 1*.

Sulu Sulawesi marine ecoregion. (n.d.). *WWF International Corals Initiative*.

Wall, H. K. ( 2006.). Thesis Master of Art in Political Science University Canterbury.

*THE DYNAMICS OF SMALL ARMS TRANSFERS IN SOUTHEAST ASIAN INSURGENCIES.*

Waters, G. (2010). Enhancing Trilateral Security Cooperation in the Western Pacific. *Security Challenges*, 103-112.

**Artikel Online :**

(n.d.). Retrieved from Department of Foreign Affairs : <https://www.dfa.gov.ph/80-transparency-category/75-philippine-foreign-policy>

*3 Panglima Militer, Resmikan Maritime Command Center.* (2017 , Juni 20).

Retrieved from Jakarta Greater: <https://jakartagreater.com/3-panglima-militer-resmikan-maritime-command-center/>

*Abu Sayyaf Group.* (2015, July 20). Retrieved from Mapping Militant Organizations: [https://web.stanford.edu/group/mappingmilitants/cgi-bin/groups/print\\_view/152](https://web.stanford.edu/group/mappingmilitants/cgi-bin/groups/print_view/152)

Alif, D. (2018, April 16 ). *Pembajakan Kapal di Laut Lepas.* Retrieved from Kumparan: <https://kumparan.com/dio-alif1523888395681/pembajakan-kapal-di-laut-lepas>

AMADEO, K. (2019 ( Updated ), December 14). *Gross Domestic Product and How It Affects You.* Retrieved from The Balance: <https://www.thebalance.com/what-is-gdp-definition-of-gross-domestic-product-3306038>

Amling, A. (2019, February 19). *SULU AND CELEBES SEAS.* Retrieved from STABLE SEAS: <https://stableseas.org/publications/sulu-celebes-seas>

Anggono, Z. T. (2016, November 22). *Minister confident cooperation in Sulu Sea will defeat piracy.* Retrieved from The Jakarta Post: <https://www.thejakartapost.com/news/2016/11/22/minister-confident-cooperation-in-sulu-sea-will-defeat-piracy.html>

*Annual Report 2018.* (2018, April). Retrieved from ReCAAP ISC: <http://www.recaap.org/resources/ck/files/reports/annual/ReCAAP%20ISC%20Annual%20Report%202018.pdf>

Annual Report 2018. (2018). Retrieved from ReCAAP ISC:

<http://www.recaap.org/resources/ck/files/reports/annual/ReCAAP%20ISC%20Annual%20Report%202018.pdf>

Askins, S. (n.d.). *A Threat to Tugs and Barges – Piracy in the Sulu Sea: The “new Somalia” or a limited threat?* Retrieved from Tug Advise:

<https://www.tugadvise.com/resources/articles/a-threat-to-tugs-and-barges-piracy-in-the-sulu-sea-the-new-somalia-or-a-limited-threat/>

Attwel, R. (2017, April 11). *Criminals With a Cause: The Crime-Terror Nexus in the Southern Philippines*. Retrieved from The Diplomat:

<https://thediplomat.com/2017/04/criminals-with-a-cause-the-crime-terror-nexus-in-the-southern-philippines/>

Ayob, N. M. (2014, September). *Issues of Safety and Security: New Challenging to Malaysia*. Retrieved from School of Humanities, Universiti Sains Malaysia:

[https://www.shs-conferences.org/articles/shsconf/pdf/2014/09/shsconf\\_4ictr2014\\_01083.pdf](https://www.shs-conferences.org/articles/shsconf/pdf/2014/09/shsconf_4ictr2014_01083.pdf)

Bada, F. (n.d.). *The Biggest Industries In Malaysia*. Retrieved from World Atlas:

<https://www.worldatlas.com/articles/the-biggest-industries-in-malaysia.html>

Bromley, M. (2018, November). *Arms Transfer and SALW Control Capacity-Building in MENA*. Retrieved from SIPRI Background Paper:

[https://css.ethz.ch/content/dam/ethz/special-interest/gess/cis/center-for-securities-studies/resources/docs/SIPRI\\_bp\\_1811\\_att\\_mena\\_1\(1\).pdf](https://css.ethz.ch/content/dam/ethz/special-interest/gess/cis/center-for-securities-studies/resources/docs/SIPRI_bp_1811_att_mena_1(1).pdf)

Chalk, P. (2012). *Non-Traditional Threats and Maritime Domain Awareness in the Tri-Border Area of Southeast Asia*. Retrieved from NATIONAL DEFENSE RESEARCH INSTITUTE:

[https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/occasional\\_papers/2012/RAND\\_OP372.pdf](https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/occasional_papers/2012/RAND_OP372.pdf)

Ching, O. T. (2017, July 19). *M'sia targets Philippines to import more palm oil, rubber*. Retrieved from New Straits Times:

<https://www.nst.com.my/business/2017/07/258868/msia-targets-philippines-import-more-palm-oil-rubber>

*Coal Trade Indonesia-Philippines Disturbed by Abu Sayyaf Ship Hijackings*. (2016, April 21). Retrieved from Indonesia-investments:

<https://www.indonesia-investments.com/id/news/todays-headlines/coal-trade-indonesia-philippines-disturbed-by-abu-sayyaf-ship-hijackings/item6744?>

Defense, T. M. (2016, June 20 ). *JOINT STATEMENT TRILATERAL MEETING AMONG THE DEFENCE MINISTERS OF THE PHILIPPINES, MALAYSIA AND INDONESIA*. Retrieved from <http://dnd.gov.ph/PDF%202016/Press%20-%20Trilateral%20Meeting%20among%20the%20Defence%20Ministers%20of%20the%20Philippines,%20Malaysia%20and%20Indonesia.pdf>

*DICTIONARY*. (n.d.). Retrieved from Merriam-Webster: <https://www.merriam-webster.com/dictionary/narcotic>

Dursin, K. (2016, May 3). *Ancaman Abu Sayyaf: Mengapa Laut Sulu penting untuk Indonesia?* Retrieved from Rappler: <https://www.rappler.com/indonesia/131543-mengapa-laut-sulu-penting-untuk-indonesia>

Firman, T. (2017, September 5). *Asia Tenggara Surga Bajak Laut*. Retrieved from Tirto: <https://tirto.id/asia-tenggara-surga-bajak-laut-cvXA>

*Foreign Trade Statistics of the Philippines: 2016*. (2017, July 27). Retrieved from Philippine Statistics Authority: <https://psa.gov.ph/content/foreign-trade-statistics-philippines-2016>

Franco, J. (2017, July 17). *Philippines: Addressing Islamist Militancy after the Battle for Marawi*. Retrieved from International Crisis Group: <https://www.crisisgroup.org/asia/south-east-asia/philippines/philippines-addressing-islamist-militancy-after-battle-marawi>

Franco, J. (2019, January 9). *Transnational Security in the Sulu Sea: Something New or Something Old?* Retrieved from Centre Asia: <https://centreasia.eu/en/transnational-security-in-the-sulu-sea-something-new-or-something-old-joseph-franco-2/>

Frew, A. (2014). *THE STATE OF MARITIME PIRACY 2013*. Retrieved from Oceans Beyond Piracy: [http://www.oceansbeyondpiracy.org/sites/default/files/attachments/SoP2013-Digital\\_0.pdf](http://www.oceansbeyondpiracy.org/sites/default/files/attachments/SoP2013-Digital_0.pdf)

*Geography Country Comparisons*. (n.d.). Retrieved from indexmundi: <https://www.indexmundi.com/factbook/compare/malaysia.indonesia/geography>

Gray, A. (2018, September 13). *The 'Coral Triangle' is the largest of its kind, and it's dying*. Retrieved from World Economic Forum: <https://www.weforum.org/agenda/2018/09/what-is-the-coral-triangle/>

*Guide to Counter Piracy and Armed Robbery Against Ships*. (2016). Retrieved from ReCAAP:  
<http://www.imo.org/en/OurWork/Security/PiracyArmedRobbery/Documents/ReCAAP%20Guide%20to%20Counter%20Piracy%20and%20Armed%20Robbery%20Against%20Ships.pdf>

Gumiwang, R. (2016, July 29). *Ekspor Batu Bara Tertunda, Industri Pelayaran Terancam Kian Lesu*. Retrieved from Bisnis.com:  
<https://ekonomi.bisnis.com/read/20160729/98/570111/ekspor-batu-bara-tertunda-industri-pelayaran-terancam-kian-lesu>

Healy, R. (2016, May 6). *Indonesia, Philippines, and Malaysia Agree to Anti-Piracy Patrols*. Retrieved from Center for Security Policy:  
<https://www.centerforsecuritypolicy.org/2016/05/06/indonesia-philippines-and-malaysia-agree-to-anti-piracy-patrols/>

*Indonesia vs. Malaysia Country Comparisons*. (n.d.). Retrieved from Index mundi:  
<https://www.indexmundi.com/factbook/compare/indonesia.malaysia>

*Indonesia: Share of economic sectors in the gross domestic product (GDP) from 2007 to 2017*. (2019, April). Retrieved from Statista:  
<https://www.statista.com/statistics/319236/share-of-economic-sectors-in-the-gdp-in-indonesia/>

Kanato, M. (2017, August ). *ASEAN DRUG MONITORING REPORT 2016*. Retrieved from ASEAN Narcotics Cooperation Center: <https://asean.org/wp-content/uploads/2016/10/Doc6-ADM-Report-2016-as-of-15-November-2017-FINAL.pdf>

*Kerjasama Antar Negara Tingkatkan Stabilitas Dan Pertahanan Negara*. (2018, JANUARY 2018 5 ). Retrieved from Universitas Islam Indonesia:  
<https://www.uui.ac.id/kerjasama-antar-negara-tingkatkan-stabilitas-dan-pertahanan-negara/>

Koh, S. L. (2017, March 30 ). *Is this the most dangerous backwater in the world?* Retrieved from BBC News: <https://www.bbc.com/news/world-asia-39252503>

Lacson, N. E. (2017, March 1). *Ships now refuse to ply Sulu Sea due to piracy*. Retrieved from Manila Bulletin: <https://news.mb.com.ph/2017/03/01/ships-now-refuse-to-ply-sulu-sea-due-to-piracy/>

Macleod, A. (2017, 10 29). *Under the Radar: Security in the Sulu Sea is set to improve*. Retrieved from Global Risk Insights:

<https://globalriskinsights.com/2017/10/can-sulu-sea-become-secure-new-initiative/>

*MALAYSIA'S FOREIGN POLICY*. (n.d.). Retrieved from Ministry of Foreign Affairs of Malaysia: <https://www.kln.gov.my/web/guest/foreign-policy>

McGeown, K. (2013, February 14). *Sulu: The islands that are home to Philippine militancy*. Retrieved from BBC News: <https://www.bbc.com/news/world-asia-21349891>

McKenna, T. (n.d.). *Muslim Separatists in the Southern Philippines*. Retrieved from Asia Society: <https://asiasociety.org/muslim-separatists-southern-philippines>

Minister, T. D. (2015). *Indonesian Defence White Paper 2015*. Retrieved from DEFENCE MINISTRY OF THE REPUBLIC OF INDONESIA: <https://www.kemhan.go.id/wp-content/uploads/2016/05/2015-INDONESIA-DEFENCE-WHITE-PAPER-ENGLISH-VERSION.pdf>

Nasution, A. (2017, 2 3). *ANCAMAN KEAMANAN MARITIM INDONESIA*. Retrieved from Ruang Rakyat: <https://ruangrakyat.com/ancaman-keamanan-maritim-indonesia/>

Oreta, J. S. (2019, February 11). *Challenges to regional security: Territory and terrorism*. Retrieved from Business World: <https://www.bworldonline.com/challenges-to-regional-security-territory-and-terrorism/>

Parameswaran, P. (2016, June 10). *Confronting Threats in the Sulu-Sulawesi Seas: Opportunities and Challenges*. Retrieved from The Diplomat: <https://thediplomat.com/2016/06/confronting-threats-in-the-sulu-sulawesi-seas-opportunities-and-challenges/>

Parameswaran, P. (2016, June 12). *The Other Sea That Dominated the 2016 Shangri-La Dialogue*. Retrieved from The Diplomat: <https://thediplomat.com/2016/06/the-other-sea-that-dominated-asias-security-summit-in-2016/>

Parameswaran, P. (2018, April 19). *Malaysia Spotlights Expanded Sulu Sea Trilateral Patrols*. Retrieved from The Diplomat: <https://thediplomat.com/2018/04/malaysia-spotlights-expanded-sulu-sea-trilateral-patrols/>

*PHILIPPINE FOREIGN POLICY*. (n.d.). Retrieved from Department of Foreign Affairs Republic of the Philippine: <https://www.dfa.gov.ph/80-transparency-category/75-philippine-foreign-policy>

Quinlan, D. (2019, June 11). *A Booming Meth Trade Challenges Southeast Asia's Approach to Drug Policy*. Retrieved from World Politics Review: <https://www.worldpoliticsreview.com/articles/27933/a-booming-meth-trade-challenges-southeast-asia-s-approach-to-drug-policy>

*Regional Office for Southeast Asia and the Pacific*. (2014, November 19). Retrieved from United Nation Office on Drugs and Crime: [https://www.unodc.org/documents/ungass2016/CND\\_Preparations/Brown\\_ba\\_g\\_lunch/Asia/2014.11.19\\_CND\\_preparation\\_for\\_UNGASS\\_2016\\_final.pdf](https://www.unodc.org/documents/ungass2016/CND_Preparations/Brown_ba_g_lunch/Asia/2014.11.19_CND_preparation_for_UNGASS_2016_final.pdf)

Salim, T. (2017, April 24). *Indonesia-Philippines talks to fortify new trade route*. Retrieved from The Jakarta Post: <https://www.thejakartapost.com/seasia/2017/04/26/indonesia-philippines-talks-to-fortify-new-trade-route.html>

Sentosa, P. (2018, April 16). *Narkoba Mengancam? Peran ASEAN dalam Upaya Mengentikannya*. Retrieved from Kumparan: <https://kumparan.com/puji-sentosa/narkoba-mengancam-peran-asean-dalam-upaya-mengentikannya>

*SITAWARE C4I SUITE*. (n.d.). Retrieved from Systematic: <https://systematic.com/defence/products/c2/sitaware/>

Soeriaatmadja, W. (2019, March 12). *Cegah Aliran Senjata Ilegal, Indonesia Tingkatkan Pengawasan Perbatasan*. Retrieved from Mata Mata Politik: <https://www.matamatapolitik.com/news-cegah-aliran-senjata-ilegal-indonesia-tingkatkan-pengawasan-perbatasan/>

Sundaryani, F. S. (2016, July 13). *Govt evaluates coal exports to Philippines over abductions*. Retrieved from The Jakarta Post: <https://www.thejakartapost.com/news/2016/07/13/govt-evaluates-coal-exports-to-philippines-over-abductions.html>

Tisnadibrata, I. L. (2019, January 9). *IPAC: Kerja Sama Trilateral Tak Mampu Cegah Terorisme, Penculikan di Laut Sulu*. Retrieved from Berita Benar: <https://www.benarnews.org/indonesian/berita/ipac-trilateral-maritim-tak-mampu-cegah-terorisme-01092019150853.html>

*Transnational Organized Crime in Southeast Asia : Evolution, Growth and Impact*. (2019). Retrieved from United Nation Office Drugs and Crime:

[https://www.unodc.org/documents/southeastasiaandpacific/Publications/2019/SEA\\_TOCTA\\_2019\\_web.pdf](https://www.unodc.org/documents/southeastasiaandpacific/Publications/2019/SEA_TOCTA_2019_web.pdf)

*Trilateral Maritime Patrol Indomalphi Resmi Dimulai.* (2017, June 19). Retrieved from Kementrian Pertahanan Republik Indonesia:  
<https://www.kemhan.go.id/2017/06/19/trilateral-maritime-patrol-indomalphi-resmi-dimulai.html>

*Tubbataha Reefs Natural Park.* (n.d.). Retrieved from UNESCO:  
<https://whc.unesco.org/en/list/653/>

